

ISSN
2442-8094

Terakreditasi SK Nomor:
773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

Sosio Informa

Volume 4, No. 02, Mei - Agustus 2018

- Fenomena Kenakalan Remaja pada Aktivitas Geng Motor**
Nyi R. Irmayani
- Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga**
Marietta Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni
- Peningkatan Keberfungsian Sosial Lanjut Usia Melalui Program Pelatihan Kembali**
Syamsuddin
- Metode Restorasi Gambut dalam Konteks Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat**
Febri Yuliani dan Aulia Rahman
- Karya Tulis untuk Peneliti**
Achmadi Jayaputra

Sosio Informa	Volume 4	Nomor 02	Halaman 401 - 472	Jakarta Agustus 2018
---------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------------



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Sosio Informa

Volume 4, No. 02, Mei - Agustus 2018

ISSN 2442 - 8094

Sosio Informa merupakan nama baru dari majalah **Informasi**. Berdasarkan catatan; tahun 1979 dimulai dengan nama **Media Informatika** sebagai majalah populer; tahun 1995 namanya berubah menjadi **Informasi** sebagai majalah ilmiah yang mendapat akreditasi LIPI. Sesuai dengan catatan LIPI nama majalah perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perlu meningkatkan mutu, maka sudah disepakati mulai tahun 2015 dengan nama **Sosio Informa**.

Frekwensi terbit : tiga kali setahun
(April, Agustus, Desember)

Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III,
Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 8017146
Fax. : (021) 8017126
Email : sosioinforma@gmail.com
Website: puslit.kemsos.go.id

PENASEHAT (Advisory Editor)

Edi Suharto, MSc, Ph.D

PENANGGUNG JAWAB (Insured Editor)

Drs. Mulia Jonie, M.Si

MITRA BEBESTARI (Peer Reviewer)

Ilmu Kesejahteraan Sosial:

- Edi Suharto, MSc, Ph.D
(Kementerian Sosial)
- Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Binahayati Rusyidi, Ph.D
(Universitas Padjadjaran)
- Dr. Norulhuda Sarnon
(University Kebangsaan Malaysia)

Pengembangan Masyarakat:

Dr. Santoso Tri Raharjo

(Universitas Padjadjaran)

Psikologi:

Prof. Dr. M. Dahlan A. Malek

(Universitas Malaysia Sabah)

Antropologi:

Aoki Takenobu, Ph.D

(Ciba University)

KETUA REDAKSI (Chief Editor)

Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si

WAKIL KETUA (Vice Editor)

Mu'man Nuryana, Ph.D

DEWAN REDAKSI (Editorial Board)

Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Dra. Mulia Astuti, M.Si
- Drs. Anwar Sitepu, MPM
- Drs. Ahmad Suhendi, M.Si

Psikologi

- Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si
- Dra. Alit Kurniasari, MPM

Kesejahteraan Sosial

- Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D
- Ir. Ruaida Murni

REDAKSI PELAKSANA (Managing Editor):

Johan Arifin, SIP

PEMERIKSA NASKAH (Copy Editor):

Muslim Sabarisman, AKS

EDITOR BAHASA INGGRIS (Transleter)

Samy Sriwulandari, SS

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Volume 4, Nomor 02, Mei - Agustus 2018

ISSN 2442 - 8094 Nomor Akreditasi: 773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

DAFTAR ISI	<i>Halaman</i>
■ PENGANTAR REDAKSI	iii
■ Fenomena Kenakalan Remaja pada Aktivitas Geng Motor Nyi R. Irmayani	401 - 417
■ Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Marietta Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni	418 - 436
■ Peningkatan Keberfungsian Sosial Lanjut Usia Melalui Program Pelatihan Kembali Syamsuddin	437 - 447
■ Metode Restorasi Gambut dalam Konteks Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat Febri Yuliani dan Aulia Rahman	448 - 460
■ Karya Tulis untuk Peneliti Achmadi Jayaputra	461 - 472

PENGANTAR REDAKSI

Majalah Sosio Informa Volume 4, Nomor 2 terbit dengan menampilkan lima artikel. Tiga artikel terkait dengan kondisi dan perilaku anggota keluarga yang ditinjau dari aspek remaja, peran ibu rumah tangga, dan fungsi lanjut usia. Artikel dengan judul Fenomena Kenakalan Remaja pada Aktivitas Geng Motor, penulisnya membahas aspek kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat dengan perilaku di jalanan. Ternyata kenakalan remaja dapat dilihat sebelum dan sesudah mereka melakukannya. Aspek lain diperlukan dalam menanggulangi remaja yang senang kebut-kebutan yang membahayakan dirinya dan orang lain. Dua artikel yang membahas tentang ibu rumah tangga dan lanjut usia. Dianggap sesuatu yang harus dilakukan dengan maksud ibu rumah tangga tetap berperan dalam keluarga, walaupun saat ini dalam menghadapi perkembangan jaman. Terutama ibu rumah tangga yang bekerja, agar dapat melakukan kegiatan seimbang untuk keluarga dan karir. Kemudian bagi lanjut usia, disarankan agar melakukan pelatihan kembali (*retraining*) untuk meningkatkan kemampuan dalam usia tua, sehingga akan berguna bagi lanjut usia.

Artikel keempat yang membahas tentang lahan gambut dilihat manfaatnya bagi lingkungan hidup yang menyimpan air dan karbo. Tetapi dengan adanya peralihan penggunaan lahan gambut menjadi perkebunan menimbulkan kerusakan alam dengan fungsi-fungsinya yang terabaikan. Termasuk kerugian saat gambut tersebut terbakar atau dibakar dengan tujuan tertentu. Ada beberapa pemikiran penulisnya yang dapat dijadikan sebagai cara merestorasi lahan gambut. Khususnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Pembahasan akhir tentang perlunya karya tulis ilmiah bagi pejabat fungsional peneliti. Tulisan ini sebagai panduan atau rambu-rambu yang perlu diketahui agar menjamin eksklusivitas karya tulis sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah bagi pejabat fungsional peneliti. Sebab dalam pelaksanaannya, kadang kala ditemukan karya tulis yang belum sesuai dengan aturan dan etika penulisan. Di satu pihak banyak diterbitkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tulis menulis. Di lain pihak penelitian masih perlu pemahaman tentang etika penulisan yang dapat memberi keluasaan bagi peneliti dalam menuangkan pemikirannya secara baik.

Demikian, selamat membaca.

Redaksi

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Nyi R Irmayani (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia)

FENOMENA KENAKALAN REMAJA PADA AKTIVITAS GENG MOTOR

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, Agustus 2018, hal: 401-417.

Abstrak

Fenomena geng motor telah meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Mayoritas anggota geng motor adalah anak-anak muda yang cenderung membuat masalah untuk membuktikan eksistensi mereka di antara kelompok atau geng lain. Dalam banyak kasus, tindakan mereka tidak hanya sebatas kenakalan, pelanggaran norma sosial, tetapi juga gangguan ketertiban. Tindakan mereka juga sudah mengarah kepada tindakan kriminal. Kondisi demikian merupakan persoalan yang cukup serius. Kajian melalui studi pustaka ini mencoba untuk mengungkapkan beberapa latar belakang kenakalan remaja melalui aktivitas geng motor dan beberapa alternatif penanganan terhadap pelaku berdasarkan beberapa tahapan khusus. Penyebab kenakalan remaja bisa muncul dari kurang harmonisnya hubungan individu remaja dengan keluarga atau lingkungan sosialnya. Pada satu sisi remaja sebagai pelaku geng motor tengah berada pada masa transisi dari anak menjadi dewasa. Salah satu kendala yang kerap muncul dalam pengasuhan anak remaja dalam keluarga adalah komunikasi. Lingkungan sosial mulai dari keluarga, masyarakat sekitar, kelompok, sekolah, dan komponen masyarakat lainnya, seyogyanya menjadi sarana yang kondusif bagi para remaja untuk menjalankan tugas perkembangannya. Akan tetapi kerap terjadi lingkungan sosial kurang atau bahkan tidak mampu menjadi sarana yang kondusif bagi para warga baru masyarakat ini. Penanganan bisa dilakukan pada masa pra remaja yang rentan masuk dalam pergaulan geng motor, remaja yang sudah masuk dalam geng motor dan pasca remaja yang sudah ditindak hukum.

Kata Kunci: *fenomena, kenakalan remaja, geng motor.*

Marlina Telaumbanua (Program Pascasarjana Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta)

Mutiara Nugraheni Yogyakarta 55281, Indonesia)

PERAN IBU RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, Agustus 2018, hal: 418-436.

Abstrak

Keluarga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Peran yang lebih dominan adalah peran seorang ibu untuk mengurus rumah tangga dan membantu suami dalam menambah pendapatan keluarganya. Potensi yang paling menarik untuk dikaji adalah potensi ibu rumah tangga ketika tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga melainkan bekerja untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran ibu rumah tangga dan faktor pengaruh ibu

rumah tangga bekerja. Tulisan ini disajikan berdasarkan kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai peran ibu rumah tangga dalam keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasil kajian didapatkan bahwa ibu rumah tangga dapat berperan ganda untuk mengurus keluarga dan ikut serta dalam mencari nafkah. Secara umum alasan ibu rumah tangga bekerja adalah karena ingin membantu suami meningkatkan pendapatan keluarga. Sebagai tenaga kerja wanita dalam keluarga, umumnya mereka memilih bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan arti bagi pembangunan dalam menjamin kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Artikel ini diharapkan menjadi bahan solusi pengembangan potensi ibu rumah tangga untuk menanggulangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kata kunci: keluarga, ibu rumah tangga, potensi, faktor pengaruh, kesejahteraan keluarga.

Syamsuddin (Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari)

PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL LANJUT USIA MELALUI PROGRAM PELATIHAN KEMBALI

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, Agustus 2018, hal: 437-447.

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk tua, dimana lansia telah melebihi tujuh persen dari populasi keseluruhan. Keberfungsian sosial lansia sangat ditentukan oleh kemampuan fungsional, instrumental, eksekutif dan relasi sosial. Sementara secara degeneratif fungsi-fungsi tersebut terus mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Pemberian stimulus yang terencana, terancang dan terarah serta berkelanjutan dapat membantu mencegah atau paling tidak memperlambat proses penurunan tersebut. Kajian ini bermaksud menjelaskan satu pendekatan dalam rangka membantu lansia meningkatkan keberfungsian sosialnya melalui program *retraining* secara emosional, motorik dan kognitif. Pelatihan kembali (*retraining*) merupakan salah satu model rehabilitasi sosial pada lansia dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosialnya. Sejatinnya program ini adalah melatih kembali fungsi-fungsi yang sebelumnya telah dikuasai melalui motor, emotional dan kognitif *retraining*. Kognitif *retraining* dapat meningkatkan keterampilan kognitif klien, meningkatkan fungsi memori, meningkatkan orientasi *visuo-spasial*, dan meningkatkan fungsi eksekutif. Motor *retraining* dapat meningkatkan kecepatan, akurasi dan koordinasi dan meningkatkan mobilitas. Sementara *emotional retraining* meningkatkan harga diri dan rasa berguna pada lansia.

Kata Kunci: keberfungsian sosial, lansia, pelatihan kembali, stimulus.

Febri Yuliani (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau)

Aulia Rahman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI)

METODE RESTORASI GAMBUT DALAM KONTEKS MITIGASI BENCANA KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, Agustus 2018, hal: 448-460.

Abstrak

Indonesia menyumbang 47 % dari luas lahan gambut tropis dunia dan menjadi negara keempat yang memiliki lahan gambut terluas di dunia. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Lahan gambut di Indonesia memberi banyak manfaat karena menyediakan hasil hutan berupa kayu dan nonkayu, menyimpan dan mensuplai air, menyimpan karbon, dan merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna langka yang hanya ada dijumpai pada ekosistem ini. Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dan rapuh, karena lahan ini berada dalam suatu lingkungan rawa, yang terletak di belakang tanggul sungai. Pada kurun waktu kurang lebih dua puluh

tahun terakhir, kegiatan konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas (*pulp wood*) diperkirakan telah merusak lahan gambut dengan segala fungsi ekologisnya. Sepanjang Juni sampai November tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menurut *World Bank* ditaksir kerugian mencapai Rp. 221 triliun. Pada umumnya kebakaran ini terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebab kebakaran tersebut disinyalir dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja oleh oknum perusahaan perkebunan dan masyarakat untuk membuka lahan perkebunan, pembersihan dan penyuburan lahan dengan cara membakar. Selain itu, kemarau yang ekstrim dan angin kencang mendorong perluasan daerah terdampak kebakaran. Artikel ini merupakan sebuah studi pustaka yang mendeskripsikan bagaimana metode restorasi memiliki kaitan dengan proses mitigasi bencana kebakaran lahan gambut dan bagaimana metode restorasi dapat memberdayakan masyarakat lokal. Ada 5 langkah dalam merestorasi gambut yaitu: 1) memetakan gambut, 2) menentukan jenis, pelaku, dan rentang waktu pelaksanaan restorasi, 3) membasahi gambut (*rewetting*), 4) menanam lahan gambut (*revegetasi*), dan 5) memberdayakan masyarakat lokal. Restorasi merupakan sebuah metode rehabilitasi khusus kebakaran hutan dan lahan gambut yang didalam prosesnya terdapat kegiatan yang mendukung mitigasi bencana. Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Masyarakat jangan hanya dibebani untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut namun juga diberikan manfaat dari kegiatan pencegahan itu. Kegiatan Restorasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana, dapat dimulai melalui penanaman kembali hutan dan lahan gambut yang terdampak dengan tanaman-tanaman semusim (pada umumnya hortikultura) dan disandingkan dengan tanaman pohon yang dapat mengurangi kuantitas karbon atau mampu menyerap karbon serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, pembangunan lahan penampung air dalam kubah gambut yang berfungsi sebagai sumber pembasahan lahan gambut, dapat dimanfaatkan untuk perikanan darat oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci: bencana kebakaran hutan dan lahan, mitigasi bencana, restorasi gambut, pemberdayaan masyarakat.

Achmadi Jayaputra (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI)

KARYA TULIS UNTUK PENELITI

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, Agustus 2018, hal: 461-472.

Abstrak

Seorang peneliti diwajibkan menyusun karya tulis sebagai bukti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai insan yang memiliki kepakaran di bidangnya. Karya tulis biasanya terdiri atas dua yaitu; buku dan makalah. Dilihat dari pengalaman melakukan penilaian angka kredit selalu ditemukan ketidak sesuai hasil karya tulis ilmiah dengan penilaian angka kredit. Kadang-kala ada yang sulit diselesaikan. Seringkali buku dan makalah disusun belum sesuai dengan kaidah dalam penilaian angka kredit peneliti, sehingga perlu disikapi sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dalam menyusun karya tulis. Tulisan ini dapat sebagai jawaban atas berbagai hal yang muncul dalam menulis untuk diterbitkan. Diakui dalam penelitian sosial selalu disesuaikan dengan kepentingan lembaga masing-masing, sehingga tidak ada acuan yang baku dalam menerbitkan buku atau makalah. Oleh karena itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika penelitian.

Kata kunci: karya tulis, penelitian, etika penelitian.

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.

Nyi R Irmayani (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia)

THE PHENOMENA OF JUVENILE DELIQUENCY ON MOTORCYCLE GANGS' ACTIVITIES

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, August 2018, page: 401-417.

Abstract

The phenomenon of motorcycle gangs has already increased social awareness of the community. The majority of motorcycle gangs' members are the adolescents who tend to make trouble to prove their existence among the other groups or gangs. In many cases, their actions are not only juvenile delinquency and violation on social norms, but also disturbance for public order. The actions have led to crimes as well. Such conditions are quite serious issues. The review through this literature study attempts to reveal some backgrounds of the juvenile delinquency through motorcycle gangs' activities and some offenders' alternative treatments based on some special stages. The cause of juvenile delinquency can arise from less harmonious individual relationship between adolescents with their family or social environment. On one side, adolescents as motorcycle gangs are in transitional age from child to adulthood. One of the obstacles that often arises in the care of adolescents in their family is communication. The social environment from their family, community, group, school and the other community components should be a conducive medium for them to carry out their developmental tasks. However, the social environment is often less or even unable to become a conducive tool for the new citizens of this community. Handling can be done in pre-adolescent years which are vulnerable to enter the association of motorcycle gangs, the adolescents who have entered motorcycle gangs and the post-adolescents who have been prosecuted.

Keywords: *phenomenon, juvenile delinquency, motorcycle gangs.*

Marlina Telaumbanua (Program Pascasarjana Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta)

Mutiara Nugraheni Yogyakarta 55281, Indonesia)

THE ROLE OF HOUSEWIVES TO IMPROVE THEIR FAMILY'S WELFARE MARIETTA

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, August 2018, page: 418-436.

Abstract

Family has an important role to enhance social welfare. A more dominant role is the role of a mother to take care of households and help her husband increase his income in the family. The most interesting potential to be studied is the housewives' potential when they do not only act as housewives, but also work to help improve their family's welfare. This article was written with the aim to describe the roles of housewives and the influence factors of working housewives. This paper was presented by studying literature and the study of critical thinking about housewives' role in their family to improve the family's welfare. The study results

show that housewives can play double roles, namely: to take care of their family and to participate in making a living. Generally, the reason of housewives to work is to help their husband improve the family's income. As female workers in the family, they prefer working in the informal sectors. This is done to share their time to work and to take care of their family. Women's participation does not only demand equal rights, but also states the meaning of development to ensure their family's welfare and the welfare of Indonesian community. This article is expected to be a material solution for housewives' potential development to alleviate poverty and to improve their family's welfare.

Keywords: family, housewives, potential, influence factors, family welfare.

Syamsuddin (Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari)

THE ENHANCEMENT OF THE ELDERLY'S SOCIAL FUNCTIONING WITH RETRAINING PROGRAM

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, August 2018, page: 437-447.

Abstract

Indonesia is a country with an elderly population and the country where the elderly have exceeded seven percent of the population. The elderly's social function is really determined by functional, instrumental and executive functions as well as social relation. Meanwhile, these functions generatively continue decreasing because of the increase of their age. Providing a planned, formulated, directed and sustainable stimulus can help prevent or at least slow down the decreasing process. This study intends to explain an approach to help the elderly increase their social function through emotional, motoric and cognitive retraining program. Retraining is a model of social rehabilitation for the elderly to improve their social function. Indeed, this program is to retrain the functions that have been previously mastered through motor, emotional and cognitive retraining. Cognitive retraining can improve the elderly's cognitive skills, memory function, visuo-spatial orientation, and executive function. Motor retraining can increase their speed, accuracy and coordination as well as mobility. Meanwhile, emotional retraining increases self-esteem and a sense of usefulness for the elderly.

Keywords: social function, elderly, retraining, stimulus.

Febri Yuliani (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau)

Aulia Rahman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI)
PEATLAND RESTORATION METHOD IN THE CONTEXT OF PEATLAND FIRE DISASTER MITIGATION AND COMMUNITY EMPOWERMENT

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, August 2018, page: 448-460.

Abstract

Indonesia has 47% of the world's tropical peatland and it becomes the fourth country with the largest peatland in the world. The area of peatland in Indonesia is estimated to be 20.6 million hectares or about 10.8 percent of Indonesia's land area. The peatland in Indonesia provides many advantages as it provides timber and non-timber forest products as well as stores water and carbon supplies. It also becomes a habitat for biodiversity with variety of rare flora and fauna which can only be found in this ecosystem. Peatland is a unique and fragile ecosystem as it is located in a swamp environment behind a river embankment. The conversion of peatland into agricultural land, palm oil plantation and pulpwood over the past twenty years is thought to have damaged peatland with all its ecological functions. World Bank estimated the forest and land fires occurring in Indonesia from June to November, 2005 lost this country up to IDR 221 trillion. The fires generally occurred in Sumatra and Kalimantan. The causes of the fires were allegedly committed intentionally and accidentally by unscrupulous plantation companies and communities. Their purpose was to

open plantation land and to clear as well as to enrich the land by burning it. In addition, extreme drought and strong wind encouraged the expansion of fire affected areas. This article is a literature study describing how the restoration method has linked to the mitigation process of peatland fires and how the restoration methods can empower local communities. There are 5 steps in peatland's restoration: 1) mapping the peatland, 2) determining the type, actors, and restoration timeframe, 3) rewetting the peatland, 4) planting the peatland (revegetation), 5) empowering local communities. Restoration is a special method of forest and peatland fire rehabilitation in which there are the activities that support disaster mitigation. Community empowerment has an important role to prevent forest and peatland fires. Communities should not only be burdened to prevent forest and peatland's fires, but also provided the advantages of preventive activities. Restoration activities related to disaster mitigation can be initiated through replanting affected forests and peatlands with seasonal crops and mixed with the plants that can reduce carbon or absorb carbon and that have high economic value. In addition, the construction of water reservoirs within the peat domes that serve as a source of wetting of peatlands can be utilized for onshore fisheries by local communities.

Keywords: forest and land fire disaster, disaster mitigation, peatland restoration, community empowerment.

Achmadi Jayaputra (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI)

PAPERS FOR RESEARCHER

SOSIO INFORMA Vol. 4, No. 2, August 2018, page: 461-472.

Abstract

A researcher is required to write a paper to be an evidence for the execution of his duties and function as an expert in a certain field. The papers usually consist of two types, namely: books and papers. Based on the experience of doing credit assessment, the incompatibility between papers and credit assessment is always found. Sometimes, some of them are difficult to resolve. The books and papers are often arranged not in accordance with the rules of the researcher's credit assessment. Therefore, it needs some efforts to improve and to conform them with the rules. This paper aims to give an understanding to prepare the papers. This paper may be as a response to all of the problems that appear in writing for publication. The social research must be adapted with each institution so that there is no standard regulation to publish books or papers. Consequently, the books and papers should be guided by laws and research ethics.

Keywords: papers, research, research ethics.

FENOMENA KENAKALAN REMAJA PADA AKTIVITAS GENG MOTOR

THE PHENOMENA OF JUVENILE DELIQUENCY ON MOTORCYCLE GANGS' ACTIVITIES

Nyi R Irmayani

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
Email: irmayani_sa@yahoo.com

Abstrak

Fenomena geng motor telah meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Mayoritas anggota geng motor adalah anak-anak muda yang cenderung membuat masalah untuk membuktikan eksistensi mereka di antara kelompok atau geng lain. Dalam banyak kasus, tindakan mereka tidak hanya sebatas kenakalan, pelanggaran norma sosial, tetapi juga gangguan ketertiban. Tindakan mereka juga sudah mengarah kepada tindakan kriminal. Kondisi demikian merupakan persoalan yang cukup serius. Kajian melalui studi pustaka ini mencoba untuk mengungkapkan beberapa latar belakang kenakalan remaja melalui aktivitas geng motor dan beberapa alternatif penanganan terhadap pelaku berdasarkan beberapa tahapan khusus. Penyebab kenakalan remaja bisa muncul dari kurang harmonisnya hubungan individu remaja dengan keluarga atau lingkungan sosialnya. Pada satu sisi remaja sebagai pelaku geng motor tengah berada pada masa transisi dari anak menjadi dewasa. Salah satu kendala yang kerap muncul dalam pengasuhan anak remaja dalam keluarga adalah komunikasi. Lingkungan sosial mulai dari keluarga, masyarakat sekitar, kelompok, sekolah, dan komponen masyarakat lainnya, seyogyanya menjadi sarana yang kondusif bagi para remaja untuk menjalankan tugas perkembangannya. Akan tetapi kerap terjadi lingkungan sosial kurang atau bahkan tidak mampu menjadi sarana yang kondusif bagi para warga baru masyarakat ini. Penanganan bisa dilakukan pada masa pra remaja yang rentan masuk dalam pergaulan geng motor, remaja yang sudah masuk dalam geng motor dan pasca remaja yang sudah ditindak hukum.

Kata Kunci: *fenomena, kenakalan remaja, geng motor.*

Abstract

The phenomenon of motorcycle gangs has already increased social awareness of the community. The majority of motorcycle gangs' members are the adolescents who tend to make trouble to prove their existence among the other groups or gangs. In many cases, their actions are not only juvenile delinquency and violation on social norms, but also disturbance for public order. The actions have led to crimes as well. Such conditions are quite serious issues. The review through this literature study attempts to reveal some backgrounds of the juvenile delinquency through motorcycle gangs' activities and some offenders' alternative treatments based on some special stages. The cause of juvenile delinquency can arise from less harmonious individual relationship between adolescents with their family or social environment. On one side, adolescents as motorcycle gangs are in transitional age from child to adulthood. One of the obstacles that often arises in the care of adolescents in their family is communication. The social environment from their family, community, group, school and the other community components should be a conducive medium for them to carry out their developmental tasks. However, the social environment is often less or even unable to become a conducive tool for the new citizens of this community. Handling can be done in pre-adolescent years which are vulnerable to enter the association of motorcycle gangs, the adolescents who have entered motorcycle gangs and the post-adolescents who have been prosecuted.

Keywords: *phenomenon, juvenile delinquency, motorcycle gangs.*

PENDAHULUAN

Komunitas bermotor saat ini bukan hanya menjadi *trend* masyarakat perkotaan, melainkan sudah menjamur sampai pelosok pedesaan. Hal tersebut selain semakin mudahnya cara masyarakat memiliki kendaraan berotor roda dua, juga karena kebutuhan akan transportasi maupun sebagai gaya hidup bagi sebagian orang (Sambas, 2011). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster. Gangster berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) terorganisir dan memiliki kebiasaan yang ‘berantakan’ dan anti aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor (Sari, 2014).

Salah satu kejadian kebrutalan geng motor seperti terjadi di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada bulan Mei 2017 dimana menurut Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan “maraknya aksi geng motor yang ada di kawasan Jagakarsa dipicu oleh adanya tantangan yang dibuat antarkelompok di media sosial. Satu kelompok menantang kelompok lain di luar wilayah Jagakarsa lewat dunia maya”. Aksi biasanya dilakukan setelah mereka berkumpul minimal 15 orang. Mereka membawa senjata tajam dan menyeret senjata tajam itu di jalanan. Mereka berkumpul minimal 15 orang, naik sepeda motor berpasangan, mereka membawa sagem, golok, celurit, serta samurai. Aksi dari orang-orang ini bukan untuk melakukan perampasan harta atau kekayaan orang. Namun mereka sengaja membuat onar dan membuat kegaduhan di masyarakat. Tujuannya mereka bukan untuk begal atau rampas harta kekayaan orang, tapi sengaja buat onar dan lukai orang (Detiknews, 23 Mei 2017).

Secara umum, geng motor merupakan kelompok anak muda (remaja) karena ada kesamaan latar belakang, sekolah, daerah dan lain-lain yang tergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua (Sambas, 2011). Dalam beberapa pemberitaan di media selama beberapa tahun terakhir, citra geng motor identik dengan kelompok yang memiliki budaya negatif. Perilaku para anggota tersebut terjadi sebagai suatu penyimpangan yang kolektif, di mana kejahatan seperti perampokan hingga pembunuhan secara berturut-turut menjadi masalah utama dalam kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor di seluruh wilayah di Indonesia.

Perilaku sosial yang menyimpang adalah suatu perilaku yang diekspresikan oleh seorang atau beberapa orang yang secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Dengan kata lain, semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma dinamakan perilaku menyimpang, maka dapat diartikulasikan pula bahwa geng motor yang menyimpang adalah perilaku yang diekspresikan oleh anggota geng motor secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan dengan norma norma yang berlaku yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan serta norma hukum yang berlaku dimasyarakat dan sudah menjadi kontrak sosial (*social of contract*) (Rahmat, 2013).

Tindakan kenakalan remaja yang tidak terkontrol dapat menjerumuskan seorang remaja pada perilaku kejahatan remaja (*juvenile delinquency*) yang merupakan salah satu penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah

laku umum. Disebut juga sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi penyakit (Kartono, 2010).

Kenakalan remaja boleh jadi berkaitan erat dengan hormon pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan perilaku remaja sulit diprediksi, namun ini bukan lah jawaban yang dapat menjadi justifikasi atas perilaku remaja. Rasanya anggapan bahwa hormon berpengaruh sangat besar agak dilebih-lebihkan, nampaknya ada faktor lain yang menyebabkan mengapa angka kriminalitas di kalangan remaja menjadi sangat tinggi dan perbuatan kriminalitas tersebut sangat meresahkan masyarakat secara luas.

Salah satu tuduhan mengenai tingginya angka kriminalitas remaja atau lebih tepatnya kenakalan remaja adalah tidak berfungsinya keluarga dan/atau ketidakberfungsian sosial masyarakat. Keluarga dianggap gagal dalam mendidik remaja sehingga menyebabkan mereka melakukan tindakan penyimpangan yang berujung dengan diberikannya sanksi sosial oleh masyarakat. Alih-alih tertib, sanksi yang diberikan justru menjadikan remaja menjadi lebih sulit diatur. Dan hal ini pula yang menyebabkan masyarakat dianggap gagal dalam melakukan tindakan pencegahan atas terjadinya perilaku menyimpang tersebut. Keluarga memegang peranan yang penting, dan hal ini diakui oleh banyak pihak. Keluarga merupakan elemen penting dalam melakukan sosialisasi nilai, norma, dan tujuan-tujuan yang disepakati dalam masyarakat, dan tingginya angka kriminalitas remaja sebagai konsekuensi dari tidak berjalannya aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dianggap sebagai kesalahan keluarga. Jika melihat dari sisi teoritis, tentu saja bukan hanya keluarga yang dipersalahkan, masyarakat pun dapat dipersalahkan dengan tidak ditegakkan aturan

secara ketat atau membantu sosialisasi norma dan tujuan dalam masyarakat.

Salah satu faktor lainnya yang juga harus diperhatikan adalah *peer group* remaja tersebut. Teman sepermainan memegang peran penting dalam meningkatnya angka kriminalitas di kalangan remaja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sutherland, bahwa tindakan kriminal bukan lah sesuatu yang alamiah namun dipelajari, hal ini lah yang menyebabkan pentingnya untuk melihat teman sepermainan remaja tersebut (Suratmi, 2012)

Sekelompok anak muda yang merasa diperlakukan tidak adil dan sehari-hari termarginalkan sangat mungkin bertindak agresif dan bertindak kekerasan lebih besar. Sekadar menyalahkan ulah anarkistis anggota geng motor sebagai tindakan yang menyimpang atau melanggar hukum, kemudian memenjarakan mereka, mungkin untuk sementara bisa meredam meluasnya aksi brutal geng motor. Tetapi, dengan memahami bahwa subkultur geng motor yang brutal itu sebetulnya tumbuh karena kondisi lingkungan yang tidak kondusif dan cara berpikir mereka yang terkontaminasi pengaruh buruk *peer group*, sebetulnya akan dapat dilahirkan upaya penanganan yang lebih berdampak jangka panjang (Suyanto, 2015).

Kerumitan dalam memahami perilaku agresif khususnya pada remaja menumbuhkan beberapa pendekatan dalam upaya mencoba menjelaskan dinamika penyebab perilaku agresif. Pembahasan tentang faktor-faktor penyebab munculnya perilaku agresif juga amat tergantung dari sisi pendekatan yang digunakan. Setidaknya ada empat pendekatan utama untuk memahami beberapa penyebab munculnya perilaku agresif ini, yaitu (Tieger dalam Dunkin, 1995; Brigham, 1991; Baron, Byrne dan Suls, 1994): 1) Pendekatan biologis, 2) Pendekatan psikologis, 3) Pendekatan situasional, dan

4) Pendekatan sosio-ecological. Pendekatan biologis, memandang bahwa perilaku agresif terkait dengan kondisi hormon testosterone dalam diri individu (Susantyo, 2016).

Berdasarkan pemikiran di atas, tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi atas beberapa pertanyaan berikut: apa latar belakang (penyebab) kenakalan remaja melalui aktivitas geng motor dan bagaimana alternatif penanganan terhadap remaja tersebut. Diharapkan kajian literatur ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi program penanganan permasalahan kenakalan remaja khususnya yang terlibat di geng motor.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Terbentuknya Geng Motor

Proses pembentukan geng bagi tiap individu memiliki asal mula yang berbeda-beda, mungkin unik, sesuai dengan karakter, kepribadian dan perasaan yang ada dalam diri mereka masing-masing. Individu-individu yang kolektif tersebut membentuk geng tersebut bermaksud untuk mencari kebahagiaan dan mendapat teman yang pasti. Kebahagiaan yang mereka rasakan itu, maka anggota geng dapat mempererat pertemanan, persatuan, dan bertahan di dalam geng-nya. Walaupun cara-cara yang salah dan menyimpang dari norma, mereka tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan mencari kesenangan dan kebahagiaan (Sari, 2014).

Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Menurut (Hogg and Vaughan, 2002) dalam teori identitas

sosial, identitas sosial adalah pengetahuan seseorang bahwa mereka termasuk dalam kelompok sosial. Identitas sosial juga merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari persepsi keanggotaannya pada kelompok sosial. Identitas sosial juga merupakan bagian dari konsep diri individu yang diperoleh dari keanggotaan individu dalam kelompok, nilai-nilai yang dimiliki individu dalam kelompok, dan ikatan emosional yang didapatkan individu dalam kelompok (Fadila, 2013).

Terbentuknya geng motor ini dimulai dari perkumpulan atau kelompok antar pelajar. Sebenarnya aktivitas di mana para pelajar berkumpul dan berkelompok merupakan hal yang lumrah. Masalahnya adalah, apabila kegiatan ketika berkumpulnya itu mengarah kepada hal yang negatif serta merugikan diri siswa itu sendiri bagi masa depannya. Maka tidak cukup hanya ditangani oleh lembaga formal saja, dalam hal ini sekolah harus mengoptimalkan tiga lembaga pendidikan yaitu, lembaga formal dalam hal ini sekolah, lembaga informal yaitu keluarga, dan non formal yaitu masyarakat agar tetap bersinergi dalam mencegah keikutsertaan siswa dalam geng motor (Sari, 2014).

Sementara itu, agar dapat dirinci, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya geng adalah sebagai berikut (Sari, 2014): Pengaruh tayangan media massa baik cetak maupun elektronik; Pengaruh norma-norma baru dari luar; Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua; Kurang kemampuan menyesuaikan diri dalam lingkungan; Kehidupan keluarga yang tidak harmonis; Kurang mendapat pembinaan moral dari berbagai pihak; Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen; Masyarakat yang kurang

memperoleh pendidikan; dan Kurangnya pengawasan terhadap tingkah laku remaja.

B. Penyebab Kriminalitas dan Kebrutalan Geng Motor

Seseorang berperilaku menyimpang karena dipengaruhi oleh mengendurnya pengawasan serta pengendalian sosial. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap kemerosotan moral, sehingga individu sukar untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma. Perubahan norma yang terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami perkembangan dari masyarakat yang sederhana menuju ke masyarakat yang modern. Kondisi demikian mendorong sifat individualisme yang cenderung ingin melepaskan diri dari kendali sosial, serta merosotnya norma-norma umum.

Mengendurnya norma-norma umum kelompok menjadi terpisah-pisah, sehingga tindakan-tindakan serta harapan-harapan bertentangan dengan harapan orang lain. Selanjutnya sistem dalam masyarakat runtuh dan masyarakat dalam kondisi anomi. Bila keadaan anomi tersebut dihadapi oleh anak dan remaja akibatnya akan menimbulkan gejala-gejala perilaku penyimpangan. Bahkan cenderung ke perilaku kriminal. Hal tersebut nampak dalam perilaku geng motor yang seringkali menggunakan kekerasan dalam kegiatan mereka (Sambas, 2011).

Menyikapi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor. Terdapat hubungan yang sangat erat antara lemahnya ikatan seseorang dengan orang tua, lingkungan pendidikan dengan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan para remaja yang merupakan anggota geng motor. Begitu pula dalam kaitannya dengan rendahnya tingkat kepercayaan pada norma hukum dan norma agama

pun menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda. Rendahnya kepercayaan seseorang terhadap norma hukum, dan norma agama, cenderung mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang. Apabila seseorang dihadapkan ke dalam kondisi ketidakmampuan mengendalikan diri, didukung dengan lingkungan sosial yang tidak mampu untuk mengontrol, maka sangatlah besar perilaku menyimpang akan mudah terjadi (Hadisuprpto, 2004).

Media pembentukan perilaku menyimpang para anggota geng motor tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut (Tofail, 2013):

1. Keluarga. Pembentukan kepribadian seseorang untuk pertama kalinya akan berawal dari keluarga karena proses sosialisai yang dialami seorang individu untuk membentuk kepribadiannya itu berawal dari media sosialisasi ini. Keluarga merupakan faktor penentu bagi perkembangan atau pembentukan kepribadian seorang anak selanjutnya. Kepribadian anak akan cenderung positif jika ia dilahirkan di keluarga yang baik dan harmonis. Sebaliknya akan cenderung negatif jika lahir dikeluarga yang kacau dan selalu terbebani dengan berbagai masalah.
2. Lingkungan. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seorang individu dalam proses pembentukannya. Seorang individu yang tinggal dalam lingkungan yang baik. Taat dalam melakukan ibadah, melakukan perbuatan yang baik dan positif akan mempengaruhi kepribadiannya menjadi baik. Sebaliknya, bila seorang individu hidup dan tinggal di lingkungan yang buruk (suka melakukan tindakan kriminalitas) akan membentuk kepribadian yang buruk atau menyimpang.

3. Kelompok Bermain. Adakalanya seorang individu juga mempunyai kelompok bermain atau pergaulan di luar lingkungan tempat tinggalnya tadi yang ia peroleh dari lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Kelompok bermain atau pergaulan ini juga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang individu. Jika ia memiliki kelompok bermain yang positif, suka belajar, dan melakukan perbuatan yang baik, maka perilakunya cenderung positif. Sebaliknya apabila individu memilih kelompok bermain yang negatif, maka pola perilaku dan kepribadiannya akan cenderung negatif. Karena itu kita harus pintar-pintar memilih teman untuk bergaul.

4. *Sensation Seeking* (Zuckerman, 1979) adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan individu dalam melakukan hal-hal yang beragam, kebutuhan untuk melakukan hal yang baru (novel), dan adanya keinginan untuk mengambil resiko baik itu bersifat fisik maupun sosial yang akan diidentifikasi melalui uji skor hasil responden dengan menggunakan instrumen yang didasarkan dari teori *sensation seeking* Zuckerman.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Armayati (2011), sesama anggota geng motor sudah terbiasa menggunakan kata-kata umpatan dalam percakapan sehari-hari. Mereka juga menganggap perilaku agresif adalah hal yang biasa. Karena anak-anak lain juga melakukannya. Temuan data tersebut menunjukkan suatu perilaku agresi dalam kelompok dapat dipicu oleh hal-hal yang sifatnya sepele yang dianggap tidak berarti apa-apa, karena setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda dalam menanggapi atau mengartikan suatu tindakan tertentu (Armayati, 2011).

Hal tersebut berhubungan erat

dengan kepribadian anggota geng motor. Kepribadian adalah hal yang sulit dipahami. Pada dasarnya, manusia tidak bisa mengamatinya secara langsung, tapi harus menyimpulkannya dari pola perilaku seseorang selama perjalanan waktu. Anggapannya adalah bahwa pola-pola itu saling bergantung dengan cara yang berarti, relatif stabil dari waktu ke waktu, dan bervariasi dari satu individu ke individu. Kepribadian berhubungan erat dengan identitas dan persepsi diri seseorang.

Kepribadian biasanya diukur melalui kuesioner di mana responden menjawab pertanyaan tentang diri mereka sendiri, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tertentu, atau menunjukkan bagaimana perilaku mereka dalam berbagai situasi. Lagi pula, harus diapresiasi bahwa banyak jenis kejahatan bisa sangat menggoda. Kejahatan properti terdoda dari perspektif perolehan material; Kejahatan seksual mungkin memiliki kepuasan seksual sebagai imbalannya, kekerasan mungkin mendapat respek dari teman sebaya, dan, yang lebih parah dari semua itu, melakukan kejahatan bisa sangat menyenangkan, menimbulkan adrenalin dan sebagainya (Pakes dan Winstone, 2007).

Hurlock (1990) memberikan perumusan tentang penyesuaian diri secara lebih umum, yaitu bilamana seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap orang lain secara umum ataupun terhadap kelompoknya dan ia memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang menyenangkan berarti ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Dengan kata lain orang tersebut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hilangnya figur orangtua juga dapat menjadi faktor seorang individu melakukan kekerasan. Diskusi tentang peran keluarga dan kriminalitas

beberapa kali terpusat pada perceraian dan para orang tua tunggal. Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga anggota geng dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang terjadi akibat kesibukan orang tua sehingga melupakan perhatian terhadap anak-anaknya khususnya terkait dimana anak itu bergaul dan dengan siapa (Rahmat, 2013).

Perilaku, pandangan hidup dan cara hidup masyarakat, sadar atau tidak, sengaja ataupun tidak telah membina generasi muda. Apabila dalam masyarakat terdapat penyakit-penyakit sosial atau lingkungan yang buruk, hal ini membentuk generasi muda berperilaku buruk pula. Oleh karena itu adalah tanggung jawab setiap anggota masyarakat untuk membentuk generasi muda yang mampu mengemban amanat pembangunan Negara di masa datang (Rahmat, 2013).

Ketika kita membahas kejahatan dan perceraian, penting untuk menekankan bahwa bukan perceraian, atau tidak adanya figur ayah yang memperhitungkan risiko kenakalan yang tinggi. Sebaliknya, stres dan perselisihan sebelum perceraian lah yang diidentifikasi sebagai faktor utama. Keharmonisan keluarga lebih penting dari pada *make-up* keluarga (McCord 1979). Rutter (1971) menemukan bahwa keluarga orang tua tunggal karena kematian salah satu orang tua tidak mewakili faktor risiko kriminalitas (Pakes dan Winstone, 2007).

Secara umum, penyebab kejahatan adalah faktor atau keadaan yang berlaku secara signifikan lebih banyak pada pelanggar daripada orang umum atau bahkan korban dan berpotensi menimbulkan hubungan langsung atau langsung dengan kejahatan. Faktor-faktor seperti ketergantungan alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan umumnya

dipahami memiliki pengaruh potensial pada perilaku masyarakat. Tidaklah kontroversial untuk menganggapnya sebagai penyebab kejahatan. Sejauh mana faktor sosial seperti kemiskinan atau pengucilan sosial dapat menyebabkan kejahatan diperdebatkan dengan lebih hangat. Sama halnya, peran biologi, melalui gen, hormon atau disfungsi otak merupakan faktor kekhawatiran. Tidak hanya sejauh mana kemampuan biologis orang mempengaruhi kecenderungan mereka untuk menyinggung faktor kontroversial, namun juga pertanyaan bagaimana menggunakan pengetahuan semacam itu adalah faktor lain yang tidak mudah dijawab. (Pakes dan Winstone, 2007).

Emosi memiliki peranan dalam menentukan munculnya perilaku agresi seseorang. Pada dasarnya, emosi berperan besar terhadap suatu tindakan manusia, bahkan dalam pengambilan keputusan secara rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi emosi individu sering berubah-ubah, kondisi ini terjadi disebabkan oleh kecerdasan emosi dari individu yang kurang baik. Individu yang cerdas emosinya berarti dapat mengendalikan luapan emosinya sehingga individu tersebut dapat mengelola emosinya dengan baik (Miladdina, 2010).

Sikap mental yang tidak sehat yang terdapat dalam diri individu juga dapat menjadi faktor utama dalam kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. Sikap itu ditunjukkan dengan tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang (Rahmat, 2013).

Lebih lanjut Cooper dan Sawat (dalam Goleman, 1995), mengatakan bahwa kecerdasan emosi menuntut seseorang untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan pada diri sendiri dan juga orang

lain, selain juga untuk menanggapi pendapat dan masukan orang lain dengan tepat, menerapkan dengan efektif informasi dan energi emosi dalam kehidupan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa individu yang cerdas secara emosi mampu mengontrol emosinya dengan baik sehingga respon emosi yang ditunjukkan juga baik.

Lantas, bagaimana Psikologi sebagai suatu disiplin ilmu memandang kekerasan serta agresifitas yang terjadi kepada para anggota geng motor? Sigmund Freud percaya bahwa agresi dan kekerasan adalah merupakan bagian dari insting manusia. Kekerasan adalah respon dari hambatan prinsip kesenangan, dan agresi adalah dorongan tetap perwujudan instink untuk mati. Secara umum, pandangan teori psikoanalisis penyebab kejahatan dan perilaku nakal, adalah yaitu: 1) Ketidak mampuan mengontrol dorongan kriminal (id) karena lemahnya perkembangan ego dan super-ego; 2) Karakter anti sosial terbentuk sebagai akibat gangguan pada perkembangan ego. 3) Perkembangan superego yang berlebihan membuat id sulit terpuaskan, dan ini akan menyebabkan gangguan neurotik.

Kedua adalah teori *Labelling*. Proses yang membuat kejahatan adalah sebuah proses yang panjang yang secara terus menerus bergulir dan saling terkait antara satu hal dengan hal yang lain. Ketika orang melakukan tindak kejahatan, tidak secara otomatis proses labeling memberikan cap bahwa ia adalah seorang penjahat. Teori labeling menekankan isu sentralnya dari mengapa atau bagaimana seseorang melakukan tindak kejahatan hingga bagaimana seseorang dapat didefinisikan sebagai seorang penjahat. Garfinkel menggunakan istilah *degradation ceremony*

untuk menggambarkan proses yang mana seseorang dipisahkan dari lingkungannya dan diberi cap sebagai penjahat.

Pada dasarnya, ada 8 langkah dalam *degradation ceremony*, yaitu a) pelaku dan tindakannya harus diartikan sebagai hal yang berbeda; b) pelaku harus dengan terang-terangan melakukan jenis kejahatan tertentu dan perbuatan serta motifnya tidak dapat didefinisikan atau ditentukan lewat berbagai cara; c) pengadu (denouncer, yang menyatakan) harus mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat; d) pengaduan harus dilihat untuk kepentingan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat; e) pengadu harus nampak tidak mempunyai masalah personal balas dendam apapun didalam melawan pelaku; f) pengadu harus nampak dilihat bahwa usahanya itu dilakukan untuk mendukung kepentingan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat; g) pengadu harus dilihat sebagai pihak yang terpisah dengan orang yang diadukan, dan h) orang yang diadukan harus diatur sebagai bagian dari pengesahan masyarakat (Koentjoro, 2013).

C. Permasalahan yang Ditimbulkan Geng Motor

Adapun hal-hal yang berbahaya dilakukan geng motor adalah sebagai berikut (Sari, 2014):

1. Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat keamanan atau *safety ride tools* seperti: helm, sepatu dan jaket.
2. Membawa senjata tajam yang dibuat sendiri atau sudah dari pabriknya seperti: samurai, badik, hingga bom Molotov.
3. Biasanya muncul di malam hari dan tidak menggunakan lampu penerang serta menimbulkan suara-suara yang relatif lebih berisik.

4. Jauh dari kegiatan sosial, tidak pernah membuat acara-acara sosial seperti sunatan masal atau kawin masal, mereka lebih suka membuat acara tawuran masal.
5. Anggotanya lebih banyak ke pada kaum laki-laki yang sering mabuk, berjudi dan hobi membunuh, sekalipun tidak menutup kemungkinan ada kaum hawa yang ikut.
6. Motor yang mereka gunakan tidak lengkap, tidak ada spion, sein, hinggalampu utama. Yang diutamakan oleh mereka adalah kecepatan.
7. Visi dan misi mereka jelas, hanya membuat kekacauan dan ingin menjadi geng terseram di antara geng motor lainnya hingga sering tawuran diatas motor.
8. Tidak terdaftar di kepolisian atau masyarakat setempat.
9. Cenderung menyukai bercengkrama di tempat-tempat yang jauh dari kata terang; lebih suka memilih tempat sepi, gelap dan bau busuk.
10. Apabila melaksanakan pelantikan anak baru biasanya bermain fisik, disuruh berkelahi dan minum-minuman keras sampai muntah-muntah.

Sebagai tambahan, Tofail (2013) dalam penelitiannya memberikan daftar kejahatan lain seperti:

1. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen dan tindakan asusila,
2. Kriminalitas anak, antara lain merupakan perilaku mengancam, memberikan intimidasi, memeras, mencuri, merampas, menyerang, merampok, melakukan pembunuhan dengan cara menyembelih korbannya, mencekik,

meracun, dan sebagainya,

3. Agresivitas seksual seperti pemerkosaan, dan pembunuhan dengan motif seksual yang didorong oleh perasaan inferior dan menuntut pengakuan diri atau emosi balas dendam,
4. Kecanduan narkoba,
5. Tindakan immoral seksual secara terang-terangan.

Pada dasarnya, masalah-masalah yang ditimbulkan, seperti perilaku agresif yang dilakukan oleh geng motor dikarenakan hal tersebut merupakan suatu upaya atas pencarian identitas dan pembuktian diri. Hal lain yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan, minuman keras, kelompok teman sebaya. Sementara faktor internal seperti watak atau sifat diri yang keras mempengaruhi seseorang melakukan perilaku agresifitas (Armayati, 2011).

Masalah yang ditimbulkan oleh geng motor seperti perampokan dan tawuran dapat menyebabkan jatuhnya korban tewas (Yusuf, 2017). Di Cisarua, enam pelaku geng motor yang selesai mabuk-mabukan mengetuk rumah warga saat tengah malam dan melakukan penyerangan (Soleiludin, 2017). Geng motor lainnya juga melakukan aksi kejahatan di jalan yang terdiri dari remaja-remaja putus sekolah dan masih di bawah umur. Anggota geng motor yang dinamakan Persatuan Junior Rantau Family di Batam melakukan perekrutan anggota dengan cara paksa (Batam Pos, 6 Juli 2017)

Subkultur kekerasan muncul disebabkan oleh adanya sekelompok orang yang memiliki sistem nilai yang berbeda dengan subkultur dominan. Masing subkultu memiliki aturan dan nilai yang berbeda-beda

yang kemudian mengatur anggota. Salah satu sistem nilai yang terus diturunkan ke penerus dalam suatu kelompok geng motor adalah pengujian terhadap keberanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk menjadi anggota geng motor harus memiliki keberanian yang cukup agar diterima dalam keanggotaan geng motor (Armayati, 2011).

Menurut Berkowitz (1995) salah satu penyebab munculnya perilaku agresif adalah pengaruh dari kelompok atau geng. Dalam kelompok atau geng seseorang merasa mendapatkan penerimaan atau status, merasa penting dalam geng, sementara ditempat lain tidak berharga. Dalam hal ini setiap tindakan yang dilakukan anggotanya bias any amendapat dukungan penuh dari anggota kelompoknya sehingga tindakan mereka dianggap benar (Berkowitz, 1995).

D. Upaya Penanganan

Dalam filsafat Durkheim, moral memiliki peranan terpenting. Kekangan atau wewenang yang dilakukan oleh kesadaran kolektif jelas terlihat dalam bidang moral. Sesungguhnya fakta-fakta moral itu ada, tetapi ia hanya hidup dalam konteks sosial. Moralitas dalam segala bentuknya tidak dapat hidup kecuali dalam masyarakat. Ia takkan berubah kecuali dalam hubungannya dengan kondisi-kondisi sosial. Dengan kata lain moralitas tidak bersumber pada individu, melainkan bersumber pada masyarakat dan merupakan gejala masyarakat (Muhni, 1994).

Durkheim (1989), bahwa moralitas dimulai pada kehidupan dalam kelompok, karena hanya disitu ketidakpedulian dan pengabdian mempunyai makna, yang dimaksudkan kehidupan kelompok secara umum yaitu keluarga, perusahaan, kota, bangsa dan organisasi internasional.

Kehidupan moral bermula dari keanggotaan dalam suatu kelompok, betapapun kecilnya kelompok itu, sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok adalah diri kita sendiri atau bagian terbaik dari diri kita, sebab manusia hanya menjadi manusia sesuai dengan tingkat peradabannya.

Berdasarkan prinsip moralitas tersebut, peneliti telah merumuskan upaya penanganan terhadap individu yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi yaitu pra bergabung dengan geng motor, pasca bergabung dengan geng motor dan setelah diproses secara hukum, sebagai berikut:

Upaya Penanganan Berdasarkan Kondisi

- Pra

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting karena pendidikan dalam kehidupan akan menentukan arah dan tujuan hidup seseorang. Jadi jelaslah sudah, bahwa tujuan pendidikan di sekolah bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan untuk mendidik siswa menuju kedewasaan diri dan perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik dan sempurna. Banyak hal yang dilakukan oleh para pendidik untuk mencapai tujuan akhir pendidikan. Di mana dengan tujuan akhir pendidikan tersebut akan membentuk anak didik yang berkarakter cerdas, bukan hanya pintar tapi juga bermoral. Bentuk dari penanganan sebelum terjadinya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan geng motor adalah diberikannya pendidikan seperti bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian layanan bantuan kepada peserta didik dengan sungguh-sungguh dalam upaya mengembangkan potensi yang dimilikinya serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan (Sari, 2014).

Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas ini dapat diterapkan sebagai berikut (Sari, 2014):

1. Asas kerahasiaan merupakan asas kunci dalam upaya bimbingan dan konseling. Dalam hal ini Asas kekinian. Masalah klien yang berlangsung ditanggulangi melalui upaya bimbingan dan konseling ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan kini. Bukan masalah yang dihadapi oleh seorang siswa tidak akan diberitahukan kepada orang lain yang tidak berkepentingan.
2. Asas kesukarelaan melalui bimbingan dan konseling yang efisien yang berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik yang dibimbing maupun pembimbing/ konselor bersifat terbuka. keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti “bersedia saran-saran dari luar” tetapi dan hal ini lebih penting masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Masalah yang sudah lampau, dan juga masalah yang mungkin akan dialami di masa mendatang.
3. Asas kemandirian merupakan tujuan dari usaha layanan bimbingan dan konseling. Dalam memberikan layanan petugas hendaknya selalu berusaha menghidupkan kemandirian pada diri yang terbimbing, jangan hendaknya orang yang itu menjadi tergantung pada orang lain, khususnya para pembimbing.
4. Asas kegiatan merupakan usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti, bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam pencapaian dalam mencapai tujuan -tujuan bimbingan.
5. Asas kedinamisan merupakan upaya layanan layanan bimbingan dan konseling karena menghendaki terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing yaitu perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik.
6. Asas keterpaduan yaitu individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu akan justru menimbulkan masalah.
7. Asas kenormatifan yaitu layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
8. Asas keahlian akan menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling akan menaikkan kepercayaan masyarakat pada bimbingan dan konseling.
9. Asas alih tangan kasus yaitu asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas itu mengalih tangankan klien tersebut, kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli.
10. Asas *tut wuri handayani*, asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan terbimbing.

Selain itu, sejak kecil, anak-anak perlu diajarkan untuk menghindari kekerasan. Anak-anak dapat meniru kekerasan dari apa yang dilihatnya.. Hal ini sejalan dengan penelitian Pakes dan Winstone yang menemukan bahwa kekerasan di layar kaca (baik televisi maupun bioskop) dapat mempengaruhi mereka yang memilih untuk

menontonnya. Asumsi tersebut mendasari peraturan konten film dan televisi kekerasan seksual dan komersial. Agresi bisa menjadi pengaruh yang terukur pada perilaku agresif. Itu memiliki konsekuensi potensial untuk dampak video televisi dan video kekerasan, dan juga menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga. Ini menunjukkan dengan agak meyakinkan bahwa pembelajaran sosial adalah faktor signifikansi (Pakes dan Winstone, 2007).

Upaya penanganan yang lainnya adalah:

1. Membuka jalur komunikasi dengan anak agar anak tidak mengalami frustrasi. Hubungan antara frustrasi dan agresi tampaknya cukup mudah. Bila seseorang memiliki tujuan tertentu dan menemukan bahwa tujuan itu tidak dapat dicapai, frustrasi akan terjadi kemudian. Frustrasi itu menjadi isyarat untuk perilaku agresif.
2. Penyuluhan sosial dan atau penyelenggaraan kegiatan/lomba yang lebih menarik minat remaja terutama pada waktu libur sekolah seperti lomba balap motor di sirkuit resmi, atau lomba yang berhubungan dengan aktivitas dalam bermotor lainnya. Hal ini terkait dengan pengisian waktu dengan kegiatan positif. (Irmayani, 2017)
3. Penyuluhan sosial melalui dialog sosial tentang “parenting skill menghadapi remaja bermasalah” oleh LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) di daerah-daerah yang banyak terdapat remaja yang sering tawuran bermotor. (Irmayani, 2017)

- **Sudah dalam geng**

Upaya pembinaan geng motor dapat dilakukan melalui pembinaan secara kelompok (geng) dan secara individu (*person*). Keberadaan sebuah kelompok

atau geng yang melakukan aktivitas kelompoknya dengan hal-hal yang menyimpang (brutalisme) merupakan akibat dari lemahnya daya kontrol keluarga (rumah), lingkungan (sekolah dan tempat-tempat aktivitas lainnya) terhadap aktivitas pergaulan anak-anak sehari-hari. Kekuatan (*power*) perilaku menyimpang kelompok berangkat dari akumulasi perilaku-prilaku menyimpang pribadi yang sudah ada pada diri masing masing secara individu.

Bentuk penyimpangan perilaku secara individu lahir dari berbagai hal yang mempengaruhi labilnya psikologi person sehingga kebanyakan anak yang mengalami hal tersebut, ditambah pula dipengaruhi oleh usia pada masa kanak-kanak yang bersifat labil maka hal ini yang mendorong person untuk mencari tempat yang mampu memberikan apa yang diinginkannya. Biasanya hal-hal yang mempengaruhi labilnya psikologis mereka secara person pada sebuah keluarga dikarenakan: kurangnya kasih sayang orang tua; kurangnya perhatian orang tua; keberadaan ekonomi yang masih kurang (cenderung berekonomi lemah); kebebasan berlebihan yang diberikan orang tua, dan seterusnya.

Aparat penegak hukum yaitu Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sesuai dengan undang-undang memiliki tanggung jawab besar terhadap pencegahan dan penanganan tindakan brutal geng motor, dari tiga aparat hukum mungkin pihak kepolisian memiliki peran strategis hal ini karena sesuai dengan fungsinya aparat kepolisian yaitu fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Fungsi pencegahan dilakukan sebelum terjadinya tindakan brutal geng motor hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pendataan terhadap

anggota geng motor yang ada di kota Cirebon kemudian melakukan pembinaan terkait materi-materi hukum khususnya tindakan pelanggaran hukum pidana yang berakibat fatal bagi masa depannya (Rahmat, 2013).

Dari institusi keamanan seperti kepolisian dapat mengontrol setiap perkumpulan geng motor untuk melakukan pendekatan dan kemudian kelompok-kelompok ini dapat dijadikan kelompok binaan dari kepolisian sehingga segala aktivitas mereka dapat terkontrol oleh kepolisian. Kelompok-kelompok motor yang telah dibina ini dapat dinamakan dengan *Club Motor*. Di masa yang akan datang, keberadaan *club motor* tidak memberikan kontribusi keributan atau keberutalan karena setiap satu bulan sekali mendapat pembinaan dari kepolisian (Rahmat, 2013).

Selain itu, bagi para anggota geng motor yang sering merugikan masyarakat umum hendaknya diberikan bimbingan dari berbagai pihak seperti sekolah dan kepolisian bahwa perbuatan mereka tersebut melanggar hukum dan beresiko dikenai hukuman penjara. Bersama institusi penegak hukum melakukan pembinaan mental kepada anggota geng motor berandalan, melalui semacam pelatihan “kesamaptaan” dan mental sebelum dirujuk ke instansi sosial setempat untuk mendapatkan bimbingan sosial dan ketrampilan dan usaha ekonomis produktif (Irmayani, 2017).

- **Sudah ditindak Hukum**

Dalam konteks hukum, sama sekali tidak dikenal kategori geng motor, yang ada hanyalah pencurian dengan kekerasan (*curas*) yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ayat 1 hingga ayat 4. Ayat 1 mengatur

pencurian yang didahului kekerasan ancaman hukuman 9 tahun. Ayat 2 pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari, baik di rumah, pekarangan, jalan umum hingga kereta api diancam pidana 12 tahun. Ayat 3 hukuman 15 tahun jika menimbulkan kematian. Ayat 4 hukuman bisa sampai hukuman mati ataupun penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, bilamana perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan korbannya luka ataupun meninggal dunia (Munir, 2016).

Selain memberikan sanksi pidana, para anggota geng motor yang terbukti terlibat dalam perilaku kriminal masih dapat diberikan bimbingan. Hal inipun belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut dapat berubah sikapnya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali si pelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan, apakah dengan kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda (Widiasari, 2015). Selain itu, dalam tahap ini hendaknya para pemangku kepentingan tidak semena-mena melakukan balas dendam terhadap anggota geng motor yang melakukan kriminalitas.

Emosi yang tidak stabil dari anak di bawah umur khususnya pada remaja sering menjadi faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan remaja dimana dari masalah yang kecil berubah menjadi masalah yang besar. Remaja yang melakukan kejahatan penganiayaan baik itu berat maupun ringan tanpa peduli akibat hukum yang ditimbulkan dari pebuatannya, walaupun korban mengalami penderitaan, rasa sakit, luka bahkan mati itu bukan masalah bagi pelaku, yang penting perasaan harga diri sudah terbalaskan. Faktor emosional yang menonjol ini dominan

dilakukan oleh anak yang berusia 16-18 tahun, pada usia ini secara psikologi, tingkat emosional anak cenderung tinggi, sehingga seorang anak mudah terpancing untuk melakukan tindak pidana penganiayaan.

Oleh karena itu, bagi para tersangka yang merupakan anggota geng motor hendaknya diproses secara hukum sekaligus diberikan bimbingan tingkat lanjut guna menstabilkan emosi individu-individu tersebut. Remaja yang salah memilih teman bergaul patutnya disadarkan bahwa perbuatan mereka telah merampas hak orang lain dan hal yang sama atau bahkan lebih buruk dapat menimpa mereka, di mana keselamatan nyawa mereka dapat terancam. Mereka juga perlu diedukasi bahwa korbannya bisa mengalami kematian dan menderita luka psikologis seumur hidupnya.

Anak yang berhadapan dengan hukum sepatutnya mendapatkan penanganan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa, mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, pemeriksaan di pengadilan sampai dengan diputuskannya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Mengetahui bagaimana penanganan aparat penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penulis menggunakan pendekatan secara Psikologi dan hukum (*psychology and law*), yaitu riset-riset yang mengacu pada riset psikologi tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi,advokat, jaksa, dan hakim.

Di dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, penanganan anak dilakukan sesuai KHUP dan untukanak maksimal 1 hari. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penahanan terhadap anak paling lama 20 (dua puluh)

hari dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari. Penyidik, Jaksa, dan Hakimnya juga memberikan perlakuan khusus. Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Didalamnya mengatur bagaimana seorang penyidik, jaksa serta hakim dalam memperlakukan seorang anak jika berhadapan dengan hukum dengan pertimbangan psikologi dan mental anak (Imran, 2014).

Oleh karena itu seorang anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pengadilan akan diberikan penanganan khusus berdasarkan pertimbangan bahwa pada usia di bawah 18 tahun seorang anak secara psikologi dianggap masih tabu dalam berhadapan di pengadilan agar tidak mempengaruhi perkembangan psikis anak tersebut (Tangahu, 2015). Pelibatan pekerja sosial dalam penanganan anggota geng motor melalui assessmen dan rehabilitasi sosial bagi yang menjalani sanksi hukuman (Irmayani, 2017).

PENUTUP

Langkah yang paling bijak dalam melakukan penanganan kejahatan yang dilakukan remaja dapat dimulai dari pencegahan hingga sampai di tahap yang paling akhir. Apalagi, mayoritas anggota geng motor adalah pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang seharusnya dapat menjadi pembela dan pelindung masyarakat, bukan sebaliknya. Langkah pencegahan dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah dengan membuka jalur komunikasi yang efektif dengan remaja, memberikan bimbingan dan konseling, pengisian waktu luang dan libur dengan kegiatan yang diminati remaja. Pemerintah dapat memberikan penyuluhan sosial ke sekolah-sekolah dengan media yang

“kekinian” dan rehabilitasi sosial bagi remaja yang sedang menjalani hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M. (2017). *Geng Motor Berulah di Pejaten Rusak Sejumlah Warung*. Retrieved Juli 10, 2017, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-3548919/geng-motor-berulah-di-pejaten-rusak-sejumlah-warung>
- Armayati, L. (2011). “Geng Motor dalam Tinjauan Psikologi Sosial”. *An-Nafs* Volume 5 No.1, 57-71.
- Batam Pos. (2017). *Waspada! Geng Kriminal di Batuaji Ini Rekrut Paksa Anggotanya*. Retrieved Juli 10, 2017, from Batam Pos: <http://batampos.co.id/2017/07/06/waspada-geng-kriminal-di-batuaji-ini-rekrut-paksa-anggotanya/>
- Berkowitz, L. (1995). *Agresi: Sebab dan Akibatnya*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Detiknews (2017) *Aksi Geng Motor Marak di Jagakarsa Dipicu Tantangan di Medsos*. Retieved Juli 10, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3509748/aksi-geng-motor-marak-di-jagakarsa-dipicu-tantangan-di-medsos>
- Dono. (2017). *Rusak dan Kuras Isi Rumah, Enam Geng Motor Diringkus*. Retrieved Juli 10, 2017, from Pos Kota News: <http://poskotanews.com/2017/06/11/rusak-dan-kuras-isi-rumah-enam-geng-motor-diringkus/>
- Durkheim, E. (1989). *Sosiologi dan Filsafat*. Jakarta: Erlangga.
- Fadila, R. (2013). “Hubungan Identitas Sosial dengan Perilaku Agresif pada Geng Motor”. *Psikologia* Volume 8 No.2, 73-78.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. AdanC Black.
- Hadisuprpto, P. (2004). “Studi tentang Makna Penyimpangan Perilaku di Kalangan Remaja”. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume 3, No.III, 9-18.
- Hogg, M. A., dan Vaughan, G. M. (2002). *Social Psychology*. London: Prentice Hall.
- Hurlock, B. (1990). *Developmental Psychology: a Lifespan Approach*. Boston: McGraw-Hill.
- Imran, M. A. (2014). *Muhammad Ali Imran*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).
- Irmayani, dkk. (2017). *Fenomena Geng Motor di Beberapa Kota Jawa Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesjahteraan Sosial.
- Koentjoro. (2013). *Kriminologi dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Malau, B. S. (2017, Juni 26). *Biar Kapok Warga Lawan Geng Motor dan Lemparkan Motornya ke Sungai*. Retrieved Juli 10, 2017, from Warta Kota: <http://wartakota.tribunnews.com/2017/06/26/biar-kapok-warga-lawan-geng-motor-dan-lemparkan-motornya-ke-sungai>
- Miladdina, A. (2010). *Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Agresi pada Anggota Komunitas Motor di Bandung* (Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Muhni, I. (1994). *Moral dan Religi Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*.

Yogyakarta: Kanisius.

- Munir, A. (2016). "Mengulas Ulang Representasi Media Massa tentang Kejahatan Begal Motor". *Jurnal Sosiologi Volume 18 No.2*, 123-128.
- Nurdiniyati, Y. S. (2015). *Penyesuaian Sosial Mantan Anggota Geng Motor: Studi Kasus pada Dua Orang Mantan Anggota BRIGEZ di Kota Bandung* (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia).
- Pakes, F., dan Winstone, J. (2007). *Psychology and Crime: Understanding and Tackling Offending Behaviour*. Canada: Willan Publishing.
- Rahmat, D. (2013). "Problematika Geng Motor di Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Unifikasi Volume 1 No.1*, 45-78.
- Sambas, N. (2011). "Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung". *Jurnal Mimbar Volume XXVII, No. 2*, 225-232.
- Sari, Y. (2014). *Persepsi Siswa tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru*. Pekanbaru: UIN Riau.
- Susantyo, B. (2016). "Faktor-Faktor Determinan Penyebab Perilaku Agresif Remaja Di Permukiman Kumuh Di Kota Bandung". *Sosikonsepsia Vol 06 No 01* September - Desember 2016.
- Soleiludin, I. (2017). *Tok..Tok..Tok..Setelah Pintu Dibuka, yang Muncul 6 Anggota Geng Motor*. Retrieved Juli 10, 2017, from Jawa Pos: <http://www.jawapos.com/read/2017/06/12/136902/toktoksetelah-pintu-dibuka-yang-muncul-6-anggota-geng-motor>
- Subagja, I. (2017). *3 Anggota Geng Motor Diselamatkan Tim Jaguar dari Amuk Massa di Depok*. Retrieved Juli 10, 2017, from Kumparan: <https://kumparan.com/indra-subagja/3-anggota-geng-motor-diselamatkan-tim-jaguar-dari-amuk-massa-di-depok>
- Suratmi, E. (2012). *Geng Motor*. <https://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/geng-motor/> Retrieved 23 April 2018.
- Tangahu, H. E. (2015). "Peranan Psikiater Kriminal terhadap Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan". *Lex Crimen Volume IV No.8*, 128-135.
- Tanjung, C. A. (2017). *Begini Sosok Anggota TNI AD yang Tewas Ditikam Geng Motor di Riau*. Retrieved Juli 10, 2017, from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-3553131/begini-sosok-anggota-tni-ad-yang-tewas-ditikam-geng-motor-di-riau>
- Tella, S. (2017). *Anarkis, Sekelompok Geng Motor Mengamuk di Tengah Kerumunan Warga*. Retrieved Juli 10, 2017, from Kabar News: <https://kabar.news/anarkis-sekelompok-geng-motor-mengamuk-di-tengah-kerumunan-warga>
- Tofail, I. (2013). *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kabupaten Gowa* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Tribun News. (2017, Juni 24). *Tujuh Geng Motor yang Resahkan Warga ini Akhirnya Kena Batunya*. Retrieved Juli 10,

2017, from Tribun News: <http://www.tribunnews.com/regional/2017/06/24/tujuh-geng-motor-yang-resahkan-warga-ini-akhirnya-kena-batunya>

Widiasari, A. (2015). *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).

Yusuf, M. (2017). *Apes... Berangkat Kerja Malah Ketemu Geng Motor di Bekasi Timur; Bonyok Deh....* Retrieved Juli 10, 2017, from GO Bekasi: <http://gobekasi.pojoksatu.id/2017/06/12/apes-berangkat-kerja-malah-ketemu-geng-motor-di-bekasi-timur-bonyok-deh/>

Zuckerman, M. (1979). *Sensation Seeking: Beyond The Optimal Level of Arousal*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

PERAN IBU RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

THE ROLE OF HOUSEWIVES TO IMPROVE THEIR FAMILY'S WELFARE MARIETTA

Marlina Telaumbanua

Program Pascasarjana Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Yogyakarta,
Yogyakarta 55281, Indonesia
E-mail: mariettatel17@gmail.com

Mutiara Nugraheni

Yogyakarta 55281, Indonesia
E-mail: mutiara_nugraheni@uny.ac.id

Abstrak

Keluarga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Peran yang lebih dominan adalah peran seorang ibu untuk mengurus rumah tangga dan membantu suami dalam menambah pendapatan keluarganya. Potensi yang paling menarik untuk dikaji adalah potensi ibu rumah tangga ketika tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga melainkan bekerja untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran ibu rumah tangga dan faktor pengaruh ibu rumah tangga bekerja. Tulisan ini disajikan berdasarkan kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai peran ibu rumah tangga dalam keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasil kajian didapatkan bahwa ibu rumah tangga dapat berperan ganda untuk mengurus keluarga dan ikut serta dalam mencari nafkah. Secara umum alasan ibu rumah tangga bekerja adalah karena ingin membantu suami meningkatkan pendapatan keluarga. Sebagai tenaga kerja wanita dalam keluarga, umumnya mereka memilih bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan arti bagi pembangunan dalam menjamin kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Artikel ini diharapkan menjadi bahan solusi pengembangan potensi ibu rumah tangga untuk menanggulangi kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kata kunci: keluarga, ibu rumah tangga, potensi, faktor pengaruh, kesejahteraan keluarga.

Abstract

Family has an important role to enhance social welfare. A more dominant role is the role of a mother to take care of households and help her husband increase his income in the family. The most interesting potential to be studied is the housewives' potential when they do not only act as housewives, but also work to help improve their family's welfare. This article was written with the aim to describe the roles of housewives and the influence factors of working housewives. This paper was presented by studying literature and the study of critical thinking about housewives' role in their family to improve the family's welfare. The study results show that housewives can play double roles, namely: to take care of their family and to participate in making a living. Generally, the reason of housewives to work is to help their husband improve the family's income. As female workers in the family, they prefer working in the informal sectors. This is done to share their time to work and to take care of their family. Women's participation does not only demand equal rights, but also states the meaning of development to ensure their family's welfare and the welfare of Indonesian community. This article is expected to be a material solution for housewives' potential development to alleviate poverty and to improve their family's welfare.

Keywords: family, housewives, potential, influence factors, family welfare.

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi, kesadaran dan kesempatan berusaha semakin meningkat. Pada saat ini kegiatan ekonomi terus meningkat di semua negara di seluruh dunia, baik negara-negara maju, negara berkembang, maupun negara-negara miskin (Mandroshchenko et al., 2018). Kebijakan instrumen ekonomi merupakan sarana prioritas dan metode pengaturan kegiatan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan nasional (Pozdnyakov, 2018).

Kekuatan pembangunan ekonomi akan optimal apabila penduduk dapat berpartisipasi penuh dalam membangun suatu daerah melalui kemampuan setiap masyarakat termasuk kaum perempuan yang dapat berperan serta dalam menentukan arah pembangunan dalam masyarakat, karena setiap orang termasuk perempuan mampu mengembangkan potensi dirinya. Pekerja wanita yang telah berkeluarga juga merupakan aset atau sumber daya manusia yang produktif dalam pembangunan baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Harkat dan martabat ibu rumah tangga mengalami peningkatan yang terus menerus, dimana adanya perubahan ibu rumah tangga yang turut membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hakekat pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan kualitas hidup dari suatu keluarga, dimana keluarga yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik juga (Rosni, 2017).

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri atas ayah, istri atau ibu, anak, dan terkadang ada anggota keluarga lain yang ikut gabung. Anggota keluarga adalah bagian terpenting dalam rumah tangga karena merupakan sumber daya manusia

yang harus dikerahkan untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Keadaan suatu rumah tangga yang serba kekurangan akan menggerakkan anggota rumah tangga bekerja untuk menambah penghasilan.

Keluarga berfungsi sebagai yang bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan, dan mengembangkan anggota keluarga dari berbagai kebutuhan seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan fisik, sosial, dan perkembangan akan pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun nonformal yang turut mengembangkan intelektual, sosial, mental, emosional, dan spritual. Selain aspek fisik, modal sosial memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kebijakan pembangunan (Putra et al., 2017).

Permasalahan utama ada pada kemiskinan dan rumah tidak layak huni bagi keluarga-keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, dan posisi di masyarakat (Muflikhati et al., 2010).

Suatu keluarga dikatakan sejahtera jika keadaan keluarganya makmur, sehat, dan damai, dimana indikatornya adalah aspek fisik, pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi (Widyastuti, 2012). Keluarga berfungsi sebagai yang bertanggung jawab dalam menjaga, menumbuhkan, dan mengembangkan anggota keluarga dari berbagai kebutuhan seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan (Na'imah, 2011).

Secara umum fungsi keluarga menurut Undang-undang NO. 10 Tahun 1992 jo PP No.

21 Tahun 1994 adalah:

1. Fungsi Keagamaan

- a. Mengajarkan ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga dalam menjalankan norma kehidupan.
- b. Mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari kepada seluruh anggota keluarga.
- c. Dalam menjalankan ajaran agama mampu melakukan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Kegiatan keagamaan yang kurang diperolehnya di sekolah atau di masyarakat dapat ditambah proses kegiatan belajar di rumah. Pondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera adalah dengan cara membina rasa, sikap dan praktek kehidupan keluarga beragama.

2. Fungsi Budaya

- a. Mempertahankan dan meneruskan norma-norma, budaya masyarakat dan bangsa dengan membina tugas-tugas keluarga.
- b. Menyaring norma dan budaya asing yang tidak sesuai dengan melakukan pembinaan tugas-tugas keluarga.
- c. Mencari pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negatif dari kemajuan era globalisasi dengan melakukan pembinaan tugas-tugas keluarga.
- d. Dalam menghadapi tantangan globalisasi setiap anggota keluarga berperilaku baik sesuai dengan norma bangsa Indonesia.
- e. Terwujudnya norma keluarga kecil bahagia sejahtera dengan menjunjung budaya masyarakat atau bangsa menjadi keluarga yang sesuai, selaras, dan seimbang.

3. Fungsi Cinta Kasih

- a. Menumbuhkembangkan potensi kasih

sayang antar anggota keluarga dengan nyata secara optimal dan terus menerus.

- b. Sesama anggota keluarga membina sikap dan tingkah laku saling menyayangi.
- c. Membina sikap dan praktik hidup keluarga dengan penuh kasih sayang

4. Fungsi Perlindungan

- a. Memenuhi rasa aman anggota keluarga baik yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga.
- b. Membina keamanan keluarga baik fisik maupun psikis dari berbagai bentuk tantangan dari luar.
- c. Modal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera dengan membina stabilitas dan keamanan keluarga.

5. Fungsi Reproduksi

- a. Membina setiap anggota keluarga maupun keluarga di sekitarnya sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat.
- b. Pembentukan keluarga memberikan contoh pengalaman kaidah-kaidah dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental.
- c. Mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat tentang waktu melahirkan, jumlah ideal anak yang diinginkan dalam keluarga, dan jarak antara dua anak.
- d. Menuju keluarga kecil bahagia sejahtera dengan cara mengembangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang kondusif.

6. Fungsi Sosialisasi

- a. Menciptakan lingkungan keluarga sebagai sosialisasi bagi anak yang pertama dan utama dan tempat awal pendidikan anak.
- b. Menciptakan kehidupan keluarga sebagai tempat untuk mencari solusi atau pemecahan masalah atas apa yang dihadapinya baik berasal dari luar maupun dari dalam.

- c. Lingkungan keluarga dapat membina kedewasaan anak baik fisik maupun mental untuk dapat bersosialisasi.
7. Fungsi Pelestarian Lingkungan
- a. Menciptakan sikap, pentingnya pelestarian lingkungan keluarga sebagai tempat yang nyaman.
 - b. Menciptakan lingkungan keluarga sebagai tempat pemecahan masalah.
 - c. Lingkungan keluarga dapat membina kedewasaan anak untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Silalahi dan Meinarno (2010), Ada delapan fungsi keluarga, yaitu:

1. Fungsi Keagamaan
2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Cinta Kasih
4. Fungsi Perlindungan
5. Fungsi Reproduksi
6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan
7. Fungsi Ekonomi
8. Fungsi Pemeliharaan Lingkungan

Rochaniningsih (2014) menyatakan secara umum telah terjadi pergeseran peran dan fungsi keluarga dalam sebagian masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Fungsi sosial untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak.
2. Fungsi perlindungan untuk melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai hal yang mengancam kelangsungan hidup keluarga.
3. Fungsi afeksi untuk memberikan rasa kasih sayang kepada tiap-tiap anggota keluarga.
4. Fungsi rekreasi sebagai tempat bertemu, bercengkrama, berbagi pekerjaan dan berbagi masalah untuk meringankan beban fisik dan psikologis.

Ketiga pendapat dari fungsi keluarga di

atas memperlihatkan perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan utama terlihat pada fungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan rekreasi. Fungsi-fungsi ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang semakin maju akhir-akhir ini.

Terpenuhinya kebutuhan anak dalam keluarga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga (Sebataraja et al., 2014). Kebutuhan anak yang tidak kalah penting adalah kebutuhan untuk meningkatkan kesehatannya. Kesehatan tidak selalu identik dengan berat badan yang lebih besar, dalam kasus tertentu terdapat bahwa anak-anak dari keluarga dengan pendapatan rendah memiliki kelebihan berat badan dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga dengan pendapatan yang tinggi (Alaimo et al., 2001).

Pendapatan keluarga yang rendah dapat menyebabkan kesejahteraan keluarga menjadi berkurang, hal ini berhubungan erat dengan sistem pengasuhan anak, karena tingkat kesejahteraan yang rendah dapat menghambat penyediaan lingkungan pengasuhan anak yang lebih berkualitas (Elmanora et al., 2017). Anak-anak yang hidup di lingkungan keluarga sejahtera dan bahagia memiliki keseimbangan pertumbuhan otak kiri dan kanan, logika dan perasaan, seni dan angka-angka, sosial dan pengembangan pribadi, dan antusias bekerja menjadi kaya dan murah hati (Wijanarko, 2018).

Perubahan produktivitas tenaga kerja wanita sebagai ibu rumah tangga memiliki potensi yang strategis dalam membantu suami untuk menambah pendapatan keluarga, sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Potensi tersebut menjadi bermanfaat apabila sumber daya manusianya berkualitas yang dapat dilihat dari tingginya tingkat pendidikan dan keterampilan, daya nalar, dan tingkat kesehatan

jasmani dan rohani penduduk itu sendiri (Basrowi dan Juariyah, 2010).

Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita bekerja masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih berpendapat bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga dengan suami bekerja di luar rumah dan isteri bekerja di dalam rumah. Suami berperan sebagai pencari nafkah sekaligus sebagai pemimpin yang penuh kasih, sedangkan istri menjalankan tugas sebagai pengasuh anak.

Menurut Mencarini dan Vignoli (2018), pekerja wanita tidak memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas serikat pekerja, kecuali jika ada batasan untuk tidak membayar pekerjaan mereka. Walaupun seorang laki-laki atau suami pada prinsipnya menginginkan isteri berada di rumah untuk mengurus anak-anak. Karena satu hal yang diragukan adalah kecenderungan istri mengambil alih tanggung jawab dan keputusan rumah tangga, jika pendapatan istri lebih tinggi dari pada suami (Treas dan Tai, 2012). Berdasarkan penelitian Izumi *et al.* (2018) ditemukan bahwa selain tingkat stress yang dialami oleh ibu rumah tangga, peran kedua orang tua dan keharmonisan pernikahan berpengaruh signifikan terhadap perilaku anak-anak.

Tenaga kerja dapat bekerja karena tertarik dan senang dengan pekerjaannya, kepuasan dan kebahagiaan dalam dirinya. Menurut Suryono (2014), untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, perlu identifikasi tiga elemen pokok di antaranya masalah-masalah sosial yang diatur, kebutuhan yang terpenuhi, dan kesempatan dan peluang yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Sumiarti (2008), istri berperan sebagai mitra bagi suami untuk membantu

suami menambah penghasilan tanpa harus mengabaikan tugas sebagai seorang istri yang ikut berkiprah membantu keluarga keluar dari masalah keluarga. Selain ikut berperan menambah pendapatan keluarga, hal positif lain yang diperoleh jika ibu rumah tangga bekerja adalah tingkat *stress* yang dialami menjadi menurun dan meningkatnya keharmonisan pernikahan (Izumi, M. dan Gullon-Rivera, 2018).

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya peran ibu rumah tangga dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pembangunan pada umumnya. Potensi yang paling menarik untuk dikaji adalah potensi ibu rumah tangga ketika tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga di rumah melainkan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran ibu rumah tangga dan faktor pengaruh ibu rumah tangga bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Artikel ini diharapkan menjadi bahan solusi pengembangan potensi ibu rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

PEMBAHASAN

Karakteristik Ibu Rumah Tangga

Menurut Wijanarko (2018), istilah karakter mewakili kecerdasan spiritual atau religius, yang mengandung 3 unsur pokok yaitu nilai-nilai hidup, kepribadian, dan integritas. Karakter merupakan gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Berdasarkan definisi di atas, karakter dapat diartikan sebagai gambaran watak, hati, tingkah laku baik didasarkan atas pengetahuan akan kebaikan, mencintai kebaikan yang diwujudkan secara eksplisit maupun implisit.

Berdasarkan Pedoman Pendidikan Karakter Kemendiknas, nilai-nilai karakteristik yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa terdiri dari 14 nilai karakter (Fathurrohman et al., 2013), di antaranya:

1. Religius yaitu sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perkataan.
3. Toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokrasi yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai kesamaan hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas sesuatu hal yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan

kelompoknya.

11. Cinta tanah air yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, politik, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/komunikatif yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

Kedudukan Tenaga Kerja Ibu Rumah Tangga

Kedudukan tenaga kerja wanita merupakan hal penting yang menjadi pembahasan masyarakat karena banyak hal yang mendasari persepsi mengenai hal tersebut, antara lain:

1. Sisi individu, Satu konsep penting yang diperkenalkan Maslow (2010) adalah adanya teori kebutuhan dalam diri manusia yang terbagi menjadi dua yaitu kebutuhan dasar dan kebutuhan tumbuh. Kebutuhan dasar (fisiologis, rasa aman, cinta, dan penghargaan) adalah kebutuhan yang penting untuk kebutuhan fisik dan psikologis, kebutuhan ini harus dipenuhi. Sekali kebutuhan ini dipenuhi, motivasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan ini surut. Kebutuhan tumbuh, misalnya kebutuhan untuk mengetahui dan memahami sesuatu, menghargai keindahan, atau menumbuhkan dan mengembangkan apresiasi atau penghargaan dari orang lain, tidak pernah dapat dipenuhi seluruhnya. Dalam kenyataannya, semakin terpenuhinya

kebutuhan manusia dalam mengetahui dan memahami dunia di sekeliling mereka, motivasi mereka dapat menjadi semakin besar dan kuat (Maslow, 2010).

2. Sisi hukum, terdiri dari 3 yaitu:

a. Bias gender/diskriminatif apabila peraturan Perundang-undangan hanya ditujukan kepada salah satu pihak saja, laki-laki atau perempuan, yang berakibat pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan sesuai yang dikehendaki, perundang-undangan membatasi gerak perempuan/laki-laki untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perundang-undangan tersebut memperkokoh hubungan sosial dan mengabaikan kemampuan perempuan, perundang-undangan tersebut mencabut hak dan kebebasan perempuan untuk melakukan berbagai kegiatan di berbagai bidang kehidupan peraturan perundang-undangan yang mendeskriminasikan perempuan/laki-laki, sehingga keduanya termarginalisasi dan menjadi orang nomor dua, Perundang-undangan tersebut membatasi perempuan dan laki-laki untuk dapat dipilih dan memilih serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Netral gender apabila peraturan Perundang-undangan yang dibuat untuk laki-laki dan perempuan, namun dampak pelaksanaannya mengakibatkan kerugian pihak perempuan dan laki-laki, peraturan Perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat perbedaan kebutuhan, pengalaman, permasalahan laki-laki dan perempuan, dan perundang-undangan yang dibuat menganggap bahwa selama ini perempuan sudah mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

c. Responsif gender, apabila Perundang-undangan dibuat dengan memberikan hak-hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi sebagai obyek dan subyek di berbagai bidang pembangunan, perempuan sangat tertinggal dalam salah satu bidang pembangunan dapat dibuat "*affirmativ – action*" (tindakan khusus sementara) untuk mengejar ketertinggalannya, dan Perempuan mengalami permasalahan gender yang serius (misalnya: KDRT, *Trafiking*) dapat dibuat undang-undang khusus untuk perempuan.

3. Sisi Sosial Masyarakat. Meski bukan fenomena baru, namun masalah perempuan bekerja masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan isteri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Anggapan negatif (*stereotype*) yang kuat di masyarakat masih menganggap idealnya suami berperan sebagai yang pencari nafkah, dan pemimpin yang penuh kasih; sedangkan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak. Hanya saja, seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peran-peran tersebut tidak semestinya dibakukan, terlebih kondisi ekonomi yang membuat kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang istri pun dituntut untuk harus mampu juga berperan sebagai pencari nafkah.

4. Sisi agama-budaya. Pandangan wanita bekerja dari sisi ini didasarkan atas ajaran bahwa seorang suami adalah memimpin dalam rumah tangga, sehingga istri harus patuh pada suaminya. Wanita memiliki kedudukan istimewa sebagai seorang istri dan ibu yang penuh kasih dalam mendidik anak di keluarganya.

Peran Tenaga Kerja Ibu Rumah Tangga

Pekerja wanita yang sudah berkeluarga merupakan aset atau sumber daya manusia yang produktif dalam pembangunan baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara.

1. Peran di keluarga. Peran pekerja wanita yang berkeluarga adalah membantu ekonomi rumah tangga, sehingga sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Dan hal ini kualitas hidup menjadi lebih baik bagi keluarga seperti pemenuhan gizi, peningkatan pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan, hiburan, dan fasilitas kesehatan. Peran pekerja wanita yang berkeluarga penting untuk menumbuhkan generasi yang berkualitas.
2. Peran di masyarakat. Ada ibu-ibu yang bekerja karena ingin jadi berkat bagi orang lain, misalnya dengan melakukan pekerjaan sosial yang nirlaba atau *non profit* dengan kata lain tidak cari keuntungan untuk dirinya sendiri. Ia bekerja hanya untuk orang lain, baik melalui pendapatan yang ia hasilkan, maupun melalui keterampilan/pengetahuan yang ia berikan kepada orang lain. Contoh konkretnya adalah mengajari ibu-ibu di lingkungan tempat tinggalnya melalui pelatihan keterampilan memasak, menjahit, dan sebagainya (Salaa, 2015).
3. Peran di negara. Secara garis besar peranan wanita dalam pembangunan adalah berperspektif gender. Hal ini sangat penting dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, agar mereka tidak melihat pria dan wanita dari kaca mata biologis atau peran kodrati saja. Masyarakat juga harus melihat pria dan wanita sebagai warga negara dan sumber daya insani yang sama-sama mempunyai hak, kewajiban, kedudukan, dan kesempatan dalam proses pembangunan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender dimaksudkan untuk

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Pasal 1 ayat 11 mendefinisikan kesejahteraan keluarga adalah: “kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

Indikator keluarga sejahtera, berdasarkan survei indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM):

1. Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).
2. Keluarga sejahtera 1 (KS 1),
 - a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing.
 - b. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 - c. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dipakai di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
 - d. Bagian yang terluas dari lantai bukan berupa tanah.
 - e. Bila anak sakit dan atau PUS ingin ber-KB mereka dibawa ke sarana/petugas kesehatan serta diberi obat/cara KB modem.
3. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi semua indikator KS 1, dan indikator berikut ini:

- a. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan berpergian.
- b. Seluruh anggota keluarga makan daging atau ikan atau telur minimal seminggu sekali.
- c. Keluarga tinggal di rumah dengan luas tanah > 8 m² untuk setiap anggota keluarga.
- d. Seluruh anggota keluarga yang berumur 16-18 tahun masih sekolah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ibu Rumah Tangga Bekerja

Menurut Yufita (2013), ada dua faktor yang mempengaruhi orang untuk bekerja yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Internal, yaitu Faktor yang dibangkitkan dari dalam diri sendiri, tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar atau dengan kata lain individu tersebut tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek lain (Heryanto dan Soekiman, 2009). Tenaga kerja dapat bekerja karena tertarik dan senang dengan pekerjaannya, kepuasan dan kebahagiaan dalam dirinya. Faktor internal berperan sangat penting dalam menciptakan prestasi kerja yang tinggi dan kinerja yang optimal secara terus menerus. Faktor internal ini sendiri sudah terbentuk dalam diri seseorang. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan faktor internal dalam diri seseorang seperti memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang memberikan kinerja yang optimal dan di atas standar perusahaan, memberikan promosi jabatan kepada karyawan berprestasi, serta memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan kepada karyawan yang berpotensi, dan sebagainya (Christin dan Mukzam, 2017). Aspek-Aspek internal yang mempengaruhi lingkungan kerja adalah:
 - a. Kebutuhan Fisiologi. Menurut Maslow

(2010), kebutuhan fisiologi termasuk di dalamnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Faktor yang timbul dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi hasil pekerjaan bersifat kondisi jasmani (fisiologi). Apabila seorang tidak mengetahui tanda-tanda yang timbul dari dalam dirinya, maka akan timbul kesulitan pada saat melakukan aktivitas bekerja. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur dan oksigen (sandang, pangan, papan). Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan. Di masyarakat yang sudah mapan, kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar adalah sebuah gaya hidup. Mereka biasanya sudah memiliki cukup makanan, tetapi ketika mereka berkata lapar maka yang sebenarnya mereka pikirkan adalah citarasa makanan yang hendak dipilih, bukan rasa lapar yang dirasakannya. Seseorang yang sungguh-sungguh lapar tidak akan selalu peduli dengan rasa bau, temperatur, ataupun tekstur makanan. Faktor fisiologi adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan jasmani seseorang, misalnya tentang fungsi organ-organ, dan susunan-susunan tubuh yang dapat mempengaruhi kegiatan seseorang di bedakan menjadi dua macam yaitu tonus (kondisi) badan

- (kelelahan, tidur, asupan makanan yang bergizi dan berolahraga).
- b. Keinginan untuk Berkembang. Menurut Nahusona et al. (2004), motivasi yang dimiliki oleh seseorang terdiri dari tiga, motivasi yang didasarkan atas ketakutan (*fear motivation*), karena ingin mencapai sesuatu (*achievement motivation*), dan kekuatan dari dalam (*inner motivation*). Motivasi karena takut jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi, misalnya orang patuh pada atasan karena takut dipecat, orang membeli polis asuransi karena takut jika terjadi apa-apa dengannya, anak istrinya akan menderita. Motivasi ingin mencapai sesuatu jauh lebih baik dari motivasi karena takut, karena seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. Motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam (*inner motivation*) didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya untuk menemukan misi hidupnya bekerja berdasarkan nilai (*values*) yang diyakininya, misalnya rasa kasih pada sesama atau ingin memiliki makna dalam menjalani hidupnya. Orang yang memiliki motivasi seperti ini biasanya memiliki visi yang jauh ke depan.
 - c. Rasa Bangga. Menurut Farida (2011), motivasi wanita merasa bangga saat bekerja adalah untuk menambah pendapatan keluarga, kebutuhan keluarga tidak hanya bergantung pada suami, menghindari rasa bosan, perkawinan yang gagal, memanfaatkan minat dan keahlian, mendapatkan status, dan untuk mengembangkan diri. Hal ini berarti bahwa individu saat bekerja tidak hanya ingin mendapatkan materi, melainkan juga sebagai bentuk panggilan hati. Hal ini akan memberikan rasa bahagia dalam bekerja.
 - d. Pengakuan Diri. Salah satu teori motivasi yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow menunjukkan bahwa kebutuhan akan harga diri (*self-esteem*) berada pada tingkat keempatsatu tingkat di bawah aktualisasi diri, tingkat tertinggi. Kebutuhan akan harga diri (*self-esteem*) mencerminkan keinginan untuk dihargai setinggi-tingginya oleh orang lain. Kebutuhan ini terpenuhi melalui prestasi, kompetensi, status, dan pengakuan atas pencapaian. Kebutuhan ini sangat bisa diperoleh melalui pekerjaan. Dengan kata lain, ada hubungan antara *self-esteem* dengan pekerjaan.
 - e. Pemahaman akan Pekerjaan. Pemahaman akan pekerjaan diperlukan adanya kemampuan kerja. Kemampuan kerja adalah keadaan tertentu yang ada pada diri seseorang yang dilakukan secara maksimal dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan agar pekerjaannya tersebut berdaya dan berhasil guna untuk meningkatkan kemampuan kerja, maka pengalaman juga sangat diperlukan. Menurut Zainal (2016), pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai dalam bekerja yang dapat diukur dari masa kerja dan jenis pekerjaan yang pernah dikerjakan pegawai selama periode tertentu.
 - f. Pekerjaan yang Menantang. Dorongan dari dalam dapat berupa kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan yang ingin terpenuhi dan dorongan dari luar dapat berupa suatu tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam waktu tertentu. Tujuan dari pekerjaan menantang adalah untuk meningkatkan semangat dalam bekerja dan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Konsekuensinya, perusahaan tersebut dapat mencapai tingkat produksi

yang lebih tinggi dengan karyawan yang ada saat ini, sehingga menghasilkan laba yang lebih tinggi.

- g. Tanggung Jawab. Menurut Suwardi dan Wahyuni (2010), tanggung jawab menunjukkan tingkat penyelesaian kerja dan kualitas hasil pekerjaan yang mengarah pada terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Usaha meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang diperlukan tanggung jawab yang tinggi seluruh personalia dalam suatu organisasi.
2. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar dipengaruhi lingkungan di sekitarnya, berkembang melalui interaksi dengan individu dengan lingkungan, contohnya seseorang memiliki motif berprestasi dapat berubah ketika orang tersebut berada dalam lingkungan kelompok kerja dimana prestasi individu sangat dihargai yang akan memunculkan motif prestasi yang tinggi (Heryanto dan Soekiman, 2009). Faktor pengendalian yang dilakukan oleh manager dan yang meliputi hal-hal seperti gaji atau upah, keadaan kerja dan kebijaksanaan perusahaan. Manager perlu mengenal motivasi eksternal untuk mendapatkan tanggapan positif dari karyawan. Tanggapan yang positif ini akan menunjukkan bahwa karyawan bekerja untuk kemajuan perusahaan. Manager suatu perusahaan juga dapat menggunakan motivasi eksternal yang positif ataupun negatif. Motivasi positif merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi yang sesuai, sedangkan motivasi negatif merupakan pemberian sanksi jika prestasi tidak dapat dicapai.
 - a. Gaji. Menurut kamus besar bahasa indonesia gaji didefinisikan sebagai i) upah dari kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap, ii) balas jasa yang diterima oleh perusahaan dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Dari definisi tersebut terlihat bahwa salah satu ciri utama gaji adalah dibayarkan dalam waktu tertentu (secara periodik) tidak tentatif. Sementara menurut Dessler (2015), gaji adalah sesuatu hal atau uang yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada karyawan.
 - b. Kondisi Kerja. Salutondok dan Soegoto (2015) menyatakan bahwa kondisi kerja adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan kerja karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas, seperti temperatur, kelembaban, ventilasi, penerangan, kegaduhan, kebersihan tempat kerja, kondisi alat-alat kerja, dan ketidakjelasan tugas serta tanggung jawab. Lingkungan kerja fisik yang nyaman akan mempengaruhi karyawan dalam hal semangat kerja, sementara lingkungan kerja non fisik yang kondusif dapat meningkatkan prestasi karyawan (Moulana et al., 2017).
 - c. Gaya Kepemimpinan. Menurut Trang (2013), gaya kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
 - d. Imbalan dan Hukuman. Imbalan artinya imbalan, penghargaan, hadiah. Menurut Nawawi (2005), “Imbalan adalah usaha menumbuhkan perasaan diterima (diakui) di lingkungan kerja, yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya”. Imbalan atau penghargaan juga diberikan kepada karyawan yang menunjukkan loyalitasnya kepada perusahaan, dedikasi tinggi yang dilengkapi dengan disiplin dan budi pekerti yang baik, serta hasil kerja yang baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai perusahaan. Dampak positif dari Imbalan juga dapat membantu karyawan dalam meningkatkan kesejahteraan

hidupnya. Dalam konsep manajemen, imbalan merupakan salah satu cara yang tepat untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan di dalam perusahaan. Hukuman dapat diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Menurut Ivancevich et al. (2006), “hukuman didefinisikan sebagai tindakan menyajikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya perilaku tertentu”. Hukuman yang diberikan perusahaan memiliki efek positif dan negatif. Efek positif yang ditimbulkan dari Hukuman yaitu karyawan menjadi sadar akan kesalahan yang dilakukan dalam pekerjaan dan berusaha untuk memperbaikinya. Efek negatif dari hukuman jika dikaitkan dengan tingkat kepuasan kerja yaitu ketidakpuasan karyawan akan kerjanya yang kurang dihargai dan dinilai perusahaan dan juga bisa berakibat menurunnya kinerja karyawan. Perusahaan harus benar-benar menerapkan hukuman dengan tepat kepada karyawan yang melanggar peraturan yang telah disosialisasikan sebelumnya. Hukuman yang diberikan itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada karyawan yang melakukan kesalahan sehingga karyawan tersebut akan menjadi disiplin dalam melakukan setiap pekerjaannya. Menurut Puspita et al. (2015), persepsi terhadap imbalan dan hukuman dapat diartikan untuk meningkatkan dan menurunkan tingkat kepuasan kerja dan kinerja karyawan di dalam perusahaan. Jika perusahaan lebih menerapkan imbalan dengan baik, maka hal ini akan meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Akan tetapi jika perusahaan lebih menerapkan hukuman, maka hal ini akan menurunkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Setiap perusahaan memiliki cara yang

berbeda-beda dalam menghargai dan menilai hasil kerja karyawannya.

- e. Ketersediaan Sarana. Ketersediaan sarana seperti peralatan yang menjadi sarana yang secara langsung digunakan, serta perlengkapan lain adalah alat atau mesin dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pekerjaan.
- f. Hubungan Antar Rekan Kerja. Menurut Sarwono (2011), hubungan antar rekan kerja merupakan bentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur, dalam pelaksanaan hubungan antar rekan kerja harus tercapai keuntungan bersama. Pelaksanaan hubungan antar rekan kerja hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Lakoy (2015) menyatakan bahwa apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama diperlukan komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman yang sama terhadap tujuan bersama.
- g. Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena apabila hal tersebut diabaikan maka kecelakaan yang dialami oleh para pekerja akan berakibat pada turunnya kualitas kerja yang dilakukan oleh para pekerja itu sendiri, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan akan mengalami gangguan seperti tenaga kerja yang diperlukan menjadi berkurang. Keselamatan kerja secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Intensitas Ibu Rumah Tangga

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang ditulis oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016), intensitas merupakan kata yang diperoleh dari Bahasa Inggris yakni "*intense*" yang berarti semangat, dan giat. Intensitas adalah satu sifat kuantitas diri satu penginderaan yang berhubungan dengan intensitas perangsangannya seperti kecemerlangan suatu warna atau kerasnya suatu bunyi kekuatan. Irawati (2003) menyatakan intensitas merupakan kuantitas suatu usaha seseorang atau individu dalam melakukan tindakan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang ditulis oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016), intensitas adalah keadaan tingkat atau ukuran intensya. Intens adalah sesuatu yang hebat atau sangat tinggi, bergelora penuh semangat dan sangat emosional. Sementara intensitas merupakan seberapa tenaga seseorang yang dikerahkan dengan semangat untuk memperoleh suatu tujuan atau hasil tertentu. Seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu pada kurun waktu tertentu pula bisa dikatakan mempunyai intensitas yang tetap. Jadi yang dimaksud dengan intensitas kerja adalah kuantitas dari satu penginderaan yang berhubungan dengan intensitas seseorang untuk bekerja memiliki jumlah, pada pola tindakan dan perilaku yang sama, yang di dalamnya adalah usaha tertentu dari orang tersebut untuk mendapatkan pemuasan kebutuhannya.

Menurut Campbell dan Peeters (2008), beban kerja yang tinggi pada umumnya menyiratkan intensitas kerja yang tinggi, yaitu usaha pekerja yang tinggi dalam jumlah jam kerja yang diberikan. Namun, pada umumnya

beban kerja yang lebih tinggi menyiratkan intensifikasi, yaitu peningkatan intensitas kerja atau beban kerja mempengaruhi intensitas.

Perilaku kerja yang sangat intens adalah cenderung menyebabkan rendahnya penyimpangan organisasi di antara sesama karyawan, perilaku mencerminkan tindakan positif akibatnya, karyawan ini terhindar dari masalah-masalah menyimpang di tempat kerja (Boekhorst, 2015). Tindakan menyimpang dalam upaya mempertahankan lingkungan kerja yang menegaskan pandangan positif mereka (Swann, 2012).

Intensitas kerja (*work intensity*) berhubungan dengan seberapa sering seseorang melakukan aktivitasnya (Aji et al., 2016). Pengukuran seperti kecepatan kerja (*pace of work*), kebutuhan untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat, dan seberapa keras atau seberapa banyak usaha pekerjaan dimasukkan ke dalam pekerjaan mereka (Hamilton et al., 2017). Menurut Arsyana (2013), intensitas berhubungan dengan frekuensi dimana frekuensi dapat diartikan dengan kekerapan atau kejarangan kerapnya, frekuensi yang dimaksud adalah seringnya kegiatan itu dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.

Kontribusi Pendapatan Ibu Rumah Tangga

Pria dalam rumah tangga mempunyai kedudukan sebagai pengambil keputusan. Budaya orang terdahulu mengatakan bahwa pria adalah kepala keluarga dan pencari nafkah utama, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dimungkinkan peran dan kemampuan wanita dalam hal membantu mencari nafkah. Wanita dalam rumah tangga hanya sebagai ibu rumah tangga, namun karena faktor seperti ekonomi keluarga, motivasi untuk mengisi waktu luang sampai keinginan untuk mewujudkan potensi dirinya, sekarang ibu rumah tangga banyak masuk ke dalam sektor

formal dan informal. Kontribusi pendapatan wanita merupakan sumbangan yang diberikan kepada rumah tangga (Farida, 2011). Ibu rumah tangga mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga khususnya rumah tangga miskin.

Rumah tangga miskin menyebabkan wanita turun ke pasar kerja untuk menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan kurang cukup (Budiantari dan Rustariyuni, 2013). Menurut Wawansyah et al. (2012), pendapatan wanita atau ibu rumah tangga mempunyai pengaruh cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga.

Semakin kecil pendapatan suami, maka kontribusi pendapatan istri semakin besar sehingga mendorong istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Wawansyah et al. (2012), kontribusi pendapatan rumah tangga berasal dari 3 sumber, yaitu dari suami, istri dan sumber lainnya (anak/anggota keluarga lain).

Kontribusi pendapatan ibu rumah tangga digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan ibu rumah tangga terhadap pendapatan keluarga. Kontribusi pendapatan wanita/ibu rumah tangga dapat dilihat dari kontribusi mutlak dan kontribusi relatif pendapatan (Wawansyah et al., 2012).

Curahan waktu kerja wanita/ibu rumah tangga dikelompokkan menjadi 3 kegiatan, yakni:

1. Aktivitas domestik adalah seluruh kegiatan yang dilakukan ibu rumah tangga dalam kaitannya dengan kegiatan rumah tangga dan keluarga. Aktifitas domestik terdiri atas kegiatan memasak, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan rumah, belanja kebutuhan pangan, dan mengasuh anak.
2. Aktivitas ekonomi produktif kegiatan di

luar rumah yang menghasilkan pendapatan. Wanita atau istri yang mempunyai peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah. Pendapatan bisa berasal dari pekerjaan utama atau sampingan yang dilakukan ibu atau istri.

3. Aktivitas sosial seluruh kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh ibu rumah tangga atau istri untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dalam hal mempererat silaturahmi antar sesama warga. Ibu rumah tangga yang bersosialisasi untuk kegiatan yang bermanfaat seperti arisan, pengajian, posyandu dan *selamatan* atau syukuran, dan PKK. Aktivitas ini sewaktu-waktu (*temporary*) tergantung pada kegiatannya. Partisipasi wanita/ibu rumah tangga dalam kegiatan sosial memiliki arti secara internal, dimana hal tersebut menunjukkan kemampuan untuk melakukan aktualisasi diri dalam lingkungan masyarakat. Selain itu secara eksternal memberi arti bahwa partisipasi wanita dalam kegiatan sosial masyarakat adalah menjaga keberlangsungan aktivitas sosial yang ada di masyarakat yang merupakan wadah untuk menambah keterampilan dan peluang untuk membuka usaha di antara sesama anggota dalam upaya meningkatkan pendapatan (Sunardji et al., 2005). Aspek sosial dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Ibu rumah tangga mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga khususnya rumah tangga prasejahtera. Keluarga prasejahtera menyebabkan wanita turut bekerja untuk menambah pendapatan rumah tangga.

Partisipasi ibu rumah tangga saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak antara suami dan istri akan tetapi juga menyatakan arti bagi pembangunan dalam masyarakat di Indonesia yang terus menerus berkembang. Secara umum alasan ibu rumah tangga bekerja untuk

membantu meringankan beban suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan suami yang masih kurang akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga.

Kondisi inilah yang mendorong ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya menekuni sektor domestik sebagai pengurus rumah tangga, kemudian ikut berpartisipasi aspek produktif. Sebagai tenaga kerja wanita dalam keluarga, umumnya ibu rumah tangga cenderung memilih bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Secara umum motivasi kerja kebanyakan tenaga kerja wanita adalah membantu menghidupi keluarga. Kontribusi pendapatan wanita merupakan sumbangan yang diberikan kepada rumah tangga. Ibu rumah tangga mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga khususnya rumah tangga prasejahtera.

Pendapatan istri berpengaruh cukup besar terhadap pendapatan keluarga. Semakin kecil pendapatan suami, maka kontribusi pendapatan istri semakin besar sehingga mendorong wanita untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan jalan aktif dalam kegiatan mencari nafkah.

Curahan waktu kerja ibu rumah tangga lebih banyak di aktifitas ekonomi produktif. Aktivitas ekonomi produktif adalah kegiatan diluar rumah yang menghasilkan pendapatan. Wanita atau istri yang mempunyai peran ganda yaitu sebagai pencari nafkah. Pendapatan bisa berasal dari pekerjaan utama atau sampingan yang dilakukan ibu atau istri.

Secara umum wanita mempunyai peran

baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam curahan waktu kerja wanita. Curahan waktu kerja wanita secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu: curahan waktu kerja untuk kegiatan ekonomi (mencari nafkah) dan kegiatan domestik yaitu kegiatan rumah tangga, dan kegiatan sosial.

PENUTUP

Ibu rumah tangga memberi sumbangan besar terhadap pendapatan rumah tangga. Ibu rumah tangga mempunyai kegiatan untuk mengembangkan diri yaitu melalui aktivitas-aktivitas domestik, aktivitas ekonomi produktif dan aktivitas sosial dalam rumah tangga. Ibu rumah tangga mempunyai peran ganda, bukan hanya mengurus aktivitas domestik tetapi juga ikut serta dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal tersebut terjadi karena tekanan ekonomi dalam rumah tangga yang semakin besar dan rendahnya pendapatan suami.

Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan arti bagi pembangunan dalam masyarakat di Indonesia. Secara umum alasan ibu rumah tangga bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu, kesempatan kerja semakin terbatas karena persaingan yang semakin ketat, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Pendapatan wanita atau Ibu rumah tangga menurut Wawansyah et al. (2012) mempunyai pengaruh cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga.

Kondisi inilah yang mendorong ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya menekuni sektor domestik (mengurus rumah tangga), kemudian

ikut berpartisipasi di sektor publik dengan ikut serta menolong perekonomian keluarga. Sebagai tenaga kerja wanita dalam keluarga, umumnya ibu rumah tangga cenderung memilih bekerja di sektor informal. Hal ini dilakukan agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Faktor utama yang mempengaruhi ibu rumah tangga bekerja adalah karena faktor kebutuhan fisiologi, kemudian disusul karena faktor pemahaman akan pekerjaan, rasa bangga, pekerjaan yang menantang, keinginan untuk berkembang, dan faktor tanggung jawab. Sementara faktor pengakuan diri tidaklah merupakan faktor utama yang menyebabkan ibu rumah tangga harus bekerja. Selain faktor internal ini, faktor eksternal yang menyebabkan ibu rumah tangga bekerja adalah faktor gaji, kondisi kerja, gaya kepemimpinan, hubungan antar rekan kerja, ketersediaan material, keselamatan kerja, dan imbalan atau hukuman.

Secara umum wanita mempunyai peran baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam curahan waktu kerja wanita. Menurut Wawansyah et al, (2012) curahan waktu kerja wanita secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu: curahan waktu kerja untuk kegiatan ekonomi (mencari nafkah) dan kegiatan non ekonomi yaitu kegiatan dasar, kegiatan sosial, dan kegiatan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. P., Iskandar, B. H., dan Purwangka, F. (2016). "Intensitas Kerja Pengawas Perikanan pada Aktivitas Patroli Laut Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jakarta". *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 7(2), 163-178.
- Alaimo, K., Olsan, C.M., dan Frongillo, E.A. (2001). "Low Family Income and Food Insufficiency in Relation to Overweight in US Children". *Arch Pediatr Adolesc Med*, 155, 1161-1167.
- Arsyana, L. (2013). "Pengaruh Intensitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(1), 73-92.
- Basrowi dan Juariyah, S. (2010). "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur". *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(1), 58-81.
- Boekhorst, J. A. (2015). "Human Resource Management Practices, Work Intensity, and Workplace Deviance: Exploring the Moderating Role of Core Self-Evaluations". *Dissertation Doktor, Graduate Program in Human Resource Management, York University, Toronto, Ontario*.
- Budiantari, N. N. S. dan Rustariyuni, S. D. (2013). "Pengaruh Faktor Sosial Demografi Terhadap Curahan Jam Kerja Pekerja Perempuan pada Keluarga Miskin di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(11), 533-546.
- Campbell, I. dan Peeters, E. (2008). "Low pay, Compressed Schedules and High Work Intensity: a study of contract cleaners in Australia". *Australian Journal of Labour Economics*, 11(1), 27-46.
- Christin, J. dan Mukzam, D. (2017). "Pengaruh Motivasi Internal dan Eksternal terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada

- Karyawan PT. Indomarco Prismatama Distribution Centre Bogor)". *Jurnal Administrasi Bisnis*, 50(5), 108-112.
- Dessler, G. (2015). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Elmanora, Hastuti, D., dan Muflikhati, I. (2017). "Lingkungan Keluarga Sebagai Sumber Stimulasi Utama untuk Perkembangan Kognitif Anak Usia Prasekolah". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 10(2), 143-156.
- Farida, L. (2011). "Kontribusi Pendapatan Perempuan Bekerja Sektor Informal pada Ekonomi Keluarga di Kota Pekanbaru". *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 1(2), 103-112.
- Fathurrohman, P., Suryana, A.A., dan Fatriany, F. (2013). *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamilton, C. T., Crus, A. D., dan Jack, S. (2017). "Re-framing the Status of Narrative in Family Business Research: Towards an Understanding of Families in Business". *Journal of Family Business Strategy*, 8, 3-12.
- Heryanto dan Soekiman. (2009, Mei). *Motivasi Kerja sebagai Dorongan Internal dan Eksternal pada Perusahaan Jasa Konstruksi*. Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil - 3 (Konteks 3), Jakarta.
- Irawati. (2003). *Intensitas Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Jakarta.
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., dan Matteson, M. T. (2006). *Perilaku dan Manajemen Organisasi (Jilid 1 Edisi Ketujuh)*. (Terjemahan Gina Gania). Jakarta: Erlangga.
- Izumi, M. dan Gullon-Rivera, A. L. (2018). "Family Resilience Among Sojourning Japanese Mothers: Links to Marital Satisfaction and Children's Behavioral Adjustment". *Family and Consumer Sciences Research Journal*, 46(3), 282-296.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intensitas>
- Lakoy, A. C. (2015). "Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Aryaduta Manado". *Journal Emba*, 3(3), 981-991.
- Mandroschenko, O., Malkova, Y., dan Tkacheva, T. (2018). "Influence of the Shadow Economy on Economic Growth". *Journal of Applied Engineering Science*, 16(1), 87-94.
- Maslow. (2010). *Motivation and Personality*. Jakarta: Rajawali
- Mencarini, L. dan Vignoli, D. (2018). "Employed Women and Marital Union Stability: It Helps When Men Help". *Journal of Family Issues*, 39(5), 1348-1373.
- Moulana, F., Sunuharyo, B. S., dan Utami, H. N. (2017). "Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui variabel mediator motivasi kerja (studi pada karyawan PT. Telkom Indonesia Tbk. Witel Jatim Selatan, Jalan A. Yani, Malang)". *Jurnal Administrasi Bisnis*, 44(1), 178-185.
- Muflikhati, I., Hartoyo, Sumarwan, U.,

- Fahrudin, A., dan Puspitawati, H. (2010). "Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pesisir Jawa Barat". *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsultasi*, 3(1), 1-10.
- Nahusona, H. C. F., Rahardjo, M., dan Rahardjo, S. T. (2004). "Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Keinginan Karyawan untuk Pindah (Studi Kasus pada PT. Bank Papua)". *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, 1(2), 16-30.
- Na'imah, T. (2011). "Aplikasi Konseling Keluarga Islam untuk Mengatasi Masalah Psikososial Akibat Kemiskinan". *Psycho Idea*, 9(2), 1-11.
- Nawawi, H. (2005). *MSDM untuk bisnis yang kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pozdnyakov, A. L. (2018). "Conceptual Foundations of Improvement of Economic Regulation of Rational Natural Resources Use in Market Conditions". *Journal of Applied Engineering Science*, 16(1), 32-35.
- Puspita, L. M. R. dan Widanta, B. P. (2016). "Analisis Pendapatan Istri Nelayan Alam Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Desa Serangan". *E-Jurnal EP Unud*, 5(7): 846-860.
- Putra, R. A. R. S., Ariyadi, B., Kurniwati, N., dan Haryadi, F. T. (2017). "Pengaruh Modal Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Peternak: Studi Kasus pada Kelompok Peternak Ayam Kampung Ngudi Mulyo, Gunungkidul". *Buletin Peternakan*, 41(3), 349-354.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-undang RI Nomor 10, Tahun 1992 jo PP No. 21 Tahun 1994, tentang fungsi keluarga*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 52, Tahun 2009, tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga*.
- Rochaniningsih, N. S. (2014). "Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja". *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 59-71.
- Rosni. (2017). "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara". *Jurnal Geografi*, 9(1), 53-66.
- Rusnani. (2013). "Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kec. Kalianget". *Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 83-100.
- Salaa, J. (2015). "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Ekonomi Kelurga di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten kepulauan Talaud". *Jurnal Holistik*, 8(15), 1-16.
- Salutondok, Y. dan Soegoto, A. S. (2015). "Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi Kerja, dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Kota Sorong". *Jurnal Emba*, 3(3), 849-862.
- Sarwono, S.W. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sebataraja, L. R., Oenzil, F. dan Asterina. (2014). "Hubungan Status Gizi dengan Status Ekonomi Keluarga Murid Sekolah Dasar di Daerah Pusat

- dan Pinggiran Kota Padang”. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 3(2), 182-187.
- Silalahi, K. dan Meinarno, E. (2010). *Keluarga Indonesia: Aspek dan dinamika zaman*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumiarti, E. (2008). “Wirausaha Ibu Rumah Tangga untuk Mengatasi Kemiskinan”. *Jurnal R dan B*, 3(2), 182-191.
- Sunardji, R., Tobuku, dan Jasmanidar, Y. (2005). *Peran Serta Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga*. Bandung: Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran. Bandung.
- Suryono, A. (2014). “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.
- Suwardi dan Wahyudi, A. (2010). “Pengaruh Komunikasi, Kedisiplinan, dan Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Pegawai di UPT Dinas Pendidikan Polokarto Sukoharjo”. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia*, 4(2), 99-108.
- Swann, W. B. (2012). *Self-verification theory*. New York: Guilford Press.
- Taher, A. et al. (2016). *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Treas, J. dan Tai, T. (2012). “How Couples Manage the Household: Work and Power in Cross-National Perspective”. *Journal of Family Issues*, 33(8), 1088-1116.
- Yufita, A. (2013). “Pengaruh motivasi internal, eksternal dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Universitas Pasir Pengaraian”. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 2(1), 98-112.
- Wawansyah, H., Gumilar, I., dan Taufiqurahman, A. (2012). “Kontribusi ekonomi produktif wanita nelayan terhadap pendapatan keluarga nelayan”. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 3(3), 95-106.
- Widyastuti, A. (2012). “Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009”. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1-11.
- Wijanarko, J. (2018). *Mendidik Anak dengan Hati*. Keluarga Indonesia Bahagia, Jakarta: Setia.
- Zainal. (2016). “Pengaruh kemampuan kerja, pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali”. *Jurnal 4 e Jurnal Katalogis*, 4(6), 83-90.

PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL LANJUT USIA MELALUI PROGRAM PELATIHAN KEMBALI

THE ENHANCEMENT OF THE ELDERLY'S SOCIAL FUNCTIONING WITH RETRAINING PROGRAM

Syamsuddin

Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minaula Kendari
Jl. Poros Bandara Haluoleo, Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Indonesia
Email: syamsuddingido@yahoo.co.id

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk tua, dimana lansia telah melebihi tujuh persen dari populasi keseluruhan. Keberfungsian sosial lansia sangat ditentukan oleh kemampuan fungsional, instrumental, eksekutif dan relasi sosial. Sementara secara degeneratif fungsi-fungsi tersebut terus mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Pemberian stimulus yang terencana, terancang dan terarah serta berkelanjutan dapat membantu mencegah atau paling tidak memperlambat proses penurunan tersebut. Kajian ini bermaksud menjelaskan satu pendekatan dalam rangka membantu lansia meningkatkan keberfungsian sosialnya melalui program *retraining* secara emosional, motorik dan kognitif. Pelatihan kembali (*retraining*) merupakan salah satu model rehabilitasi sosial pada lansia dalam rangka meningkatkan keberfungsian sosialnya. Sejatinnya program ini adalah melatih kembali fungsi-fungsi yang sebelumnya telah dikuasai melalui motor, emotional dan kognitif *retraining*. Kognitif *retraining* dapat meningkatkan keterampilan kognitif klien, meningkatkan fungsi memori, meningkatkan orientasi *visuo-spasial*, dan meningkatkan fungsi eksekutif. Motor *retraining* dapat meningkatkan kecepatan, akurasi dan koordinasi dan meningkatkan mobilitas. Sementara *emotional retraining* meningkatkan harga diri dan rasa berguna pada lansia.

Kata Kunci: keberfungsian sosial, lansia, pelatihan kembali, stimulus.

Abstract

Indonesia is a country with an elderly population and the country where the elderly have exceeded seven percent of the population. The elderly's social function is really determined by functional, instrumental and executive functions as well as social relation. Meanwhile, these functions generatively continue decreasing because of the increase of their age. Providing a planned, formulated, directed and sustainable stimulus can help prevent or at least slow down the decreasing process. This study intends to explain an approach to help the elderly increase their social function through emotional, motoric and cognitive retraining program. Retraining is a model of social rehabilitation for the elderly to improve their social function. Indeed, this program is to retrain the functions that have been previously mastered through motor, emotional and cognitive retraining. Cognitive retraining can improve the elderly's cognitive skills, memory function, visuo-spatial orientation, and executive function. Motor retraining can increase their speed, accuracy and coordination as well as mobility. Meanwhile, emotional retraining increases self-esteem and a sense of usefulness for the elderly.

Keywords: social function, elderly, retraining, stimulus.

PENDAHULUAN

Komposisi penduduk lanjut usia (lansia) meningkat dengan pesat di hampir setiap belahan dunia. Hal yang sama terjadi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (2015) melaporkan bahwa populasi lansia tahun 2010 sebesar 18,1 juta dan meningkat menjadi 22.041.000 jiwa di tahun 2015. Sementara pada tahun 2030 dan 2035, populasi lansia di Indonesia, diprediksi meningkat masing-masing menjadi 40,95 juta dan 48,19 juta jiwa. Asia dan Indonesia sudah masuk kategori penduduk menua (*ageing population*) sejak tahun 2015 karena penduduknya yang berusia 60 tahun ke atas telah melebihi tujuh persen.

Secara umum, peningkatan ini terjadi akibat angka kelahiran dan kematian yang menurun, serta usia harapan hidup yang mengalami peningkatan. Sebagai perbandingan untuk usia harapan hidup Indonesia, hasil sensus penduduk oleh BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah 70,1 tahun meningkat sekitar 10 tahun jika dibandingkan tiga dekade sebelumnya, di bawah 60 tahun (BPS, 2015). Kondisi ini telah berkontribusi pada penuaan penduduk di Indonesia. Sementara peningkatan angka harapan hidup itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbaikan gizi dan sanitasi, pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau, hingga peningkatan taraf pendidikan serta faktor kesejahteraan sosial dan ekonomi yang semakin baik (Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan, 2017)

Sisi tersebut menunjukkan keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial (Komnas Lansia, 2010). Namun di sisi lain akan berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial jika tidak dibarengi dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada lansia, perhatian

keluarga dan keramahan lingkungan sosial. Jika lansia menurun kualitas kesehatannya tentu akan berdampak pada peningkatan biaya perawatan, penurunan pendapatan/penghasilan dan resiko disabilitas. Jika lansia banyak yang disfungsi sosial maka bertambah berat beban keluarga (Sale, 2003). Pada tahun 2015, rasio ketergantungan lansia Indonesia yakni 13,28. Hal ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang lansia (Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan, 2017).

Beberapa masalah yang dialami lansia pada umumnya adalah penurunan fungsi kognitif, penurunan kemampuan fungsional (ketergantungan untuk rawat diri; seperti mandi, toilet, makan, berpakaian, berpindah tempat, buang air besar dan kecil) dan tergantung secara instrumental (seperti, berbelanja, memasak, membersihkan rumah, transportasi, komunikasi, dan lain-lain), disabilitas, kekerasan, depresi, dimensia, gangguan konsep diri, rasa kesepian dan kesendirian serta masalah pada tingkat yang lebih makro yakni kemiskinan, keterlantaran (Tamher dan Noorkasiani, 2008).

Masalah-masalah tersebut ke depan menjadi semakin kompleks karena beberapa faktor seperti: 1) perubahan tipe keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga inti, 2) mudarnya sistem kerekatan sosial, dan 3) perubahan peran gender. Peralihan peran perempuan dari sektor domestik menjadi sektor publik berdampak pada berkurang atau bahkan hilangnya fungsi keperawatan di dalam rumah terutama perawatan pada lansia. Faktor-faktor tersebut semakin menurunkan tanggungjawab keluarga dan masyarakat dalam memberikan perawatan dan perlindungan kepada lansia. Kondisinya akan semakin parah bagi para lansia yang sudah tidak memiliki keluarga atau kerabat yang dapat memberikan perawatan (Suheli, 2016).

Terkait dengan keterlantaran lansia, Susenas (2015) melaporkan bahwa dari 22,04 juta lansia di Indonesia, sekitar 2,1 juta (9,59%) masuk kategori terlantar dan 23,01% dengan kategori hampir terlantar (Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik, 2016). Kemiskinan dan keterlantaran adalah aspek yang membuat lansia tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal (Kementerian Sosial, 2011).

Tamher dan Noorkasiani (2008) menjelaskan, banyak lansia dapat hidup penuh makna dan mandiri namun pada saat yang sama ada juga yang mengalami keterlantaran. Bahkan beberapa diantaranya mengalami gangguan dan kendala secara psikomotorik, emosional dan kognitif sehingga membutuhkan program rehabilitasi guna mengatasi masalah terkait pelaksanaan aktivitas harian. Penurunan fungsi kognitif dapat menyebabkan penurunan kemampuan fungsional (Friedman et al., 2002; Harvey, 2005), bahkan dimensia yang bersifat kronis dan progresif (Maslim, 2013). Hal ini karena fungsi kognitif mempengaruhi proses berpikir, memori, orientasi, pemahaman, perhitungan, kapasitas belajar bahasa dan penilaian. WHO mencatat bahwa di setiap tahun, 9,9 juta kasus baru dengan gangguan kognitif dengan dimensia. Diseluruh dunia diperkirakan 47 juta orang mengalami gangguan kognitif dan diprediksi tahun 2030 menghampiri angka 75 juta kasus serta 2050 menjadi 132 juta kasus. Sementara penderita gangguan kognitif dengan Alzheimer di Indonesia tahun 2013 mencapai satu juta orang dan akan meningkat dua kali lipat di tahun 2030, serta menjadi empat kali lipat di tahun 2050 (Kementerian kesehatan RI, 2016).

Tujuan rehabilitasi sosial lansia, baik berbasis keluarga, komunitas maupun berbasis institusi, adalah untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial mereka.

Berbagai pendekatan dilakukan untuk program rehabilitasi sosial agar lansia tersebut dapat menjalankan peran-peran sosialnya dan dapat berkontribusi dalam masyarakat (Kementerian Sosial, 2015).

Shah dan Tank (2008), menyebut rehabilitasi buat lansia lebih difokuskan kepada peningkatan kualitas hidup dan bukan selalu berarti untuk mengembalikan kemampuan seperti semula karena adanya faktor degeneratif yang terjadi secara alamiah.

Meskipun lansia telah mengalami kemunduran dari berbagai aspek, bukan berarti mereka kehilangan kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsi sosialnya. Sebagai warga senior mereka memiliki pengalaman hidup, ilmu dan keterampilan serta nilai-nilai kebajikan yang dapat disumbangkan kepada masyarakat terutama generasi penerus. Karena itu diperlukan pemahaman profesional mengenai hak dan kebutuhan lansia secara komprehensif serta menerapkan prinsip, metode dan nilai nilai pekerjaan sosial profesional agar lansia mendapatkan kesempatan luas untuk berkembang dan berkontribusi terhadap masyarakat (Crawford dan Walker, 2008).

Kajian ini bermaksud untuk menjelaskan beberapa pendekatan dalam rangka membantu lansia meningkatkan keberfungsian sosialnya melalui program *retraining* secara emosional, motorik dan kognitif.

PEMBAHASAN

Keberfungsian Sosial Pada Lansia

Barker (1987) menggambarkan keberfungsian sosial sebagai kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan statusnya sehingga dapat memberikan kontribusi positif kepada dirinya, keluarganya, organisasi ataupun masyarakat.

Keberfungsian sosial pada lansia dapat diukur berdasarkan kemampuan rawat diri/fungsional, fungsi instrumental dan fungsi eksekutif dan relasi sosial. Kemampuan fungsional adalah kemampuan lansia berkaitan dengan rawat diri (personal care) seperti makan/minum, mandi, berpakaian, mengontrol buang air besar dan atau air kecil, *toileting* dan mobilitas. Sedangkan fungsi-fungsi instrumental adalah seperti memasak, berbelanja, menggunakan telepon, mengatur pengobatan, mengerjakan pekerjaan rumah, mencuci, berkendara atau menggunakan transportasi umum, dan mengelolah keuangan. Kemampuan lansia melaksanakan rawat diri dan fungsi instrumental pada lansia dapat dikategorikan pada level mandiri, membutuhkan bantuan, tergantung dan tidak bisa sama sekali. Selain itu dikenal pula dengan fungsi-fungsi eksekutif yang terdiri dari kemampuan merencanakan, menganalisis, mengorganisasir dan mengambil keputusan. Ketergantungan dalam rawat diri, instrumental dan eksekutif bukan berarti lansia tidak lagi memiliki peluang untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya, sebab jika merujuk pada perspektif kekuatan, sejatinya setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang dapat disumbangkan untuk kehidupan sosialnya. Hanya saja tentu tidak dapat dipaksakan untuk sempurna seperti golongan usia remaja atau pemuda. Akan tetapi, fungsi fungsi tersebut dapat dioptimalkan berdasarkan fungsi dan kemampuan yang masih tersisa (Tiwari dan Sonal, 2018).

Terkait dengan keberfungsian sosial lanjut usia beberapa pakar atau sarjana telah melakukan kajian. Muthia, Krisnani dan Meilany (2016) mengkaji tentang peranan pekerja sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial di PSTW Budi Darma Bekasi. Kajian ini lebih fokus pada peranan dan metode pekerja sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial lansia di

panti. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial yang bekerja dengan lansia di panti dapat menjalankan peran sebagai broker untuk menghubungkan klien dengan sistem sumber guna peningkatan keberfungsian sosial klien.

Jariatun (2015) meneliti tentang aspek-aspek yang membuat lansia tidak dapat menjalankan keberfungsian sosialnya di PSTW Budhi Darma Yogyakarta. Jariatun melihat masalah keberfungsian sosial lansia dari sembilan aspek yakni kesibukan lansia, sumber keuangan, kegiatan lansia, pandangan lansia terhadap panti, hubungan lansia dengan orang lain, hubungan lansia dengan keluarga, ketergantungan lansia, hobi lansia dan kondisi fisiknya. Berdasarkan kesembilan aspek tersebut, penelitian ini berhasil mengkategorikan lansia kedalam tiga kategori berdasarkan keberfungsian sosialnya, yakni: lansia yang berfungsi sosial secara efektif, lansia yang berfungsi sosial beresiko dan lansia yang tidak mampu beradaptasi.

Sementara kajian lintas negara yang membahas tentang keberfungsian sosial lansia dilakukan diantaranya oleh Graham, et al. (2002). Ini adalah studi kuantitatif, dengan menggunakan skala *Mini Mental State Examination* (MMSE) dan skala keberfungsian sosial mencoba membandingkan tiga kelompok lansia, masing-masing kelompok lansia yang tidak memiliki morbiditas psikiatrik, kelompok lansia yang mengalami depresi dan kelompok lansia dengan skizofrenia. Ketiga kelompok lansia tersebut tinggal dalam komunitas dan bukan dalam panti. Hasilnya menunjukkan bahwa lansia yang tanpa gangguan psikiatrik kurang mengalami isolasi dari masyarakat, memiliki banyak aktivitas pengisian waktu luang dan kurang melakukan kontak dengan pelayanan komunitas profesional. Sementara lansia dengan skizoprenia lebih terisolasi dan kurang memiliki aktivitas pengisian waktu

luang dibandingkan dengan lansia yang didiagnosa depresi.

Berat et al. (2015), melakukan kajian tentang keberfungsian sosial pada lansia yang menderita penyakit kronis atau penyakit parah. Mereka melakukan kajiannya menggunakan angket sosio-demografik dan wawancara kepada dua kelompok lansia yakni 49 lansia yang menjalani perawatan kemoterapi paska operasi dengan lansia yang mengidap kanker stadium lanjut dan menjalani perawatan kemoterapi sistematis. Kajian ini menemukan bahwa kelompok lansia dengan kondisi lebih sehat hidup bersama dalam satu rumah, sementara kelompok lansia dengan kondisi sakit parah kebanyakan hidup terpisah dengan keluarganya. Meskipun demikian, kedua kelompok lansia tersebut kebanyakan diasuh oleh anak-anaknya. Kedua kelompok pasien pada fase awal pengobatan lebih sering dikunjungi oleh kerabatnya dibandingkan dengan lansia yang lebih sehat.

Sebuah kajian literatur dilakukan Meesters, et al. (2010), mengenai keberfungsian sosial lansia dengan skizofrenia yang tinggal secara mandiri di komunitas. Sebanyak 36 artikel dikaji untuk menemukan bukti-bukti mengenai keberfungsian sosial pada lansia dengan skizofrenia. Keberfungsian sosialnya fokus pada peran sosial, dukungan sosial, dan keterampilan sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa lansia dengan skizofrenia benar-benar mengalami kemunduran kesehatan dikaitkan dengan keberfungsian sosial. Ada persamaan kondisi diantara pasien dan kemampuan kognitif adalah hal yang paling berpengaruh pada keberfungsian sosial mereka.

Ponnuswami et al. (2012), menulis tentang pendekatan kekuatan untuk praktik pekerjaan sosial dengan lansia. Tulisannya menegaskan bahwa saat bekerja dengan lansia, pendekatan kekuatan sangat berguna dengan memandang

bahwa kebanyakan lansia memiliki pengetahuan, kebijaksanaan dan serangkaian keterampilan. Karenanya, pendekatan ini dapat menggeser pendekatan profesional yang hanya bertumpu pada pandangan lansia sebagai beban dan selalu tergantung. Para pekerja sosial diharapkan dapat lebih efektif saat bekerja menggunakan pendekatan kekuatan dari pada model penanganan yang paternalistik.

Pekerja sosial yang bekerja dengan lansia berperan untuk meningkatkan kemampuan lansia menjalankan fungsi sosialnya melalui penggalan sumber, meningkatkan harmoni sosial dan menciptakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang bagi klien (Dubois dan Miley, 1992). Pekerja sosial dapat mengaplikasikan perspektif kekuatan untuk bekerja bersama dengan warga sepuh dengan mengedepankan prinsip-prinsip bahwa individu memiliki kompetensi, sumber-sumber, mampu mempelajari keterampilan baru dan sanggup mengatasi masalah terkait dirinya, serta dapat memanfaatkan kompetensinya dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah dan terlibat dalam proses pemulihan atau *self-healing* (Ponnuswami et al., 2018).

Program Pelatihan Kembali

Secara medis dan fisik, rehabilitasi pada lansia bertujuan untuk merawat, mempertahankan kemandirian dan mengoptimalkan kemampuan yang tersisa serta memperlambat proses penurunan kemampuan yang lebih serius. Sementara secara psikologis, sosial dan spiritual, proses rehabilitasi ini ditujukan untuk meningkatkan kebermaknaan hidup dan kualitas hidup serta mengembangkan interaksi dan dukungan sosial. Selain faktor degeneratif, penurunan kemampuan pada lansia juga dipengaruhi oleh kurangnya atau berhentinya stimulasi pada fungsi-fungsi dan kemampuan pada lansia. Fungsi-fungsi dan

kemampuan tersebut berupa aspek kognitif, psikomotor dan emosional. Penurunan ini dapat dicegah jika lansia mendapatkan stimulus dan dukungan yang berkelanjutan, terencana, terukur dan terarah. Bahkan hasil review 10 kajian longitudinal (> 20 tahun) dari Harding (2003), penurunan fungsi kognitif pada lansia bukan hanya bisa dicegah tapi juga bisa dipulihkan.

Tingkat pemulihan berkisar antara 46 hingga 84% untuk pemulihan klinis dan 21 hingga 7% untuk pemulihan sosial. Dengan demikian, ada variabilitas yang cukup besar dalam tingkat pemulihan, terutama untuk pemulihan sosial / fungsional.

Shah dan Tank (n.d.) memperkenalkan konsep pelatihan kembali (*retraining*) pada lansia. Program pelatihan kembali, para lansia diberikan satu pelatihan tetapi bukanlah mengajarkan satu keterampilan yang betul-betul baru. Pelatihan yang diberikan bertujuan sebagai stimulasi fungsi kognitif, afektif, psikomotor dan memperbaiki lingkungan sosialnya agar lebih ramah dan memahami lansia.

Secara neurologis, rutinitas menciptakan kejenuhan pada otak, sehingga pendekatan *retraining* mencoba mendesain ulang rutinitas menjadi hal baru yang lebih merangsang kognitif, psikomotor dan emosi. Penurunan fungsi karena penuaan berdampak pada defisit keterampilan hidup sehari-hari, karena itu perlu diajarkan dan dilatihkan kembali. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan terjadi proses kehilangan dan penurunan kemampuan yang drastis. Pelatihan kembali dapat membantu lansia mempertahankan atau memperlambat proses kehilangan kemampuan tersebut. Program ini dapat dijalankan oleh tenaga profesional atau pendamping/*care giver* yang terlatih.

Kognitif Retraining

Kognitif *retraining* dimaksudkan untuk membantu lansia yang mengalami penurunan kognitif. Tehnik ini dapat meningkatkan keterampilan kognitif klien, meningkatkan fungsi memori, meningkatkan orientasi visuo-spasial, dan meningkatkan fungsi eksekutif

1. Meningkatkan Fungsi Memori

Para lansia dapat diminta membuat *dairy* dan mencatat beberapa peristiwa penting atau hal lain yang ingin diingat. Lansia yang mengalami kesulitan dalam mengingat nama-nama anggota keluarganya, dapat dibantu membuat pohon keluarga dan menuliskan nama semua anggota keluarganya. Ketika lansia kesulitan dalam mengingat nama seseorang, dia bisa merujuk ke pohon keluarga. Seseorang dapat menempatkan papan di pintu ruangan di rumah seperti dapur, kamar tidur, kamar mandi dan lain-lain. Lansia dapat diajarkan metode lain untuk mengingat seperti menggunakan tehnik mnemonik atau menggunakan *retrieval clues* untuk mengingat hal-hal tertentu. Sebagai latihan untuk meningkatkan memori lansia, dapat didorong untuk memainkan 'permainan memori berupa kartu memori' atau permainan memori di komputer. Lanjut usia yang baru saja mengalami gangguan memori dapat dilatih untuk mengulang sesuatu dan membicarakannya kembali setiap beberapa menit. Kerabat dan teman-teman lansia agar tidak jengkel dan mempermalukan lansia, serta senantiasa mencoba mengalihkan perhatian serta menangani situasi seperti itu dengan lebih sabar dan tenang.

2. Meningkatkan Orientasi Visuo-Spasial

Lansia yang mengalami masalah orientasi visuo-spasial kemungkinan akan tersesat saat bepergian. Mereka mungkin naik ke bus ke arah berlawanan, turun dari bus sebelum atau setelah pemberhentian

dari tujuan yang sebenarnya, dan lain-lain. Tergantung pada jenis kesulitan yang dialami, seorang terapis dapat mengawal klien melewati rute perjalanan tertentu dan membantunya mengenali/mengingat *landmark*/petunjuk tertentu agar lansia dapat bepergian secara mandiri. Lansia juga dapat diberikan kartu peta dan petunjuk arah lengkap dengan nomor kontak yang dapat dihubungi. Dalam hal kesulitan mencari alamat, lansia dapat menunjukkan kartu itu kepada seorang polisi atau penjaga toko dan meminta bantuan.

3. Meningkatkan Fungsi Eksekutif

Fungsi atau kemampuan eksekutif dapat diterjemahkan sebagai keterampilan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan. Fungsi eksekutif ini dapat disesuaikan untuk terapi pada lansia. Berbagai permainan seperti ludo, catur, *draft*, catur cina, teka-teki, permainan kartu, dan lain-lain adalah permainan yang membutuhkan keterampilan eksekutif. Sehingga, memainkan permainan-permainan ini dapat membantu lansia dalam meningkatkan fungsi eksekutifnya.

Demikian pula, dari waktu ke waktu, di bawah pengawasan dan bimbingan, mereka dapat didorong untuk merencanakan dan mengorganisir kegiatan atau acara seperti kegiatan perkumpulan lansia, arisan, seminar kesehatan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka akan fungsi-fungsi eksekutif.

Motor Retraining

Motor retraining adalah upaya untuk membantu lansia dalam mengatasi masalah terkait fungsi psikomotorik dengan memfasilitasinya dengan aktivitas yang dapat meningkatkan kecepatan, akurasi dan koordinasi dan meningkatkan mobilitas.

1. Meningkatkan Kecepatan, Akurasi, dan Koordinasi

Banyak permainan di komputer yang menuntut peningkatan kecepatan dan akurasi. Biasanya permainan-permainan ini memiliki level yang bertingkat. Di level awal, permainan berjalan lambat dan ketika seseorang ingin mengembangkan kecepatan dan akurasi, seseorang dapat berpindah ke level yang lebih tinggi. Memainkan permainan-permainan ini secara teratur dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan koordinasi. Kegiatan seperti menggambar, melukis, kerajinan, membuat patung, dan lain-lain juga dapat meningkatkan keterampilan ini.

2. Meningkatkan Mobilitas

Seiring pertambahan usia dan karena penurunan syaraf motor dan sensori maka pergerakan mobilitas harus banyak dilakukan penyesuaian. Latihan statis (*static exercises*) seperti yoga dan latihan dinamis (*dynamic exercises*) seperti berjalan, lari, aerobik dapat digunakan untuk meningkatkan mobilitas. Berpartisipasi dalam permainan *outdoor* seperti, tennis, senam lansia dan lain-lain juga sangat bermanfaat. Saat diperlukan, dapat menggunakan prostesis dan perangkat berjalan (*walking devices*) untuk meningkatkan mobilitas. Pijat juga bermanfaat untuk meremajakan tubuh dan meningkatkan mobilitas.

Emotional Retraining

Emotional Retraining lebih ditujukan pada kemampuan anggota keluarga atau *caregiver* untuk meningkatkan harga diri dan rasa berguna pada lansia, meningkatkan kemampuan menghadapi perilaku lansia yang menantang, serta meningkatkan kemampuan *caregiver* menghadapi situasi sulit serta kemampuan memberikan dukungan kepada lansia.

1. Meningkatkan Harga Diri dan Rasa Berguna

Salah satu bagian terpenting rehabilitasi lansia adalah meningkatkan harga diri dan membuat lansia merasa kehadirannya diperlukan sebagai bagian dari anggota masyarakat yang berguna. Setiap anggota keluarga mestinya memperlakukan mereka sebagai kepala keluarga dengan senantiasa meminta pendapat, nasihat, dan bimbingan dari para lansia. Sesekali atau secara rutin diajak bersama untuk jalan-jalan atau mengikuti acara-acara tertentu. Para lansia juga dapat diamanahkan beberapa tanggungjawab sesuai dengan minat dan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pandangan teori aktivitas yang menekankan pentingnya peran serta lansia dalam kegiatan masyarakat. Lansia perlu diberikan peran yang akan membantu untuk mempertahankan dan meningkat harga dirinya, jika peran ini hilang sama sekali akan berdampak negatif. Peran disini dapat diaplikasikan dalam bentuk interaksi yang berkualitas dari sekedar kuantitas dan lebih informal ketimbang formal.

Keluarga dan pekerja sosial juga perlu menerapkan pola komunikasi positif yang dapat meningkatkan harga diri lansia seperti menyapa. Berhati-hati jika mengomentari sikap atau kebiasaan lansia yang negatif apalagi di depan umum atau bersama lansia lain serta hindari perbuatan atau panggilan yang merendahkan lansia. Penting juga untuk menanyakan hal-hal yang disenangi dan tidak disenangi serta biasakan pada lansia untuk memberikan pilihan dan jikapun terpaksa sebaiknya diberikan dua pilihan walaupun keduanya mirip satu sama lain. Hargai privasi lansia dan jika lansia tinggal di panti upayakan untuk dilengkapi dengan barang/benda pribadi seperti foto keluarga (Tamher dan Noorkasiani, 2008).

2. Meningkatkan Kemampuan Keluarga Menghadapi Perilaku yang Menantang dari Lansia

Lanjut usia kadang-kadang menunjukkan perilaku kekanak-kanakan atau perilaku kurang dapat diterima secara sosial (*disinhibited behavior*). Seseorang mungkin dapat menerapkan prinsip terapi perilaku dalam situasi semacam ini. Sebagai contoh, jika seorang nenek menuntut membeli permen benang dan bersikeras memakannya sambil berjalan di tempat umum. Hal ini dapat memermalukan anggota keluarga yang menyertainya. Dalam situasi seperti ini kita dapat mengizinkannya membelinya, dengan syarat bersedia memakannya ketika tiba di rumah. Anggota keluarga atau kerabat sering berurusan atau mengatasi perilaku lansia yang kurang bisa diterima secara sosial. Demikian pula, jika seorang kakek mengganti pakaiannya di depan umum atau keluar dari kamar mandi tanpa handuk, seseorang mungkin harus sedikit waspada dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah *disinhibited behavior* ini. Demikian pula ketika seorang lansia menuduh salah seorang kerabat atau pembantu telah mencuri ketika tidak dapat menemukan salah satu barang miliknya. Dalam situasi seperti itu, kita berusaha tenang, jangan kesal dan tersinggung, tetapi bantu dia untuk menemukannya.

Hal ini sejalan dengan teori penyesuaian individu dan lingkungannya yang dikemukakan oleh Lawton et al. (1982) bahwa terdapat hubungan antara kompetensi individu dengan lingkungannya. Kompetensi yang dimaksud adalah segala ciri fungsional individu seperti, kekuatan ego, keterampilan motorik, kesehatan biologis, kapasitas kognitif, dan fungsi sensorik. Setiap individu memiliki tingkat kompetensi

yang membutuhkan tingkatan suasana/tekanan yang menguntungkan atau nyaman baginya. Kompetensi yang rendah hanya mampu bertahan atau menjadi nyaman pada level tekanan lingkungan yang rendah pula, sebaliknya juga begitu. Oleh karena itu para pendamping atau keluarga lansia dapat melakukan penilaian terhadap kompetensi lansia dan menciptakan suasana lingkungan baik fisik maupun sosial yang selaras dengan kompetensi tersebut (Tamhaer dan Noorkasiani, 2008).

3. Meningkatkan Kemampuan Anggota Keluarga dalam Menghadapi Situasi Sulit dan Memberikan Dukungan Emosional

Beberapa anggota keluarga mungkin *over-protective* dan tidak mengizinkan lansia melaksanakan aktivitas secara mandiri padahal masih mampu. Pada kasus lain, beberapa anggota keluarga terlalu berlebihan dan terus mengutuk lansia tanpa menyadari bahwa perilaku tersebut bukan karena kesengajaan tetapi karena penurunan fungsi kognitif. Dalam situasi seperti itu, konseling keluarga sangat penting untuk program rehabilitasi yang efektif.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan serta mempertahankan kemampuan pada lansia baik dari aspek kognitif, psikomotor dan emosional maka diperlukan adanya program *retraining* yang difasilitasi oleh tenaga profesional atau *caregiver* yang terlatih. Bentuk-bentuk yang diperlukan lansia meliputi kognitif *retraining*, motor *retraining* dan emosional *retraining*. Sehingga para lansia dapat menjalani masa tuanya dengan bahagia, merasa berguna dan tetap produktif dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2015). *Statistik Penduduk*

Lanjut Usia 2014, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Barker, R., L. (1987). *The Social Work Dictionary*. Silver Spring, MD. National Social Work Association Inc.

Berat, V., Neškoviü-Konstantinoviü, Z., Nedoviü, G., Rapaiü, D., dan Marinkoviü, D. (2015). Social Functioning of Elderly Persons with Malignant Diseases. *Vojnosanitetski Pregled. Military-Medical and Pharmaceutical Review* 72(1):33-39. Retrieved from <http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0042-8450/2015/0042-84501501033B.pdf>

Crawford, K. dan Walker, J. (2008). *Social Work with Older People [2nd ed.]. Transforming Social Work Practice*. Learning Matters, Exeter

Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. (2011). *Pelayanan Sosial Lanjut Usia*. Kementerian Sosial.

Dubois, B., dan Miley, K., K. (1992). *Social Work: An Empowering Profession*. Allyn And Bacon. Boston.

Friedman, J. I., Harvey, P. D., McGurk, S. R., White, L., Parrella, M., Raykov T., et al. (2002). "Correlates of Change in Functional Status of Institutionalized Geriatric Schizophrenic Patients: Focus on Medical Co-Morbidity". *American Journal of Psychiatry*, 159, 1388-1394.

Graham C, Arthur A, Howard R. (2002). "The Social Functioning of Older Adults with Schizophrenia". *Aging and Mental Health* 6 (2) 149-52. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12028883>

Harding, C. M. (2003). "Changes in

- Schizophrenia Across Time: Paradoxes, Patterns, and Predictors”. In C. I. Cohen (Ed.), *Schizophrenia Into Later Life: Treatment, research, and policy*, 19-41.
- Harvey, P. D. (2005). *Schizophrenia in Late Life: Aging Effects on Symptoms and Course of Illness*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Jariatun, H. (2015). Problem Keberfungsian Sosial Lansia di Panti Wreda Budhi Darma Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/15678/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Komisi Nasional Lanjut Usia. (2010). *Profil Penduduk Lanjut Usia 2009*. Jakarta: Komnas Nasional Lanjut Usia;
- Lawton, M.,P., Lawton, M.,P., Windley, P.,G., Byerts, T.,O. (1982). “Competence, Environmental Press, and the Adaptation of Older People”. *Aging and the Environment*. New York: Springer (pg. 33-59)
- Maslim, R. (2013). *Diagnosa Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5*. Jakarta: Nuh Jaya.
- Meesters, P., D., Stek, M., L., Comijs, H., C., Haan, Ld., Patterson, T., L., Eikelenboom, P., dan Beekman, A., T., F. (2010). “Social Functioning Among Older Community-Dwelling Patients with Schizophrenia: A Review”. *The American Journal Geriatric Psychiatry*, 18 (10) 862–878.
- Muthia, G., Krisnani, H., dan Meilani, L. (2016). Peran Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Lansia di PSTW Budi Darma Bekasi. *Prosiding KS. Riset dan PKM (3)* 292-428. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13776/6579>.
- Ponnuswami, I., Francis, A., dan Udhayakumar, P. (2012). *Strengths-based Approach to Social Work Practice with Older Persons*. In: Pulla, Venkat, Chenoweth, Lesley, Francis, Abraham, and Bakaj, Stefan, (eds.) *Papers in Strengths Based Practice*. Allied Publishers, New Delhi, India, pp. 150-161. Retrieved from <https://researchonline.jcu.edu.au/25554/>
- Kementerian Kesehatan RI (2017). *Situasi dan Analisis Lanjut Usia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
- Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik. (2016). *Profil penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Indonesia: Berdasarkan data Susenas tahun 2015*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
- Kementerian Sosial. (2015) *Rencanan Strategis Kementerian Sosial 2015-2019*. Jakarta: Biro Perencanaan.
- Sale, E. (2003). “Family Burden and Quality of Life”. *Quality of Life Research*, 12, 33-41
- Shah, N. dan Tank, P. (n.d.). *Rehabilitation and Residential Care Needs of the Elderly: Clinical Practice Guidelines*. Retrieved from http://www.indianjpsychiatry.org/cpg/cpg2007/CPG-GtiPsy_16.pdf
- Suheli, U. (2016). Pelayanan Publik Bidang Sosial Lanjut Usia pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan (Desertasi: Program Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar).

Tamher, S., dan Noorkasiani. (2008). *Kesehatan Usia Lanjut dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.

Tiwari, S., C. dan Sonal, A. (2018). "Clinical Practice Guidelines for Addressing the Rehabilitation Needs of Elderly in the Indian Context". *Indian Journal of Psychiatry*, 60 (3) 410-425. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5840914/>

METODE RESTORASI GAMBUT DALAM KONTEKS MITIGASI BENCANA KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEATLAND RESTORATION METHOD IN THE CONTEXT OF PEATLAND FIRE DISASTER MITIGATION AND COMMUNITY EMPOWERMENT

Febri Yuliani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
E-mail : febby_sasha@yahoo.co.id

Aulia Rahman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jalan Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630
E-mail: rahman.aulia12@gmail.com

Abstrak

Indonesia menyumbang 47 % dari luas lahan gambut tropis dunia dan menjadi negara keempat yang memiliki lahan gambut terluas di dunia. Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Lahan gambut di Indonesia memberi banyak manfaat karena menyediakan hasil hutan berupa kayu dan nonkayu, menyimpan dan mensuplai air, menyimpan karbon, dan merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna langka yang hanya ada dijumpai pada ekosistem ini. Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dan rapuh, karena lahan ini berada dalam suatu lingkungan rawa, yang terletak di belakang tanggul sungai. Pada kurun waktu kurang lebih dua puluh tahun terakhir, kegiatan konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas (*pulp wood*) diperkirakan telah merusak lahan gambut dengan segala fungsi ekologisnya. Sepanjang Juni sampai November tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menurut *World Bank* ditaksir kerugian mencapai Rp. 221 triliun. Pada umumnya kebakaran ini terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebab kebakaran tersebut disinyalir dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja oleh oknum perusahaan perkebunan dan masyarakat untuk membuka lahan perkebunan, pembersihan dan penyuburan lahan dengan cara membakar. Selain itu, kemarau yang ekstrim dan angin kencang mendorong perluasan daerah terdampak kebakaran. Artikel ini merupakan sebuah studi pustaka yang mendeskripsikan bagaimana metode restorasi memiliki kaitan dengan proses mitigasi bencana kebakaran lahan gambut dan bagaimana metode restorasi dapat memberdayakan masyarakat lokal. Ada 5 langkah dalam merestorasi gambut yaitu: 1) memetakan gambut, 2) menentukan jenis, pelaku, dan rentang waktu pelaksanaan restorasi, 3) membasahi gambut (*rewetting*), 4) menanam lahan gambut (*revegetasi*), dan 5) memberdayakan masyarakat lokal. Restorasi merupakan sebuah metode rehabilitasi khusus kebakaran hutan dan lahan gambut yang didalam prosesnya terdapat kegiatan yang mendukung mitigasi bencana. Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Masyarakat jangan hanya dibebani untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut namun juga diberikan manfaat dari kegiatan pencegahan itu. Kegiatan Restorasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana, dapat dimulai melalui penanaman kembali hutan dan lahan gambut yang terdampak dengan tanaman-tanaman semusim (pada umumnya hortikultura) dan disandingkan dengan tanaman pohon yang dapat mengurangi kuantitas karbon atau mampu menyerap karbon serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, pembangunan lahan penampung air dalam kubah gambut yang berfungsi sebagai sumber pembasahan lahan gambut, dapat dimanfaatkan untuk perikanan darat oleh masyarakat setempat.

Kata Kunci: bencana kebakaran hutan dan lahan, mitigasi bencana, restorasi gambut, pemberdayaan masyarakat.

Abstract

Indonesia has 47% of the world's tropical peatland and it becomes the fourth country with the largest peatland in the world. The area of peatland in Indonesia is estimated to be 20.6 million hectares or about 10.8 percent of Indonesia's land area. The peatland in Indonesia provides many advantages as it provides timber and non-timber forest products as

well as stores water and carbon supplies It also becomes a habitat for biodiversity with variety of rare flora and fauna which can only be found in this ecosystem. Peatland is a unique and fragile ecosystem as it is located in a swamp environment behind a river embankment. The conversion of peatland into agricultural land, palm oil plantation and pulpwood over the past twenty years is thought to have damaged peatland with all its ecological functions. World Bank estimated the forest and land fires occurring in Indonesia from June to November, 2005 lost this country up to IDR 221 trillion. The fires generally occurred in Sumatra and Kalimantan. The causes of the fires were allegedly committed intentionally and accidentally by unscrupulous plantation companies and communities. Their purpose was to open plantation land and to clear as well as to enrich the land by burning it. In addition, extreme drought and strong wind encouraged the expansion of fire affected areas. This article is a literature study describing how the restoration method has linked to the mitigation process of peatland fires and how the restoration methods can empower local communities. There are 5 steps in peatland's restoration: 1) mapping the peatland, 2) determining the type, actors, and restoration timeframe, 3) rewetting the peatland, 4) planting the peatland (revegetation), 5) empowering local communities. Restoration is a special method of forest and peatland fire rehabilitation in which there are the activities that support disaster mitigation. Community empowerment has an important role to prevent forest and peatland fires. Communities should not only be burdened to prevent forest and peatland's fires, but also provided the advantages of preventive activities. Restoration activities related to disaster mitigation can be initiated through replanting affected forests and peatlands with seasonal crops and mixed with the plants that can reduce carbon or absorb carbon and that have high economic value. In addition, the construction of water reservoirs within the peat domes that serve as a source of wetting of peatlands can be utilized for onshore fisheries by local communities.

Keywords: forest and land fire disaster, disaster mitigation, peatland restoration, community empowerment.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kawasan gambut terluas keempat di dunia setelah Kanada 170 juta hektare, Uni Soviet 150 juta hektare, dan Amerika Serikat 40 juta hektare (Mubekti, 2011, dan Herman, 2016). Kawasan hutan gambut Indonesia dikenal dengan sebutan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan gambut terluas di dunia. Asia Tenggara menjadi kawasan pemilik lahan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas 56 % dari total lahan gambut tropis dunia. Indonesia sendiri menyumbang 47 % dari luas lahan gambut tropis dunia, membuatnya menjadi Negara pemilik gambut terbesar di kawasan Asia Tenggara (Badan Restorasi Gambut RI, 2016).

Luas lahan gambut di Indonesia diperkirakan 20,6 juta hektar atau sekitar 10,8 persen dari luas daratan Indonesia (Subagjo, 1998; Wibowo dan Suyatno, 1998 dalam Wahyunto et al, 2004; Herman, 2016).

Indonesia merupakan negara yang memiliki kawasan gambut terluas di antara negara tropis.

Kawasan gambut ini tersebar di Kalimantan, Sumatera dan Papua (Agus dan Subiksa; 2008).

Lahan gambut termasuk vegetasi yang tumbuh di atasnya merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi untuk pelestarian sumber daya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendali iklim, melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon (Wahyunto *et al.*, 2004).

Lahan gambut di Indonesia memberi banyak manfaat karena menyediakan hasil hutan berupa kayu dan non kayu, menyimpan dan mensuplai air, menyimpan karbon, dan merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna langka yang hanya ada dijumpai pada ekosistem ini.

Pada kurun waktu kurang lebih dua puluh tahun terakhir, kegiatan konversi lahan gambut menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan kayu kertas (*pulp wood*) diperkirakan telah merusak lahan gambut dengan segala

fungsi ekologisnya. Pada sisi yang lain, lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang unik dan rapuh, karena lahan ini berada dalam suatu lingkungan rawa, yang terletak di belakang tanggul sungai. Pembukaan lahan gambut melalui penebangan hutan (*land clearing*) dan *drainase* yang tidak hati-hati akan menyebabkan penurunan permukaan (*subsiden*) yang cepat, pengeringan yang tak dapat balik (*irreversible drying*), dan mudah terbakar (Mubekti, 2011).

Sepanjang Juni sampai dengan November 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menurut *World Bank* ditaksir kerugian mencapai Rp. 221 triliun (Badan Restorasi Gambut RI, 2016). Pada umumnya kebakaran ini terjadi pada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebab kebakaran tersebut disinyalir dilakukan secara sengaja oleh oknum perusahaan perkebunan dan masyarakat. Menurut Nursyamsi *et al.* (Badan Restorasi Gambut, 2016), sampai satu dasawarsa belakangan ini lahan gambut lebih banyak dikelola oleh perusahaan skala besar yang melakukan kegiatan perkebunan kayu dan kelapa sawit. Oknum perusahaan perkebunan dan masyarakat membuka lahan perkebunan, pembersihan dan penyuburan lahan dengan cara membakar.

Cara yang salah ini didukung oleh cuaca panas dan angin kencang sehingga membuat areal terdampak kebakaran semakin meluas pada daerah yang termasuk lahan gambut sehingga membutuhkan waktu lama untuk penanggulangannya. Menurut Agus dan Subiksa (2008), hutan dan lahan gambut dapat terbakar karena kesengajaan atau ketidaksengajaan dan faktor pemicu parahnya kebakaran hutan dan lahan gambut adalah kemarau yang ekstrim misalnya pada tahun El-Nino dan/ atau penggalan *drainase* lahan gambut secara berlebihan.

Akibat kebakaran ini tidak hanya mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat, kebakaran juga mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengancam keberadaan flora dan fauna. Asap kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu penduduk negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kedua negara ini pun mengirimkan nota protes terhadap pemerintah Indonesia serta menawarkan bantuan secara teknis dalam proses pemadaman kebakaran.

Studi literatur ini menggambarkan bagaimana metode restorasi memiliki kaitan dengan proses mitigasi bencana kebakaran lahan gambut dan bagaimana metode restorasi dapat memberdayakan masyarakat lokal.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PERMENLHK RI) No. P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut, menyebut bahwa Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

Kompleksitas ekosistem gambut membawa dampak terhadap dinamika pengelolaannya. Terdapat dua variabel yang menunjukkan posisi kebijakan gambut di Indonesia, yaitu nilai keberlanjutan (*Sustainable Value*) dan nilai

pembangunan (*Development Value*) (Indrarto, 2015). Diskursus yang mengiringi kebijakan yang ada saat ini, diilhami oleh pengalaman di masa lalu yang telah membawa Indonesia berada pada titik kelam pengelolaan gambut. Akhirnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) yang dinilai banyak pihak merupakan kebijakan yang progresif terhadap orientasi konservasi. Tidak hanya sampai disitu, pemerintah kemudian merevisi PP ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Selanjutnya, Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) merupakan dasar dari unit perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kompleksitas kegiatan pada KHG seperti hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, pemukiman, infrastruktur, dan lain-lain menjadi tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini, karena wacana yang terbangun sudah menjurus kepada kontestasi antara fungsi lindung dan fungsi budidaya. Para-pihak terkait tentu memiliki peran yang vital.

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) menurut Pasal 1 ayat 3 dalam Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI No. P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.

Presiden Joko Widodo memberikan perlindungan total pada hutan alam, **lahan gambut** dan daerah pesisir. Melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.494-MENLHK-PHPL-2015, pemerintah melarang pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut untuk pembangunan

usaha kehutanan dan perkebunan. Selain itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis lahan gambut akibat kebakaran secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Badan Restorasi Gambut bertugas mencapai tiga sasaran restorasi, yaitu: (1) pemulihan hidrologi, vegetasi dan daya dukung sosial-ekonomi ekosistem gambut yang terdegradasi; (2) perlindungan ekosistem gambut bagi penyangga kehidupan; (3) penataan ulang pengelolaan (pemanfaatan) ekosistem gambut secara berkelanjutan. Dari tugas tersebut, objek yang dikelola oleh BRG adalah Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) (Badan Restorasi Gambut RI, 2016).

Manajemen Bencana

Terdapat 3 sistem utama yang mengalami kerugian akibat bencana yaitu lingkungan fisik (*physical environment*), sosial kependudukan (*socio-demographic*), dan lingkungan terbangun (*built environment*). Karakteristik dari ketiga sistem tersebut menentukan derajat atau tingkat kerugian dari sebuah bencana alam (Mileti dan Peek-Gottschlich, 2001), Ketiga sistem dimaksud terdiri dari::

1. Lingkungan fisik: Sistem ini berkaitan dengan proses fisik alami bumi yang selalu berubah dan dinamis, seperti perubahan iklim dan proses geologi. Kedinamisan pada sistem ini berimplikasi pada kondisi yang tidak menentu pada suatu lingkungan hidup.
2. Sosial kependudukan: Sistem ini berkaitan dengan distribusi dan komposisi penduduk yang mempengaruhi jumlah dan karakteristik penduduk yang terkena bencana.
3. Lingkungan terbangun: Sistem ini berkaitan dengan kepadatan bangunan dan fasilitas

umum yang menentukan besarnya kerusakan yang akan terjadi dalam sebuah peristiwa alam. *Hyogo Framework for Action 2005-2015*, mengungkapkan bahwa kerugian bencana akan semakin besar oleh kerentanan yang disebabkan oleh perubahan demografi, kondisi sosial ekonomi dan teknologi, pembangunan pada zona bahaya tinggi, degradasi lingkungan, perubahan iklim, bahaya geologi, kelangkaan sumberdaya, dan dampak epidemi.

Tacconi (2003) menyebutkan bahwa terdapat tiga masalah utama akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yaitu; 1) pencemaran kabut asap, emisi karbon dan dampak terkait lainnya; 2) degradasi hutan, deforestasi dan hilangnya hasil hutan; dan 3) kerugian di sektor pedesaan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, Rahman (2016) menyebutkan bahwa kegiatan penanggulangan bencana alam tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu bangsa atau negara tertentu tetapi merupakan tanggung jawab seluruh umat manusia karena penanggulangan bencana alam merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan atau kehumanitarian sehingga hal ini mendorong beberapa negara untuk melakukan gerakan untuk bersama-sama proaktif terhadap penanggulangan bencana melalui Deklarasi Hyogo atau dikenal juga dengan kerangka kerja Hyogo (*Hyogo Framework for Action/HFA 2005 - 2015*). Berikut ini adalah lima prioritas aksi utama aksi Hyogo (APEC, 2009), 1) *Make Disaster Risk Reduction as Priority*; 2) *Know The Risk and Take Action*; 3) *Build Understanding and Awareness*; 4) *Reduce Risk*; dan 5) *Be Prepared and Ready to Act*. Kemudian dilanjutkan dengan Deklarasi Sendai yang menghasilkan kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana (2015 - 2030) dengan 4 prioritas aksi (BNPB, 2015), antara lain: 1) Memahami risiko bencana; 2) Penguatan tata kelola risiko; 3) Investasi

PRB untuk Resiliensi; dan 4) Meningkatkan manajemen risiko.

Manajemen pengelolaan bencana (*disaster management*) merupakan suatu siklus dalam upaya penanggulangan bencana. Carter (Rahman, 2016) mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan atau aplikatif yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, pemulihan dan pembangunan kembali. Selanjutnya, Carter menyebutkan bahwa tujuan dari manajemen bencana di antaranya, yaitu mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

Naryanto (LPPS-KWI, 2001) juga mengatakan bahwa penanggulangan bencana atau sering disebut sebagai *disaster management* merupakan suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan rangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan (*preventive*), mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*response*), rehabilitasi (*rehabilitation*) atau evakuasi, dan pembangunan kembali (*development*).

Selain itu, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Kemudian dalam undang-undang tersebut, menjelaskan upaya-upaya penanggulangan bencana, antara lain :

1. Kesiapsiagaan (Pasal 1 ayat (7)) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna..
2. Peringatan dini (Pasal 1 ayat (8)) adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
3. Mitigasi (Pasal 1 ayat(9)) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
4. Tanggap darurat bencana (Pasal 1 ayat (10)) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5. Rehabilitasi (Pasal 1 ayat (11)) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
6. Rekonstruksi (Pasal 1 ayat (12)) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah

pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.



Gambar 1. Siklus Penanggulangan Bencana

Sumber: Rahman, 2015.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana dapat disimpulkan sebagai sebuah siklus proses manajemen yang berisi tentang kegiatan pencegahan (*preventive*), mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), tanggap darurat (*response*), rehabilitasi (*rehabilitation*) atau evakuasi, dan pembangunan kembali (*development*) pada 3 (tiga) periode yakni sebelum bencana (prabencana), saat bencana, dan setelah bencana (pascabencana).

Terkait dengan manajemen bencana kebakaran lahan gambut khususnya pada rehabilitasi bencana, ada suatu upaya untuk mengembalikan kondisi hutan dan lahan gambut yang terbakar yang sering disebut restorasi. Bagaimana hubungan mitigasi dengan restorasi?

Restorasi Gambut

Restorasi gambut merupakan proses untuk mengembalikan fungsi ekologi lahan gambut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dari menyusutnya lahan gambut. Jika dipahami dari sisi definisi, restorasi merupakan upaya yang sama dari tahapan manajemen bencana yang disebut rehabilitasi. Tetapi, pada tahap restorasi, melekat juga unsur-unsur mitigasi yakni pada 5 langkah restorasi hutan dan lahan gambut.

Center for International Forestry Research/ CIFOR (pantaugambut.id, n.d.) menyampaikan langkah-langkah dalam merestorasi gambut yaitu: 1) memetakan gambut; 2) menentukan jenis, pelaku, dan rentang waktu pelaksanaan restorasi, 3) membasahi gambut (*rewetting*); 4) menanam lahan gambut (*revegetasi*); 5) memberdayakan masyarakat lokal.

Langkah pertama, yaitu pemetaan hutan dan lahan gambut. Pemetaan lahan gambut sangat diperlukan agar bisa menentukan lokasi gambut yang menyusut dan mengetahui tipe serta kedalamannya. Pemetaan hutan dan lahan gambut, dapat membantu mengurangi berkurangnya area lahan gambut akibat konversi lahan melalui kebijakan-kebijakan yang tepat guna berlandaskan temuan-temuan kajian lahan gambut. Pemetaan ini juga merupakan langkah awal yang rumit, karena kondisi gambut yang berbeda memerlukan jenis restorasi yang berbeda pula, misalnya dalam menentukan letak pembuatan sekat kanal untuk mengatur kadar air.

Agar bisa melakukan upaya restorasi yang tepat, maka masyarakat harus menggunakan metodologi yang tepat juga. Seperti yang pemerintah lakukan yaitu, menciptakan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), agar memudahkan perlindungan dan pengelolaan gambut.

Langkah yang kedua, menentukan jenis, pelaku, dan rentang waktu pelaksanaan restorasi, Setelah melakukan pemetaan gambut, pelaku restorasi dapat menentukan jenis restorasi yang sesuai dengan kondisi gambut. Ada gambut yang melewati proses pembasahan terlebih dahulu ada pula yang langsung di tanam ulang, dan ada juga yang melalui proses pembersihan gambut, misalnya gambut terkena kepingan sisa tumbuhan, daun, ranting, atau kayu maka gambut harus di bersihkan terlebih dahulu. Setelah menentukan jenis restorasi, lalu menentukan pemangku mana saja yang terlibat. Kemudian menentukan rentang waktu pelaksanaan restorasi, misalnya yang pemerintah tetapkan sekarang ini menentukan rentang waktu selama lima tahun.

Langkah yang ketiga, yaitu membasahi gambut (*rewetting*). Membasahi kembali lahan gambut perlu dilakukan agar gambut tetap lembab dan tetap terjaga manfaatnya juga agar gambut sulit terbakar. Pada langkah ini, yang kita lakukan adalah menata air. Menata air dengan cara membuat sekat kanal, agar air tetap berada di lahan gambut dan membantu daerah yang mengalami kekeringan air.

Terkait dengan langkah pembasahan lahan gambut, Widjaja-Adhi (Agus dan Subiksa, 2008) menyarankan agar wilayah ekosistem lahan gambut dibagi menjadi 2 kawasan yaitu: kawasan nonbudidaya dan kawasan budidaya. Kawasan nonbudidaya terdiri dari (a) jalur hijau sepanjang pantai dan tanggul sungai dan (b) areal tampung hujan yang luasnya minimal 1/3 dari seluruh kawasan. Kawasan yang dijadikan sebagai areal tampung hujan adalah bagian kubah gambut (*peat dome*) sehingga harus menjadi kawasan konservasi. Kubah gambut berfungsi sebagai penyimpan air (*resevoir*) yang bisa mensuplai air bagi wilayah di sekitarnya, terutama pada musim kemarau, baik untuk air minum maupun usaha tani. Pada musim hujan

kawasan ini berfungsi sebagai penampung air yang berlebihan sehingga mengurangi risiko banjir bagi wilayah di sekitarnya. Hal ini dimungkinkan karena gambut memiliki daya memegang air sangat besar yaitu sampai 13 kali bobot keringnya. Perlindungan terhadap kawasan tampung hujan akan menjamin kawasan sekitarnya menjadi lebih produktif.

Langkah yang keempat, penanaman kembali lahan gambut (*revegetasi*); Setelah proses *rewetting* selesai maka lahan gambut dapat ditanami oleh tanaman semusim yang ramah gambut seperti nanas, kakao, kopi dan lain sebagainya (Agus dan Subiksa, 2008). Penanaman lahan gambut agar menjaga keberlangsungan ekosistem gambut, memperkokoh sekat kanal, serta melindungi lahan gambut dari kikisan aliran air kanal.

Langkah yang terakhir, yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Tak hanya berhenti pada pulihnya ekologi dan penanaman ulang, restorasi juga harus memperhatikan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, agar terciptanya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik.

Hubungan Restorasi Gambut dan Mitigasi Bencana

Mitigasi merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana, yang dilakukan dengan membuat bangunan/struktur dan membangun kapabilitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk menghindari dan atau mengurangi resiko dari bencana.

Pada Gambar 1. digambarkan bahwa mitigasi merupakan awal mula dari proses pencegahan pada siklus penanggulangan bencana. Carter (Rahman, 2016) mendefenisikan mitigasi sebagai tindakan yang bertujuan mengurangi dampak dari bencana alam atau bencana buatan manusia pada suatu bangsa atau masyarakat.

Selain itu, Carter (Rahman, 2016) membagi mitigasi menjadi dua cara, yaitu mitigasi fisik dan mitigasi nonfisik. Mitigasi fisik (*Structure Mitigation*) merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan meminimalisir risiko bencana dan dampaknya melalui pembangunan infrastruktur. Mitigasi nonfisik (*Nonstructure Mitigation*) merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki metode khusus dalam penanganannya, terutama dalam proses pencegahan. Oleh karena itu, metode yang digunakan tidak hanya memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana namun juga bersanding dengan aspek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk menerapkan pencegahan bencana yang berkelanjutan. Maka masyarakat menjadi komponen utama dalam proses pencegahan ini. Mitigasi sebagai salah satu komponen pada sistem pencegahan mengedepankan peran masyarakat.

Mengutip istilah Carter (2008), masyarakat sebagai “*disaster front*” dalam penanggulangan bencana karena masyarakat yang paling mengetahui karakter tempat tinggal dan keadaan sosial yang ada. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan salah satu bentuk dari mitigasi nonfisik. Pada upaya restorasi, kegiatan pemetaan hutan dan lahan gambut, menentukan jenis, pelaku, dan rentang waktu pelaksanaan restorasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diasumsikan sebagai upaya mitigasi nonfisik

Sementara itu, mitigasi fisik yang dilakukan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dilakukan dengan membangun sistem pengelolaan tata air (*water management*) yang berfungsi sebagai pendukung program membasahi hutan dan lahan gambut (*rewetting*) serta penanaman kembali (*revegetasi*) hutan dan lahan gambut yang terdampak kebakaran. Sistem pengelolaan tata air dapat dilakukan dengan membangun sumur dan kanal air sehingga hutan dan lahan gambut dapat terjaga kelembabannya. Sedangkan penanaman hutan dan lahan gambut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem gambut dan dilakukan penanaman dengan tanaman yang dapat menyesuaikan dengan kondisi gambut dan juga memiliki dampak sebagai pendorong dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Jadi, metode restorasi bukan merupakan metode mitigasi secara penuh, melainkan sebuah metode rehabilitasi khusus kebakaran hutan dan lahan gambut yang didalam prosesnya terdapat kegiatan yang mendukung mitigasi bencana. Hal ini terlihat pada upaya mitigasi yang terdiri dari mitigasi fisik dan nonfisik dalam suatu bencana merupakan upaya yang sama dengan restorasi dimana didalamnya memiliki upaya yang bersifat fisik dan nonfisik juga.

Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam restorasi hutan dan lahan gambut adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat ini juga merupakan bentuk dari mitigasi nonfisik. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan menjadi tujuan tambahan untuk memperkuat peran masyarakat pada upaya menjaga hutan dan lahan gambut dari kemungkinan bencana kebakaran.

Menurut Fahrudin (2012), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan

dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
3. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Kemudian, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial karena tidak hanya membangun dari aspek ekonomi namun juga menggugah aspek sosial masyarakat, seperti yang diutarakan Mardikanto (2014), bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan pada enam poin, yaitu:

1. Perbaiki kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan

memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnisilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Upaya restorasi hutan dalam lahan gambut yang terkena kebakaran tidak hanya melihat dari sisi bencana saja, namun juga menyasar sisi pemberdayaan lingkungan dan masyarakat sekitar hutan dan lahan gambut. Pada upaya restorasi terdapat dua langkah yang bisa memacu masyarakat untuk membantu pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut sekaligus memberdayakan potensi masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Dua upaya itu yakni, pada langkah *revegetasi* dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Dua tahap ini memiliki keterkaitan, sehingga tahapan ini harus dilakukan dengan kesinambungan.

Pada tahap *revegetasi* dapat dilakukan dengan melakukan penanaman tanaman semusim dan pohon-pohonan. Balai Besar Litbang SDLP (Badan Restorasi Gambut, 2016) merekomendasikan penanaman tanaman semusim atau tanaman pangan harus disesuaikan dengan jenis kedalaman gambut. Tanaman semusim, merupakan jenis tanaman yang mampu menambat jumlah karbon dan pohon-pohonan yang mampu menyerap karbon dan tidak menyerap air secara besar seperti sagu dan karet. Hal ini ditegaskan oleh Agus dan Subiksa (2008), tanaman pohon-pohonan menyumbang karbon lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman semusim. Namun karena sawit memerlukan *drainase* yang relatif dalam, maka penambatan karbon oleh tanaman sawit jauh lebih rendah dibandingkan dengan emisi karena terdekomposisinya gambut. Dengan demikian, gabungan dari tanaman yang menambat CO₂ dalam jumlah banyak serta yang toleran dengan *drainase* dangkal atau tanpa *drainase* seperti sagu dan karet, merupakan pilihan utama dalam konservasi lahan gambut. Oleh karena itu, pada hutan dan lahan gambut yang terkena bencana kebakaran tidak disarankan ditanam kembali dengan pohon sawit.

Jenis tanaman semusim dan pepohonan seperti padi, cabe, terong dan lain sebagainya serta sagu dan karet tidak hanya mampu mengendalikan karbon namun juga berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam restorasi lahan gambut khususnya untuk peningkatan ekonomi berkaitan erat dengan *revegetasi*.

Pembuatan areal tampung hujan pada kubah gambut (*peat dome*) dan sekat kanal pada aliran air sungai yang berguna untuk proses pembasahan hutan dan lahan gambut pada musim kemarau dapat juga dimanfaatkan

secara ekonomi. Potensi ini dapat digunakan untuk perikanan darat bagi masyarakat sekitar hutan dan lahan gambut.

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Hal ini ditegaskan oleh Susanto (Kompas, 27 April 2018) bahwa kalau masyarakat diajak mencegah kebakaran hutan tetapi tidak diberi manfaat, itu akan sulit. Kesejahteraan perlu diberikan atau diperhatikan. Oleh karena itu, ada beberapa program seperti Desa Siaga Api yang muncul pada tahun 2016, kemudian berkembang pada tahun 2017 menjadi Desa Makmur Peduli Api. Kedua Program dikembangkan oleh pihak swasta sebagai bentuk dari *Community Sosial Responsibility (CSR)* perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat (Kompas, 27 April 2018) yang bertujuan agar masyarakat dapat membuka lahan tanpa membakar dan dapat memperoleh manfaat.

Kebijakan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak swasta, pihak pemerintah khususnya Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat juga menumbuhkan sikap *awareness* dari masyarakat dengan menginisiasi pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Desa Siaga Bencana khususnya pada masyarakat yang berada di sekitar hutan dan lahan gambut, serta untuk permodalan usaha dapat dibantu dengan intervensi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan juga pihak pemerintah melalui bank-bank nasional menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu permodalan masyarakat sekitar hutan dan lahan gambut namun harus dipastikan jika lahan itu merupakan lahan budidaya atau lahan yang dapat dikelola oleh masyarakat bukan lahan hijau.

Keterlibatan berbagai pihak termasuk masyarakat diyakini mampu mereduksi kasus

kebakaran hutan dan lahan gambut. Sebagai contoh, titik panas di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat pada 2015 mencapai 213. Namun, pada 2016 titik panas turun menjadi 23 dan tahun 2017 sebanyak 12. Selain itu, laporan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyebutkan bahwa titik panas yang terpantau dari citra satelit pada kasus kebakaran hutan dan lahan turun signifikan, tahun 2015 terpantau 70.971 titik panas, tahun 2016 sebanyak 3.884 dan tahun 2017 sebanyak 2.370 (Kompas, 27 April 2018).

PENUTUP

Penurunan kuantitas titik panas rentang tahun 2015 sampai dengan 2016 menjadi *starting poin* bahwa mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan gambut melalui restorasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kebakaran hutan dan lahan gambut memang memerlukan penanganan secara khusus. Kegiatan restorasi haruslah mendukung upaya mitigasi yang dilakukan dengan tidak hanya terfokus pada hutan dan lahan gambut yang rentan terhadap bencana namun juga harus menggandeng masyarakat sekitar hutan dan lahan gambut. Masyarakat tidak hanya diberikan edukasi akan bahaya membuka lahan dengan cara membakar namun juga harus diberikan informasi mengenai bagaimana mengelola hutan dan lahan gambut untuk mencegah terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan gambut.

Restorasi hutan dan lahan gambut tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologi hutan dan lahan gambut namun juga sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat lokal.

Kegiatan Restorasi yang berkaitan erat dengan mitigasi bencana kebakaran hutan

dan lahan gambut, dapat dimulai melalui penanaman hutan dan lahan gambut yang terdampak dengan tanaman-tanaman semusim (pada umumnya hortikultura) dan disandingkan dengan tanaman pohon yang dapat mengurangi kuantitas karbon atau mampu menyerap karbon serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat seperti sagu dan karet.

Selain itu, pembangunan lahan penampung air dalam kubah gambut yang berfungsi sebagai sumber pembasahan lahan gambut, dapat dimanfaatkan untuk perikanan darat oleh masyarakat setempat. Jadi, upaya mitigasi bencana yang beririsan dengan proses restorasi tidak hanya membebankan pada partisipasi masyarakat tetapi juga memberikan manfaat atas keterlibatan dari masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat ini menjadi poin penting dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan lahan gambut.

Proses restorasi yang membantu pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui konsep *Government to Government* atau lintas lembaga pemerintah. Salah satu contoh, Kementerian Sosial dapat ikut serta dalam kegiatan restorasi dengan inisiasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program KUBE dapat menyoal masyarakat sekitar hutan dan lahan gambut. Program ini tidak hanya bertujuan secara ekonomi tetapi juga meningkatkan ikatan sosial anggota KUBE dan lingkungannya. Selain itu, pelibatan unsur swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal permodalan usaha dan juga pendampingan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, F. dan I.G. M. Subiksa. (2008). *Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan*. Bogor: Balai Penelitian Tanah dan *World Agroforestry Centre (ICRAF)*.

Asia Pacific Economy Community. (2009). *Strategy for Disaster Risk Reduction and Emergency Preparedness and Response in the Asia Pacific region 2009 to 2015*. Lima: APEC.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2015). *Kerangka Kerja Sendai (2015-2030) untuk Pengurangan Risiko Bencana*. Jakarta: BNPB RI.

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia. (2016). *Rencana Strategis Restorasi Gambut 2016-2020*. Jakarta: BRG RI.

----- (2016). *Mengawali Restorasi Gambut Indonesia: Laporan Tahunan 2016*. Jakarta: BRG RI.

Carter, W. N. (2008). *Disaster Management: "A Disaster Managers Handbook"*. Manila: Asian Development Bank.

Fahrudin, Adi. (2010). *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Herman. (November, 2016). "Upaya Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Gambut Melalui Pengembangan Industri Perkebunan Sagu". *Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Jilid I Tahun 2016*, LPPM Universitas Lambung Mangkurat, 54 – 61.

Indrarto, Giorgio Budi. (2015). *Aspek Legalitas dari Perlindungan dan Pengelolaan Gambut di Indonesia (Presentasi Power Point)*. IPN Toolbox Tema A Subtema A3. Diakses melalui www.cifor.org/ipn-toolbox.

LPPS-KWI dan CORDAID. (2001). "Penanganan Bencana: Kumpulan Bahan-Bahan Pelatihan Penanganan Bencana", *Seri Forum LPPS* Nomor 43.

Mardikanto, Totok. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.

- Mileti, Dennis dan Peek-Gottschlich, Lori. (2001). *Hazards and Sustainable Development in the United States*. Risk Management: An International Journal, 3 (1) January. <https://doi.org/10.1057/palgrave.rm.8240077>.
- Mubekti. (2011). "Studi Pewilayahan dalam Rangka Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Provinsi Riau". *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 13, No. 2, Agustus 2011, 88 – 94*.
- Pantau Gambut (n.d). <http://www.pantaugambut.id/pelajari/pemulihkan-lahan-gambut/langkahlangkah-restorasi-gambut>, diakses tgl. 02 Mei 2018.
- Rahman, Aulia. (2015). *Analisis Pelaksanaan Mitigasi Bencana Melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi untuk Mendukung Ketahanan Daerah* (Tesis Program Pascasarjana Pengkajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia).
- (2016). "Peran Taruna Siaga Bencana Dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Sukabumi". *Jurnal Sosio Konsepsia Vol.6 No.01 September-Desember 2016, 56 – 74*.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.
- Subagjo, H. (1998). *Karakteristik Bio-Fisik Lokasi Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Pasang Surut, Sumatera Selatan*. Pusat Penelitian dan Agroklimat. Tidak dipublikasikan.
- Tacconi, L. (2003). *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo (2004). "Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan/ Map of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Kalimantan, 2000 – 2002". *Wetlands International, Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada (WHC)*.
- Wibowo, P. dan N. Suyatno. (1998). "An Overview of Indonesian Wetlands Sites – II". *Wetlands International – Indonesia Programme (WI-IP)*.
- Susanto, Yang. (2018, April 27). *Fokus pada Kesejahteraan*. Kompas, 12.

KARYA TULIS UNTUK PENELITI

PAPERS FOR RESEARCHER

Achmadi Jayaputra

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jalan Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630
E-mail: jachmadi@yahoo.co.id

Abstrak

Seorang peneliti diwajibkan menyusun karya tulis sebagai bukti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai insan yang memiliki kepakaran di bidangnya. Karya tulis biasanya terdiri atas dua yaitu; buku dan makalah. Dilihat dari pengalaman melakukan penilaian angka kredit selalu ditemukan ketidak sesuai hasil karya tulis ilmiah dengan penilaian angka kredit. Kadang-kala ada yang sulit diselesaikan. Seringkali buku dan makalah disusun belum sesuai dengan kaidah dalam penilaian angka kredit peneliti, sehingga perlu disikapi sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dalam menyusun karya tulis. Tulisan ini dapat sebagai jawaban atas berbagai hal yang muncul dalam menulis untuk diterbitkan. Diakui dalam penelitian sosial selalu disesuaikan dengan kepentingan lembaga masing-masing, sehingga tidak ada acuan yang baku dalam menerbitkan buku atau makalah. Oleh karena itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika penelitian.

Kata kunci: karya tulis, penelitian, etika penelitian.

Abstract

A researcher is required to write a paper to be an evidence for the execution of his duties and function as an expert in a certain field. The papers usually consist of two types, namely: books and papers. Based on the experience of doing credit assessment, the incompatibility between papers and credit assessment is always found. Sometimes, some of them are difficult to resolve. The books and papers are often arranged not in accordance with the rules of the researcher's credit assessment. Therefore, it needs some efforts to improve and to conform them with the rules. This paper aims to give an understanding to prepare the papers. This paper may be as a response to all of the problems that appear in writing for publication. The social research must be adapted with each institution so that there is no standard regulation to publish books or papers. Consequently, the books and papers should be guided by laws and research ethics.

Keywords: papers, research, research ethics.

PENDAHULUAN

Menyusun karangan sebagai suatu seni berpikir bagi orang tertentu. Bentuk karangan yang lazim yaitu buku dan artikel. Buku tersusun secara sistematis terdiri dari bab atau bagian terdiri atas puluhan bahkan ratusan halaman. Isinya sesuai dengan bidang bahasannya seperti ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, agama, dan lain-lain. Artikel bentuknya lebih sederhana ditandai terdiri atas satu halaman atau paling banyak 15 halaman. Isinya merupakan buah pikiran penulis yang tersusun

secara ringkas tentang sesuatu hal. Biasanya artikel hanya terdiri dari satu atau dua halaman atau lebih dari itu. Seperti selebaran, brosur dan sebagainya. Tetapi ada juga yang lebih dari itu seperti koran dan majalah. Isinya padat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pengarangnya.

Dilihat dari sifatnya ada yang ilmiah dan populer. Membahas artikel atau tulisan ilmiah harus hati-hati karena diatur dalam ketentuan yang berlaku secara khusus dan umum. Sebab isinya ditujukan untuk kalangan tertentu

seperti peneliti, widyaiswara, dan dosen. Artikel yang populer, biasanya ditujukan untuk kalangan umum dalam penyusunannya lebih longgar. Memang ada orang yang dengan mudah menyusun artikel secara cepat dan ada pula yang memerlukan waktu. Itulah yang dimaksudkan sebagai seni yang harus disusun sendiri penulisnya.

Banyak cara yang dilakukan dalam memenuhi hasrat penulisan karangan. Akan tetapi, penulisan memerlukan kaidah yang khusus yang disebut sebagai karya tulis ilmiah. Berlaku pada kalangan ilmiah di lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Kedua lembaga tersebut mempunyai kekhususan dibanding dengan lembaga lain yang juga menerbitkan karangan.

Khusus penulisan hasil penelitian telah ada lembaga yang membina peneliti dalam menyusun karya tulis yang memenuhi kualitas tulisan bertaraf nasional dan internasional. Mencapai tujuan tersebut, sebagai peneliti masih merasa dibebani dengan berbagai aturan yang dirasakan agak berat. Menyimak pengalaman selama ini, khususnya dalam penilaian karya tulis ilmiah ada perbedaan antara instansi penelitian dan pengembangan dengan penilaian instansi pembina. Oleh karena itu perlu dipahami, bahwa penulisan karya ilmiah hasil penelitian perlu diafahami bersama. Tujuannya agar, peneliti atau penulis karya ilmiah dapat menyusun sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Pembelajaran menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan antara penulisan bagi peneliti dan dosen. Hal ini disebabkan tujuan yang berbeda. Di lembaga penelitian dan pengembangan, karya tulis ilmiah dinilai sebagai unsur utama. Khususnya bagi peneliti ilmu sosial, karya tulis dalam bentuk buku dinilai lebih tinggi dengan kualitas yang baik satu buku dinilai sampai 30 atau 50 angka kredit. Sedangkan bagi dosen di perguruan tinggi

merupakan hasil dari Tri Dharma Perguruan Tinggi ketiga sebagai kegiatan tambahan dari mengajar di depan kelas. Nilainya 10–15 angka kredit dari karya dosen. Bahasan tentang karya tulis ilmiah dalam penelitian sosial bersumber dari aturan yang ditetapkan lembaga pembina peneliti. Diharapkan dapat menjadi model dalam menyusun karya tulis sesuai dengan kepentingan peneliti.

PENGERTIAN

Penulisan karya ilmiah (Kinayati Djojoseuroto dan MLA Sumaryati, 2000) adalah penulisan umum yang berlaku di lingkungan akademik. Harus memulainya dari penelitian. Tujuan penelitian, yaitu menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan fakta dan data. Oleh sebab itu, dalam penelitian ilmiah harus menggunakan metode ilmiah yaitu *logico hipotetico verifikatif* (deduktif-induktif). Artinya semua penelitian dikatakan ilmiah apabila melibatkan dua wilayah teori (deduktif) dan wilayah empiris (induktif) (Apridar, dkk: 2008: 6).

Metode merupakan suatu cara, alat atau teknik untuk menuangkan pikiran. Pemikiran tersebut diwujudkan dalam bentuk tulisan yang mempunyai kekhususan yang terkait dengan analisis dan kesimpulan terhadap suatu gejala. Semua yang disajikan memiliki cara berfikir berdasarkan kaidah-kaidah penelitian. Sebab secara umum peneliti selalu mempunyai rasa ingin tahu dan menemukan hal-hal baru. Pengetahuan yang baru ditemukan menjadikan peneliti selalu berpikir ke depan dan mencari kemajuan dengan cara berpikir ilmiah dan metode ilmiah.

Metode ilmiah suatu perwujudan atau formulasi metode berpikir yang berguna untuk menarik kesimpulan yang benar. Metode ilmiah

merupakan alat untuk mengambil kesimpulan, menjelaskan dan menganalisis masalah yang juga merupakan alat untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah; berdasarkan fakta, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesa, menggunakan ukuran objektif, menggunakan lekoik kuatitatif (Komaruddin, dan Yooke TS Komaruddin; 2007: 150; Apridar, dkk: 2008: 6).

Metode ilmiah penelitian dan pengembangan adalah cara pelaksanaan penelitian yang sistematis dan objektif dengan mengikuti tahapan (2014);

- a. melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan metode yang direncanakan
- b. menyusun hipotesis bila diperlukan
- c. menyusun rancangan penelitian dan/atau pengembangan
- d. melaksanakan penelitian dan/atau pengembangan berdasarkan metode yang direncanakan
- e. melaksanakan pengamatan dan/atau mengumpulkan data dan/atau melakukan percobaan
- f. menganalisis dan menginterpretasi data
- g. merumuskan simpulan dan/atau teori
- h. melaporkan hasilnya.

Khusus penelitian dan pengembangan tulisan ilmiah dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Merujuk Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti disebutkan; Karya tulis ilmiah yang selanjutnya disingkat KTI adalah tulisan hasil penelitian dan pengembangan dan/atau tinjauan, ulasan (*review*), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.

Penjelasan selanjutnya jenis karya tulis terdiri dua. Pertama, hasil penelitian dan

pengembangan yang disusun berdasarkan jenisnya. Formatnya disusun sesuai dengan keperluan. Isinya mengacu pada pustaka secara komprehensif dan mencerminkan perkembangan menyeluruh di bidang keilmuannya serta memproyeksikan dampak dan menawarkan solusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis. Dijelaskan secara keseluruhan dan lengkap tentang subjek yang diulas dan dikaji. Dilihat dari bentuknya terdiri atas; buku, bunga rampai, makalah, dan prosiding. Pengembangan teknis penulisan karya tulis ilmiah disesuaikan dengan gaya selingkung yang berlaku di setiap lembaga penelitian dan pengembangan, pengelola majalah ilmiah, dan lembaga penerbit.

1. Buku dan Makalah

Menyimak Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Berdasarkan format terbagi lima yaitu; makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. Berdasarkan sistematikanya terdiri dari tujuh yaitu; buku ilmiah, bunga rampai, makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. Istilah dan pengertian yang ditampilkan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan lembaga pembina penelitian dan pengembangan Indonesia tersebut.

Terkait dengan penilaian karya tulis hasil penelitian atau pemikiran ilmiah tercantum dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Terdapat 11 butir kegiatan yang dapat diajukan tertinggi 40 angka kredit dan terendah satu angka kredit. Satuan hasil kegiatan hanya dalam dua bentuk yaitu; buku dan makalah.

a. Buku

Buku (*liber, boek, book*) merupakan suatu alat komunikasi yang terlihat dalam bentuk lembaran-lembaran yang dijilid dan berisi tulisan tangan atau cetakan (Komaruddin, dan Yooke TS Komaruddin; 2007: 150).

Secara umum buku dan makalah hasil penelitian dan pengembangan termasuk karya tulis ilmiah. Sebab penulisnya sebagai peneliti dan akademisi yang menggunakan metode ilmiah. Oleh karena itu pembahasan tentang karya tulis terbagi dua yaitu: buku dan makalah. Buku dilihat dari bentuknya sangat jelas karena ada buku tebal ditandai dengan halamannya banyak dan ada buku tipis pastinya lebih dari 10 halaman atau kurang dari 20 halaman. Buku cirinya antara lain; dijilid, ada sampul luar (*cover*) dan sampul belakang, ada halaman, dan isinya membahas tentang suatu ilmu pengetahuan tertentu. Dilihat dari jenisnya seperti buku acara, buku acuan, buku catatan, buku harian, buku pedoman, buku telepon, dan lain-lain.

Buku ilmiah memenuhi syarat administrasi sebagai berikut; dikeluarkan suatu lembaga penerbitan penelitian dan pengembangan instansi pemerintah atau swasta nasional atau internasional, memiliki *International Standard Book Number* (ISBN), melewati proses editorial yang mencakup kebenaran keilmuan dan tata bahasa, serta isinya paling sedikit 49 halaman.

Unsur buku ilmiah yaitu;

- 1) Sampul luar, sampul dalam, dan sampul belakang. Masing-masing memiliki ciri khas. Sampul luar hanya terdiri atas; judul, penulis dan penerbit. Sampul dalam lebih lengkap berisi tentang; peraturan

karya cipta, Katalog Dalam Terbitan (KDT), ISBN, penyunting, penulis, penerbit, tahun terbit, nama dan alamat lembaga penelitian dan penerbit. Sampul belakang berisi sinopsis dan atau catatan dari para ahli atau orang tertentu.

- 2) Kata Pengantar. Terutama pengantar penerbit dan pengantar penyunting (*Editor*). Berikut dapat ditambah pengantar dari kepala instansi, beberapa orang ahli atau penulisnya sendiri. Ucapan terima kasih atau penghargaan tertentu dalam pengantar kepala lembaga atau pengantar penulis. Biasanya terhadap lembaga, informan, responden, dan lain-lain.
- 3) Daftar isi dan atau daftar tabel
- 4) Isi buku yang terdiri dari bagian pendahuluan, batang tubuh, dan penutup
- 5) Indeks
- 6) Glosarium (*opsional*)
- 7) Daftar Acuan atau Daftar Pustaka
- 8) Lampiran (*opsional*)

Disebutkan, bahwa buku ilmiah yang diterbitkan minimal 300 eksemplar. Penulisan buku ilmiah disesuaikan dengan keperluan dan kepentingan lembaga yang bersangkutan. Termasuk isi buku, lembaga atau penulisnya dapat menentukan dan menetapkan teknik penulisan sesuai dengan kaidah ilmiah. Hanya saja dalam buku ilmiah tidak boleh menyertakan foto terlalu banyak, cukup beberapa lembar. Sering juga mencantumkan biografi penulis dan penyunting, tempatnya di halaman terakhir buku.

Bunga Rampai. Bunga rampai adalah kumpulan Karya Tulis Ilmiah dengan satu topik permasalahan dengan

pendekatan dari beberapa aspek atau sudut pandang keilmuan. Sistematika yang dipublikasikan memiliki unsur-unsur yang sama dengan bentuk buku ilmiah, tetapi memiliki perbedaan dalam prakata (Prolog) dan penutup (Epilog) yang merupakan analisis atas keseluruhan isi. Masing-masing bab atau bagian dapat berdiri sendiri dengan susunan Karya Tulis Ilmiah lengkap dan ada benang merah yang mengaitkan keseluruhan bab. Karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk bunga rampai mempunyai makna yang mandiri dan jelas. Bunga rampai bentuknya sama dengan buku ilmiah.

Unsur bunga rampai yaitu;

- 1) Sampul luar, sampul dalam, dan sampul belakang. Sampul luar dapat ditulis kata bunga rampai atau ditulis di sampul dalam atau kata pengantar.
- 2) Kata Pengantar. Secara berurutan yaitu; pengantar penerbit, pengantar penyunting, pengantar kepala instansi, dan atau penulisnya sendiri.
- 3) Daftar isi dan atau daftar tabel
- 4) Isi buku yang terdiri atas; pembuka wacana atau prakata (prolog), batang tubuh, dan penutup (epilog). Biasanya berupa bab atau bagian makalah yang disajikan berdiri sendiri sesuai dengan temanya.
- 5) Indeks
- 6) Glosarium (*opsional*)
- 7) Lampiran (*opsional*)

Biasanya bunga rampai ada seorang penyunting yang hanya membuat kata pengantar atau menulis di bagian prolog. Batang tubuh ditulis dalam bagian atau bab atau tulisan berurutan sesuai dengan temanya. Selain itu daftar pustaka harus masuk dalam tiap tulisan. Tiap

tulisan disebutkan antara lain; judul, penulis, lembaga penulis bekerja, dan keahliannya.

Prosiding. Prosiding (*Proceeding*) adalah kumpulan Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan sebagai hasil suatu pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah yang dimaksud ada yang membahas beberapa hasil penelitian dan pengembangan atau pertemuan yang membahas topik tertentu.

Unsur prosiding yaitu;

- 1) Sampul luar, sampul dalam, dan sampul belakang. Sampul luar dapat ditulis prosiding tema pertemuan ilmiah, judul tema, dan penyunting.
- 2) Kata Pengantar. Terutama pengantar penerbit dan pengantar penyunting. Berikut boleh ditambah pengantar dari kepala instansi, bisa seorang atau beberapa orang ahli terpilih atau penulisnya sendiri.
- 3) Daftar isi dan atau daftar tabel
- 4) Isi buku yang terdiri dari bagian pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Pendahuluan, biasanya berisi laporan panitia dan sambutan-sambutan. Isi batang tubuh, biasanya berisi makalah-makalah yang dibahas dalam pertemuan ilmiah. Penutup, biasanya membahas tentang hasil pertemuan ilmiah dan rekomendasi.
- 5) Indeks
- 6) Glosarium (*opsional*)
- 7) Lampiran (*opsional*)

Bedanya dengan buku ilmiah dan bunga rampai, prosiding di bagian kulit belakang tidak ditulis sinopsis, dan tidak ada biografi penulis atau penyunting. Selain itu lampiran sering juga dicantumkan panitia dan jadwal acara.

b. Makalah

Ada dua pengertian yaitu istilah kertas kerja dan makalah. Kertas kerja (*paper; working paper*) berupa; 1. Selebar kertas kerja yang berisi pernyataan tertulis atau tercetak; 2. Suatu karya tulis yang digunakan untuk publikasi jurnal atau priodikal atau lisan. Kertas kerja perlu mengutarakan pendirian penulisnya dengan singkat, tidak bertele-tele, tidak canggih dan dengan tangkas menunjukkan keseluruhan pandangan dan argumentasinya. Kertas kerja disebut juga makalah (Komaruddin, dan Yooke TS Komaruddin; 2007: 111).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2014) memberi pengertian makalah lengkap adalah tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil penelitian dan pengembangan dan/atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain. Topik yang dibahas berupa topik baru yang menambah informasi baru dan/atau memperkuat temuan/topik sebelumnya.

Unsur penting makalah yaitu:

- 1) Judul
- 2) Nama dan alamat penulis
- 3) Abstrak dan kata kunci
- 4) Pendahuluan
- 5) Metode
- 6) Hasil dan Pembahasan
- 7) Kesimpulan dan Rekomendasi
- 8) Daftar acuan

Dilihat dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Pedoman tersebut membedakan antara kajian kebijakan dan makalah kebijakan. Perbedaannya pada unsur penulisan. Harus difahami

oleh peneliti yang akan mengajukan atau mengusulkan sebagai angka kredit. Pengusul harus melampirkan yaitu: makalah, jadwal acara, undangan atau daftar hadir, dan surat tugas.

Makalah disajikan pada situasi yang membahas tentang hasil penelitian dan pengembangan atau kajian tertentu. Biasanya makalah disajikan antara lain pada acara; diskusi kelompok terfokus, diskusi, seminar, simposium, kolokium, dan konferensi. Ada makalah yang disusun penulis untuk diterbitkan dalam majalah ilmiah. Makalah tersebut dikenal dengan istilah artikel yang harus dikirim ke majalah ilmiah, terutama yang terakreditasi oleh LIPI. Oleh karena itu penulis perlu mencermati gaya selingkung majalah ilmiah tersebut, agar artikel diterima redaksi untuk dimuat dalam majalah tersebut.

Perbedaan kajian kebijakan terdiri atas delapan unsur yaitu; judul, nama penulis, ringkasan eksekutif, permasalahan, pembahasan atau komentar, rekomendasi, lampiran (opsional), dan daftar acuan. Sedangkan makalah kebijakan terdiri atas sembilan unsur yaitu: nama instansi penulis, judul, nama penulis, ringkasan eksekutif, latar belakang, pembahasan, rekomendasi, implementasi, dan lampiran (opsional).

Kertas kerja (*Working paper*) Australian Aid (2016) dengan judul Mengatasi Hambatan Penelitian di Universitas, terdiri atas delapan unsur;

- 1) Pesan Kunci
- 2) Ringkasan Eksekutif
- 3) Singkatan dan Akronim
- 4) Pengantar
- 5) Kajian Literatur
- 6) Konsultasi dengan Kelompok

Konsultatif

- 7) Kesimpulan dan Langkah ke depan
- 8) Daftar Pustaka

Ada makalah yang lebih sederhana bentuknya dapat dinilai sebagai angka kredit termasuk dalam rangka memasyarakatkan hasil penelitian dalam buku atau majalah semi populer. Di dalam keterangan disebutkan makalah memuat informasi pengetahuan dan teknologi yang dimasyarakatkan dan kajian kebijakan (*policy brief*). Ciri khususnya terdiri atas tiga sampai lima halaman, memuat keterangan yang sangat ringkas. Unsur dalam penulisannya tidak ada yang sama. Biasanya disesuaikan dengan kepentingan lembaga yang bersangkutan.

Beberapa contoh;

- 1) Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara
Judul: Menuju Arsitektur Regulasi yang Lebih Baik untuk Kesejahteraan Rakyat (2014, empat halaman). Isinya;
 - Abstrak
 - Permasalahan
 - Kerangka Pikir Analisis
 - Alternatif Penyelesaian Masalah
 - Prioritas Peraturan Perundang-undangan yang perlu Diperbaiki
- 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Judul: Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan (2015, empat halaman). Isinya:
 - Konsep
 - Pelaksanaan
 - Rekomendasi

- 3) Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Judul: Penyusunan Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah dalam Menghadapi *Asean Economic Community (AEC)*(2015, empat halaman). Isinya:

- Pendahuluan
- Pendekatan dalam Penyusunan Standar Kompetensi
- Identifikasi Kompetensi
- Rekomendasi dan Rencana Aksi

- 3) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)

Judul: Transformasi Administrasi Peningkatan Inovasi (Transformasi) (2015, dua halaman). Isinya:

- Tantangan
- Tujuan
- Pendekatan
- Hasil yang Dicapai

- 4) Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan

Judul: Strategi Penataan Kebijakan Nasional (2015, dua halaman). Isinya:

- Latar Belakang
- Rekomendasi Jangka Pendek
- Rekomendasi Jangka Panjang
- Kesimpulan

- 5) Pusat Kajian Reformasi Administrasi

Judul: Minat Mahasiswa Terhadap Profesi Pegawai Negeri Sipil (2015, empat halaman). Isinya:

- Urgensi Kebutuhan Sumber Daya Manusia
- Instansi Pilihan Kerja Mahasiswa
- Alasan Mahasiswa Memilih

Instansi Pemerintah

- Alasan Mahasiswa Memilih Instansi Swasta
- Implikasi Kebijakan

2. Terbitan dan Etika

Semua terbitan cetak dan rekam, termasuk karya tulis yang disusun peneliti harus disimpan dan disampaikan kepada khalayak. Wajib simpan sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pengertiannya, karya cetak adalah semua jenis terbitan dari karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan untuk disimpan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

Kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dijelaskan, setiap penerbit yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 2 (dua) buah setiap judul kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan. Memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut, maka peneliti wajib menyimpan dan menyerahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Oleh karena itu penerbit buku hasil penelitian harus menyampaikan lagi ke; konsultan, penyunting, Perpustakaan Sekretariat Negara, perpustakaan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, unit operasional terkait kementerian atau lembaga, lembaga pemerintah terkait

di provinsi dan kabupaten/kota lokasi penelitian, dan perpustakaan lembaga sosial lain yang terkait.

Secara sederhana peneliti merupakan individu yang memiliki kecakapan tertentu sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. Peneliti menuangkan ide dan gagasannya melalui suatu tulisan dalam bentuk buku untuk disebarluaskan atau makalah untuk dibahas dan disebarluaskan dalam pertemuan ilmiah. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibekali dengan acuan yang disebut kode etika peneliti. Peneliti harus mengacu pada dua etika yaitu; Kode Etika Peneliti dan Kode Etika Publikasi Ilmiah. Terkait dengan kode etika tersebut perlu mendapat perhatian serius, sehingga tiap peneliti dapat melakukan tugas dan fungsinya.

Etika dalam tiga hal (LIPI, 2013) yaitu;

a. Etika dalam Penelitian;

- 1) Peneliti membaktikan diri pada pencarian, kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia,
- 2) Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya,
- 3) Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa

tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.

b. Etika dalam Berprilaku;

- 1) Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya,
- 2) Peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan nonhayati secara bermoral, berbuat baik sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan,
- 3) Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif,

c. Etika dalam Kepengarangan;

- 1) Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama,
- 2) Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi atau berganda atau diulang-ulang,
- 3) Peneliti memberikan pengakuan

melalui; penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.

Selama ini disinyalir masih ada peneliti yang melaksanakan penelitian tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga disebutlah peneliti tidak jujur. Perilaku tidak jujur baik perilaku tidak jujur dalam penelitian maupun perilaku curang sebagai peneliti. Perilaku peneliti tidak jujur tampak dalam bentuk; pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*), pemalsuan data penelitian (*falsification*), pencurian proses, objek dan/atau hasil (*plagirism*), pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (*exploitation*), perbuatan tidak adil (*injustice*), kecerobohan yang disengaja (*intended careless*), dan pemublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran (*duplication*).

Penegakan sanksi dilakukan dengan empat cara yaitu; penyelidikan awal keseriusan dugaan pelanggaran, konfirmasi kesahihan informasi dugaan pelanggaran, pengumpulan fakta meyakinkan, dan pembentukan panel penilai. Di LIPI sudah terbentuk Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (MPEP) berperan dalam penerapan dan penegakan Kode Etika Peneliti serta menyelesaikan sengketa pelanggaran Kode Etika Peneliti pada tingkat pusat/nasional. Pembentukan bertujuan; menerapkan dan menegakkan Kode Etika Peneliti untuk mejamin profesionalisme peneliti dengan segala kebebasan asasi yang dimilikinya; menyelesaikan sengketa terkait etika

peneliti di tingkat nasional sesuai dengan kaidah dan norma komunitas peneliti global. Fungsinya; badan independen yang memeroses laporan tertulis dai Lembaga Penelitian Non-Kementerian/ Lembaga Penelitian Kementerian (LPNK/LPK) atau dari manapun terkait dugaan pelanggaran Kode Etika Peneliti; otoritas tertinggi untuk menegakkan Kode Etika Peneliti di Indonesia.

Selain itu peneliti juga harus memahami tentang kode etik publikasi ilmiah. Sesuai dengan Peraturan Kepala Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah. Terkait dengan jurnal majalah ilmiah ada kode etika yang ditujukan terhadap empat unsur yaitu; pengelola, editor, mitra bestari, dan pengarang. Khusus pengarang dalam jurnal ilmiah adalah seseorang yang menuangkan hasil-hasil pemikiran dan/atau penelitian dan pengembangannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Keberadaan seorang pengarang akan diakui setelah hasil penelitiannya diterbitkan. Publikasi hasil penelitian dan pengembangan dapat dipertanggungjawabkan oleh pengarang yang terlibat di dalamnya. Seorang pengarang wajib melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara baik.

PENUTUP

Penelitian sebagai suatu profesi yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kaidah ilmiah. Penelitian menghasilkan suatu keterangan yang perlu diketahui khalayak atas suatu hal yang baru atau dibarukan, sehingga akan diketahui secara luas. Hasilnya berupa buku atau

makalah yang disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah atau dalam majalah ilmiah. Penulisan berpedoman terhadap kaidah ilmiah ilmiah, terutama penegakan etika penelitian yang harus dijunjung tinggi. Perilaku jujur dan bertanggung jawab menjadikan peneliti dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridar, dkk, 2008. *Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*. Lhokseumawe; Unimal Press.
- Epstein, Jason, 2012. *Reading the Digital Future* (Terjemahan; Andreas Haryono). Jakarta; IKAPI DKI Jakarta.
- Holt, Robert Lawrence, 2011. *Mempersiapkan Naskah untuk Diterbitkan* (Terjemahan; Herman Sudrajat). Jakarta; IKAPI DKI Jakarta
- Komaruddin, dan Yooke TS Komaruddin, 2007. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Majelis Profesor Riset, 2015. *Panduan Penulisan Naskah Orasi Profesor Riset*. Jakarta; LIPI Press.
- Wiliam, Alan D, dkk, 2011. *Menjadi Penerbit* (Terjemahan; Herman Sudrajat). Jakarta; IKAPI DKI Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan;

- Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparat Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1991
Tentang Pelaksanaan Undang Undang
RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994
Tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1999
Tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan
Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera
atau Film Dokumenter

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan
Penelitian Kesejahteraan Sosial Nomor
05/BKS/SK/01/2014 Tentang Pedoman
Kerja Tim Penilai Peneliti Kementerian
Sosial RI.

Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2011
Tentang Akreditasi Majalah Ilmiah

Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2012
Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah

Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013
Tentang Kode Etika Peneliti

Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013
Tentang Pedoman Klirens Etik
Penelitian dan Publikasi Ilmiah

Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Peneliti

Peraturan Kepala LIPI Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan
Berkala Ilmiah

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah.

Surat Edaran Kepala LIPI Nomor 5782/K/

HK/XII/2012 Tentang Penjelasan
Atas Hasil Kerja Minimal Standar
Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti
Berdasarkan Peraturan Kepala LIPI
Nomor 04/E/2009 Tentang Standar
Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti

PEDOMAN BAGI PENULIS

PROSEDUR

1. Artikel berupa karya ilmiah dengan ranah hasil kajian, konseptual dan pemikiran bidang permasalahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan belum pernah dipublikasikan di majalah ilmiah lain.
2. Artikel merupakan karya orisinal (bukan plagiat), tidak sedang diproses dalam majalah ilmiah lain dan belum pernah dipublikasikan
3. Mencantumkan biodata penulis yang berisi : nama lengkap, nama instansi, alamat instansi dan email.
4. Penulis wajib mengisi formulir pernyataan orisinalitas KTI, *ethical statement*, *copywrite transfer* dan *proof reading*.
5. Tulisan menggunakan format A4, *times new roman (12)*, spasi 1.5 dan minimal 10 halaman.
6. Sistematika Penulisan sebagai berikut
 - a. **Judul** (dua bahasa; Indonesia dan Inggris dengan huruf Kapital)
 - b. **Abstrak** (dua bahasa) terdiri dari :
Pembukaan, masalah & tujuan, materi, hasil dan kesimpulan.
Abstrak ditulis dalam satu paragraf, 150-250 kata.
Kata Kunci: (diketik miring) kata-kata dalam kata kunci diketik tegak.
 - c. Batang Tubuh Naskah :
PENDAHULUAN
PEMBAHASAN
(sub judul)
(sub judul)
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
7. **Pengutipan kutipan (sitasi)** menggunakan gaya penulisan **APA Style**, contoh :
Satu Penulis (Walker, 2007)
Dua Penulis (Walker & Allen, 2004)
Tiga Penulis (Bradley et al., 1999)
Lembaga sebagai penulis
(University of Pittsburgh, 2005)
Sitasi sumber tidak langsung
Johnson berpendapat bahwa
(Smith, 2003, h. 102)
Sumber elektronik
(Kenneth, 2003) menjelaskan ..
Penulis dan Tahun tidak diketahui
(Author/Penulis, n.d.)
8. Penulisan daftar pustaka **APA Style** ;
Buku Satu Penulis
Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Buku Lebih dari Dua Penulis

Victor, C., Scambler, S., & Bond, J. (2009). *The Social World of Older People*. UK : Mc Graw Hill

Penulis berupa Tim atau Lembaga

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed.). Washington, DC : Author

Jurnal

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 55, 893-896.

Majalah

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. *Time*, 135, 28-31.

Surat Kabar

Santosa, I. (2015, Januari 26). Penggawa dari Masa ke Masa. *Kompas*

Makalah Seminar, Konferensi & sejenisnya

Sitepu, A. (November, 2014). *Evaluasi Kebijakan Program Raskin*. Makalah dipresentasikan dalam konferensi hasil penelitian kebijakan sosial Puslitbangkesos, Jakarta

Surat Kabar Elektronik

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. *The New York Times*. Diakses dari <http://well.blogs.nytimes.com>

Jurnal Publikasi Elektronik

Lodewijckx, H. F. M.(2001, May 23). Individual Group Continuity in Corporation and Competition Undervarying Communication Conditions. *Current Issues in Social Psychology*, 6(12), 166-182. September 14,2001. <http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.htm>

Undang-Undang

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jakarta : Republik Indonesia

Sumber :

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma
Online Writing Lab (OWL) Purdue University.
<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/>
Pedoman Teknis Penulisan ;
<http://www.fe.ui.ac.id/index.php>



ISSN
2442-8094